



**GERAKAN SEPARATIS SUDAN'S PEOPLE
LIBERATION ARMY (SPLA)
DI SUDAN**

***SEPARATIST MOVEMENT OF SUDAN'S PEOPLE
LIBERATION ARMY (SPLA)
IN SUDAN***

SKRIPSI

oleh

**Faishal Hardi Setyawan
NIM 080910101029**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**GERAKAN SEPARATIS SUDAN'S PEOPLE
LIBERATION ARMY (SPLA)
DI SUDAN**

***SEPARATIST MOVEMENT OF SUDAN'S PEOPLE
LIBERATION ARMY (SPLA)
IN SUDAN***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**Faishal Hardi Setyawan
NIM 080910101029**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah saya Kusnadi, S.Pd dan Ibu saya Tatik Hartini yang tercinta;
2. Adik saya Widia Hardi Setyorini yang tersayang;
3. Guru-guru saya dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater saya, Universitas Jember.

MOTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah (atom) pun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah (atom) pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)Nya pula.”

(terjemahan Surat *Az Zalzalah* ayat 7-8)¹

“*Selesaikan apa yang kamu mulai!*”

(dialog film catatan harian si boy)²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 1992. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang. Hlm. 1087

² Satrio. 2011. “Catatan Harian Si Boy The Movie”. Indonesia. 700 Pictures.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Faishal Hardi Setyawan

NIM : 080910101029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Gerakan Separatis *Sudan’s People Liberation Army (SPLA) Di Sudan*” adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui. Skripsi ini juga belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Februari 2015

Yang menyatakan,

Faishal Hardi Setyawan

NIM 080910101029

SKRIPSI

**GERAKAN SEPARATIS SUDAN'S PEOPLE
LIBERATION ARMY (SPLA)
DI SUDAN**

Oleh

FAISHAL HARDI SETYAWAN
NIM 080910101029

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supriyadi, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Adhiningasih P, S.Sos., M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Gerakan Separatis *Sudan’s People Liberation Army (SPLA)*
Di Sudan” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 17 Februari 2015

waktu : 09:00 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
NIP. 19590423198702 1 001

Sekretaris I

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP. 19580317198503 1 003

Anggota I

Dr. M. Iqbal, S.Sos., M.Si
NIP. 19721204199903 1 004

Sekretaris II

Adhiningasih P, S.Sos., M.Si
NIP. 19781224200812 2 001

Anggota II

Fuat Albayumi, S.IP., MA
NIP. 19740424200501 1 002

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 19520727198103 1 003

RINGKASAN

Gerakan Separatis *Sudan's People Liberation Army (SPLA) Di Sudan*; Faishal Hardi Setyawan, 080910101029; 2015: 100 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Gerakan separatis merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan kelompok manusia atau suatu wilayah dari suatu kelompok atau wilayah yang sebelumnya bersatu (utuh). Munculnya ide separatisme bisa memicu terjadinya sebuah disintegrasi bangsa. Disintegrasi secara harfiah bisa dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Dalam kondisi seperti ini negara dianggap gagal untuk mengayomi dan menjaga keutuhan bangsanya. Disintegrasi bangsa seperti ini juga terjadi di negara Sudan. Sudan dalam sejarahnya telah mengalami sebuah disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa yang terjadi di Sudan disebabkan oleh munculnya gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army (SPLA)* pada tahun 1983. Gerakan separatis SPLA ini dipimpin oleh John Garang De Mabior sebagai bentuk perlawanan atas ketidakpuasan terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Sudan. Dalam aksinya, SPLA juga mendapatkan dukungan dari pihak luar, di antaranya adalah Israel dan Amerika Serikat melalui Ethiopia. Sejak berdirinya SPLA di tahun 1983, Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata dan pelatihan militer terhadap anggota SPLA, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan. Konflik antara Pemerintah Pusat Sudan dan Gerakan separatis SPLA akhirnya berhasil dihentikan setelah tercapainya kesepakatan Perjanjian Damai Menyeluruh / *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* di Naivasha, Kenya, pada tahun 2005.

Tujuan dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan meneliti faktor-faktor pemicu munculnya gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) di Sudan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder kemudian menganalisis dengan mengembangkan teori yang ada sesuai fakta-fakta umum yang tersedia dan kemudian menarik generalisasi yang bersifat khusus. Dalam hal ini, metode analisis deskriptif akan menjelaskan suatu peristiwa dengan mempertimbangkan kesimpulan sebagai konsekuensi logis dari permasalahan yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang munculnya gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) di Sudan disebabkan karena Pemerintah pusat Sudan di Khartoum tidak memperhatikan pembangunan (ekonomi) di daerah Sudan bagian selatan, penerapan hukum yang tidak adil (karena perbedaan ras dan adat istiadat) sehingga menghasilkan diskriminasi ras dan agama oleh pemerintah pusat Sudan, munculnya semangat kedaerahan (sukuisme) di Sudan bagian selatan, dan adanya propaganda pihak asing dalam kekacauan konflik di Sudan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Gerakan Separatis Sudan’s People Liberation Army (SPLA) Di Sudan*” ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Drs. Supriyadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Adhiningasih P, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
3. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya para dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
4. Segenap civitas akademika FISIP Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menempuh studi di kampus FISIP Universitas Jember;
5. Teman, sahabat, dan saudara-saudaraku mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2008 yang selalu bersama dalam suka duka menyelesaikan skripsi, terimakasih kalian telah menjadi partner yang sangat baik selama ini;

6. Para junior dan senior jurusan Hubungan Internasional, terimakasih atas pertemanannya;
7. Saudara-saudaraku di Jember Capoeira Community (JCC) dan Zungu Capoeira Jember, terimakasih atas waktu dan kesempatan untuk mengenal orang-orang hebat seperti kalian semua;
8. Teman-teman kost alumni Belitung 01, Kontrakan Mastrip, Belitung 04, dan Bangka Raya 05 yang punya banyak cerita;
9. Khusus untuk Alm. M. Taufan Kharyadi, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2008, semoga engkau tenang disana;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 11 Februari 2015

Penulis

Faishal Hardi S.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.2.1 Batasan Materi	5
1.2.2 Batasan Waktu	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Kegunaan Penelitian	7

1.5 Kerangka Konseptual	7
1.6 Argumen Utama	10
1.7 Metode Penelitian	11
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	11
1.7.2 Metode Analisis Data	11
1.8 Sistematika Penulisan	12
BAB 2. GAMBARAN UMUM SUDAN	14
2.1 Sejarah Terbentuknya Negara Sudan	14
2.2 Keadaan Geografis Sudan	19
2.3 Komposisi Etnis Dan Kelas Sosial Di Sudan	21
2.3.1 Komposisi Etnis	21
2.3.2 Kelas Sosial Di Sudan	27
2.4 Potensi Sumber Daya Alam Dan Ekonomi Di Sudan	29
2.4.1 Industri Minyak Bumi	29
2.4.2 Pertanian	31
2.5 Politik Dan Pemerintahan Di Sudan	32
2.5.1 Demokrasi Dan Kudeta Militer	32
2.5.2 Sudan Masa Pemerintahan Omar Al-Bashir	38
BAB 3. GERAKAN SEPARATIS SUDAN’S PEOPLE LIBERATION	
ARMY (SPLA)	40
3.1 Sejarah Berdirinya Gerakan Separatis Sudan’s People Liberation Army (SPLA)	40
3.2. Pemimpin Gerakan Separatis Sudan’s People Liberation Army (SPLA)	45
3.2.1 John Garang	45
3.2.2 Salva Kiir Mayardit	48
3.3 Kekuatan Militer Gerakan Separatis Sudan’s People Liberation Army (SPLA)	50

3.4 Upaya-upaya Penyelesaian Konflik Sudan's People Liberation Army (SPLA) Dengan Pemerintah Sudan	52
BAB 4. LATAR BELAKANG SUDAN'S PEOPLE LIBERATION ARMY (SPLA) MELAKUKAN GERAKAN SEPARATIS DI SUDAN	62
4.1 Pemerintah Pusat Sudan Tidak Memperhatikan Pembangunan (Ekonomi) di Sudan Bagian Selatan.....	62
4.2 Semangat Kedaerahan (Sukuisme) Yang Sangat Kuat Di Sudan Bagian Selatan	69
4.3 Adanya Propaganda (Intervensi Asing) Dalam Kekacauan Konflik Di Sudan	75
BAB 5. KESIMPULAN	87
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

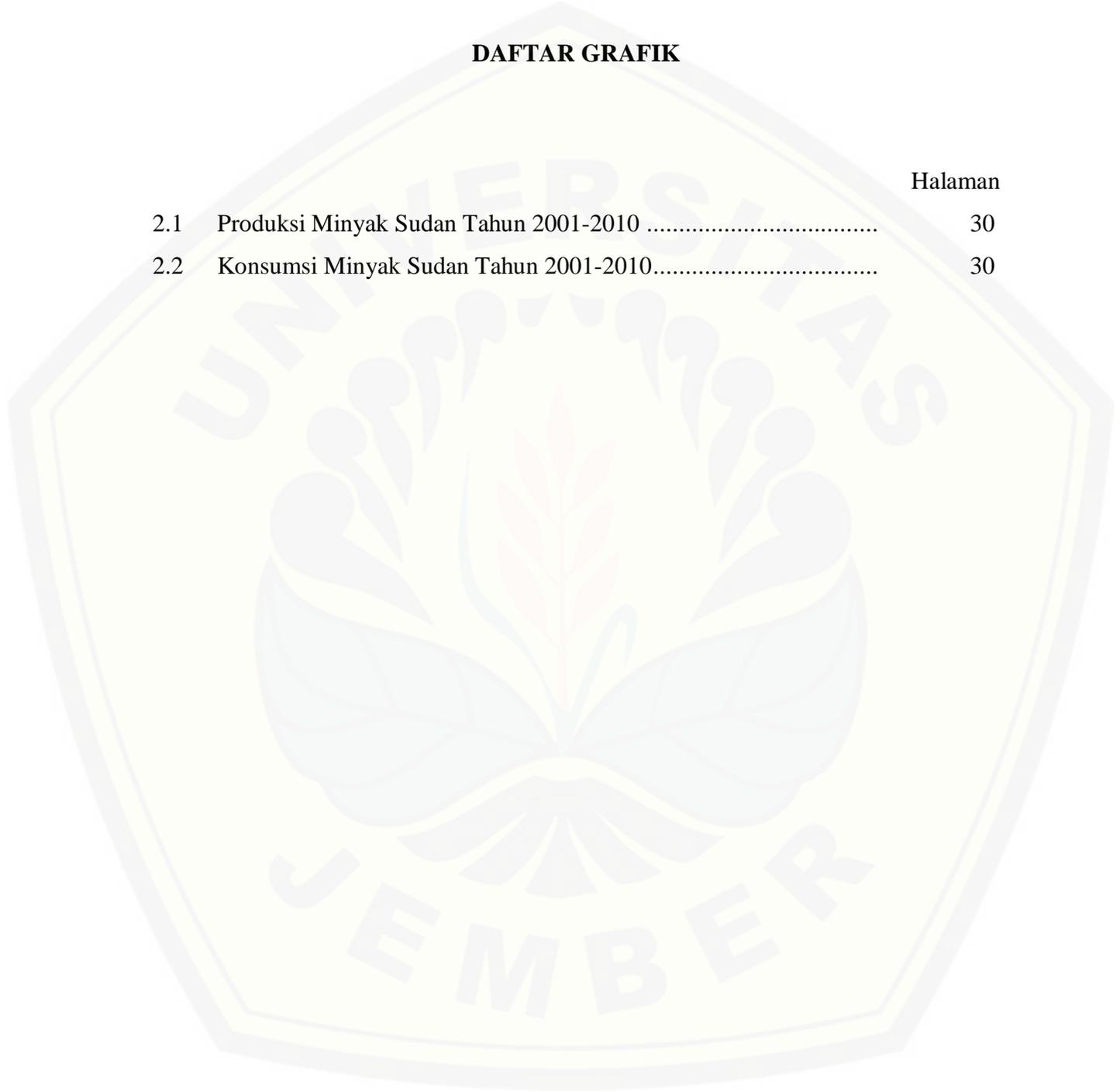
	Halaman
2.1 Kelompok Etnis Mayoritas Di Sudan Berdasarkan Wilayah, Afiliasi Agama, Dan Latar Belakang Bahasa	22
2.2 Rezim Politik Di Sudan Setelah Merdeka Pada Tahun 1956 – Sekarang	34
3.1 Gerakan Separatis Di Sudan	42
3.2 Proses Perdamaian Sudan – SPLA (1986-2005)	54
4.1 Alokasi Dana Pembangunan Untuk Wilayah Negara Sudan Pada Tahun 1996 – 2001	64
4.2 Perbandingan Indikator Pembangunan Antara Sudan Bagian Utara Dengan Sudan Bagian Selatan	66
4.3 Suku-suku Di Sudan Bagian Selatan Yang Mendukung Gerakan Separatis <i>Sudan People's Liberation Army (SPLA)</i>	74
4.4 Bantuan Israel Terhadap Gerakan Separatis <i>Sudan People's Liberation Army (SPLA)</i>	80
4.5 Latar Belakang <i>Sudan's People Liberation Army (SPLA)</i> Melakukan Gerakan Separatis Di Sudan	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Keadaan Geografis Sudan.....	20
2.2 Kelas Sosial Dalam Kultur Masyarakat Sudan	28

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
2.1 Produksi Minyak Sudan Tahun 2001-2010	30
2.2 Konsumsi Minyak Sudan Tahun 2001-2010.....	30



DAFTAR SINGKATAN

AAA	=	Addis Ababa Accord
CPA	=	Comprehensive Peace Agreement
DOP	=	Declaration of Principles
DUP	=	Democratic Unionist Party
HAM	=	Hak Asasi Manusia
IGAD	=	Inter-Governmental Authority for Development
MOU	=	Memorandum Of Understanding
NUP	=	National Unionist Party
PD II	=	Perang Dunia Kedua
PDF	=	People Defence Force
SARA	=	Suku Agama Ras dan Adat-istiadat
SPAF	=	Sudanese People Armed Force
SPLA	=	Sudan's People Liberation Army
SSLM	=	South Sudan Liberation Movement
UNF	=	United National Front

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. The Comprehensive Peace Agreement Between The Government Of The Republic Of The Sudan And The Sudan's People Liberation Army (SPLA)	104

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berakhirnya masa perang dunia kedua (PD II), hubungan internasional telah membawa dunia pada konstelasi baru dalam hubungan antar negara. Dunia tidak lagi didominasi oleh pertentangan dua ideologi diantara Barat dan Timur. Isu-isu domestik yang sebelumnya memang telah ada, muncul kembali ke permukaan lingkungan politik internasional. Isu-isu ini meliputi segala aspek kehidupan seperti pembangunan ekonomi, kerjasama, konflik etnis, perang sipil, dan bahkan berupa separatisme.

Situasi seperti konflik etnis, perang sipil, dan separatisme juga tampak di kawasan Afrika pada saat ini. Afrika merupakan salah satu kawasan yang terdiri dari banyak negara dan dihuni oleh masyarakat yang memiliki perbedaan dalam hal keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan kebudayaan. Selama beberapa dekade terakhir benua Afrika terus menerus mengalami kemiskinan, bencana kelaparan, perang, penyakit menular, bencana alam, dan berbagai persoalan lainnya.¹

Benua Afrika juga terdiri dari negara-negara yang hampir semuanya bekas jajahan kolonialisasi bangsa Eropa dan memiliki tingkat perekonomian yang rendah. Setelah kolonialisasi dari beberapa negara di kawasan Eropa seperti Inggris, Italia, Perancis, dan Belanda keluar pada tahun 1950-an dan 1960-an², sebagian besar negara-negara Afrika dikuasai oleh para diktator. Diktator yang memerintah di sebagian negara Afrika antara lain seperti Mobutu Sese Seko yang menjadi Presiden Kongo (1965-1967), Idi Amin yang memerintah Uganda (1971-

¹ Adhi Satrio. 2008. "Peran Pasukan Perdamaian PBB Dalam Konflik Internal Di Sierra Leone (1994-2005)". Jakarta: FISIP Universitas Indonesia. Hlm. 1

² Ricky Setiawan. 2010. "Intervensi Ethiopia dalam konflik di Somalia (2006-2008)". Yogyakarta: FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm. 1

1979), hingga Muammar Khaddafi yang memerintah Libya selama 42 tahun (1969-2011)³.

Ketika negara-negara bekas kolonialisasi seperti Mesir, Sudan, Eritrea, dan Somalia memerdekakan diri dan membentuk pemerintahan sendiri masih saja mengundang banyak permasalahan dalam negeri mereka, baik itu berupa konflik antar negara maupun konflik intra negara. Konflik antar negara di benua Afrika salah satunya terjadi karena masalah perbatasan atau *cross-border*, dimana satu negara akan berusaha mengakuisisi wilayah negara lain dengan menggunakan kekuatan militer yang dimilikinya (*by force*) seperti konflik antara Ethiopia dengan Somalia tahun 1977-1978, dan konflik antara Eritrea dengan Ethiopia pada tahun 1998-2000.⁴ Sedangkan konflik intra negara cenderung mengarah ke perang saudara atau konflik etnis/internal yang dilatarbelakangi oleh persaingan atau perbedaan suku, agama, ras, dan adat-istiadat (SARA). Seperti kawasan Afrika yang terseret dalam kancah perang dan pertikaian antar suku dan antar etnik yang paling parah dan sulit dicarikan solusi damainya. Korban konflik dan perang yang berkecambuk terjadi di beberapa negara Afrika. Bahkan jauh sebelumnya, di Kongo, Rwanda, dan Nigeria, pertikaian etnis atau suku yang terjadi lebih besar bila dibandingkan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi.⁵

Pertikaian etnis juga terjadi di Sudan. Sudan adalah negara terbesar di Afrika yang berada di sebelah utara benua Afrika. Negara ini merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1956. Sudan didominasi oleh dua kelompok besar masyarakat, yaitu masyarakat Arab dan masyarakat Afrika. Sudan juga memiliki jumlah suku yang sangat besar, tidak kurang dari 400 suku dengan bahasa yang berbeda satu

³ Ramadhian Fadillah. 2011. 15 Diktator Terbesar Dunia Yang Berhasil Digulingkan. <http://news.detik.com/read/2011/10/22/081456/1749913/1148/15-diktator-terbesar-dunia-yang-berhasil-digulingkan--1-?nd771104bcj>. [15 Juni 2013]

⁴ Ricky Setiawan. *Op.cit.* Hlm. 1

⁵ Fierda Milasari Rahmawati. 2010. *Peacekeeping Operation Darfur*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia. Hlm. 23

sama lain.⁶ Seluruh suku ini berbaur di 26 negara bagian yang mempunyai otonomi yang cukup besar, karena Sudan menganut sistem pemerintahan federal.⁷

Secara garis besar, Sudan terbagi dalam dua bagian wilayah. Sudan bagian utara dihuni oleh ras Arab, berdarah Arab, dan berbahasa Arab. Selain itu, di Sudan bagian utara juga dihuni oleh ras non-Arab (suku Nubia) tetapi memeluk agama Islam dan dekat dengan ras Arab karena kesamaan akidah, dan bahasa sehari-hari. Pengaruh Arab dan Islam juga sangat kuat dan mengakar di bagian Barat dan Timur Sudan. Sedangkan di Sudan bagian selatan, terdapat berbagai suku dari berbagai ras. Mereka mengaku sebagai penduduk asli Sudan dan Afrika, yang terdiri dari suku-suku Dinka, Nuer, Shiluk, dan Azande. Mereka juga dianggap sebagai bagian dari kelompok besar suku Nilote, karena wilayah geografis mereka berada di lembah hulu Sungai Nil. Mayoritas dari mereka memeluk agama Kristen dan sebagian kecil tetap mempertahankan agama tradisi Afrika.⁸ Namun demikian, adanya perbedaan antara Sudan bagian utara yang Muslim Arab (kecuali Muslim Nubia) dengan Sudan bagian selatan yang non-Muslim, sering menimbulkan konflik kekerasan atau pergolakan yang menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan di Pemerintah Pusat Sudan. Maka sejak merdeka tahun 1956, Sudan telah mengalami berkali-kali pergolakan, sebagai dampak dari kemelut antar kelompok yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.⁹

Pihak militer yang condong kepada Muslim telah mendominasi politik nasional Sudan sejak meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1956. Pasca kemerdekaan pada tahun 1956, pusat pemerintahan Sudan berada di Khartoum (Sudan bagian utara). Daerah tersebut merupakan daerah yang didominasi mayoritas etnis Arab dan penduduk yang beragama Islam. Pihak yang menguasai pemerintahan, yaitu mayoritas rakyat dari Sudan bagian utara, dan pihak militer

⁶ Ana Reis. 2004. Sudan Hadapi Tantangan Berat Dalam Membangun Nasionalisme. <https://groups.yahoo.com/neo/groups/KESTA/conversations/messages/5674>. [15 Desember 2014]

⁷ John Diggle. 2005. *History Of The Sudan*. <http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa86>. [15 April 2013]

⁸ Ahmad Priambodo. 2011. Kebijakan Luar Negeri Sudan Terhadap Ketidakstabilan Politik di Sudan. <http://dc341.4shared.com/doc/7y2orYyD/preview.html>. [2 Februari 2013]

⁹ John Pike. 2000. *Sudan Civil War*. <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan.htm>. [5 Februari 2013]

yang mayoritas Arab-Muslim juga termasuk didalamnya. Dapat dipastikan bahwa pihak militer lebih condong kepada Pemerintahan Muslim Sudan.

Keadaan Sudan terbilang kacau karena perang sipil yang berlarut-larut selama sisa abad ke-20. Konflik tersebut berakar pada keadaan ekonomi, politik, dan dominasi sosial yang besar terhadap masyarakat non-Muslim dan non-Arab di Sudan bagian selatan. Pada akhirnya terjadi perang sipil. Perang sipil pertama dimulai pada tahun 1955 dan berakhir pada tahun 1972 yang ditandai dengan perjanjian Addis Ababa pada tanggal 27 Maret 1972.¹⁰

Selanjutnya, perang sipil kedua pecah di Sudan pada tahun 1983 karena realisasi perjanjian Addis Ababa 1972 yang tidak sesuai harapan masyarakat di Sudan bagian selatan. Kegagalan Perjanjian Addis Ababa ini telah memunculkan berdirinya gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA; Tentara Pembebasan Rakyat Sudan) pimpinan John Garang De Mabior sebagai bentuk perlawanan atas ketidakpuasan terhadap tindakan diskriminasi Pemerintah Pusat Sudan. Dalam aksinya, SPLA banyak mendapatkan dukungan dari pihak luar, di antaranya adalah Israel dan Amerika Serikat melalui Ethiopia. Sejak berdirinya SPLA di tahun 1983, Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata dan pelatihan militer terhadap anggota SPLA, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan bagian utara dan selatan.¹¹ Gerakan separatis ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya masalah kelaparan, lebih dari 4 juta jiwa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal, dan korban tewas yang melebihi angka 2 juta jiwa.¹²

¹⁰ Perjanjian Addis Ababa tanggal 27 Maret 1972 adalah perjanjian untuk menghentikan ketegangan antara pemerintah pusat di Khartoum dengan pihak pemberontak *Anya Nya* dan *South Sudan Liberation Movement* (SSLM) di Sudan Selatan pimpinan Joseph Lagu (gerakan separatis sebelum SPLA). Perjanjian ini dihadiri oleh presiden Gaafar Nimeiry sebagai perwakilan dari Sudan, Joseph Lagu dari *Anya Nya*, dan Kaisar Ethiopia Haile Selassie sebagai fasilitator. Hasil penting dari perjanjian ini adalah, 1) pembentukan pemerintahan otonomi tunggal yang mengontrol seluruh wilayah Sudan bagian selatan, 2) Penggabungan tentara pemberontak SSLM dalam Tentara Nasional Sudan, 3) Bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa pokok Sudan Selatan.

¹¹ Nolly Prapti M. Mokke. 2011. Suatu Analisis Tentang Masa Depan Negara Sudan Pasca Referendum. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin. Hlm. 41

¹² John Pike. 2000. *Sudan Civil War*. <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan.htm>. [5 Februari 2013]

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji suatu penulisan dengan judul :

“Gerakan Separatis *Sudan’s People Liberation Army (SPLA) di Sudan*”.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, ruang lingkup pembahasan mempunyai kedudukan yang cukup penting. Hal ini disebabkan karena dengan ditetapkannya ruang lingkup pembahasan, tulisan ini akan lebih fokus pada kajian yang akan dianalisis. Pembahasan masalah bisa berkembang ke arah sasaran yang tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan ini bisa membawa perkembangan pembahasan pada jalur yang tepat. Ruang lingkup pembahasan karya ilmiah ini terdiri dari dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk lebih memfokuskan materi yang dijadikan bahasan utama dalam sebuah karya ilmiah. Dalam tulisan ini, penulis membatasi materi tulisan pada latar belakang munculnya gerakan separatis *Sudan’s People Liberation Army (SPLA) di Sudan*.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam karya ilmiah ini dimulai dari tahun 1972 yang ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Addis Ababa untuk mengakhiri perang sipil pertama antara Pemerintah Sudan dengan gerakan separatis *Anyanya*, hingga tercapainya kesepakatan damai *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* pada tahun 2005.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan data dan fakta yang terjadi baik sebelum maupun setelah batasan waktu yang telah ditentukan diatas. Hal ini dilakukan untuk memperjelas dan mempertajam analisis yang penulis paparkan dalam pembahasan selanjutnya.

1.3 Rumusan Masalah

Sebuah karya tulis ilmiah dituntut untuk dapat memaparkan hal yang menjadi pokok permasalahan. Permasalahan merupakan hal mendasar yang harus dibuat dalam setiap penelitian ilmiah. Perumusan masalah dapat membantu memberikan pencarian fokus pembahasan. Perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Masalah muncul karena tidak ada kesesuaian antara harapan, teori, dan atau kaidah dengan kenyataan.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas, maka permasalahan yang penulis angkat adalah hal-hal yang berhubungan dengan timbulnya konflik internal di Sudan sebagai akibat dari dilanggarnya Perjanjian Addis Ababa 1972 oleh Pemerintah Sudan. Selain itu, berkaitan dengan hal-hal apa saja yang SPLA lakukan untuk mewujudkan kemerdekaan Sudan bagian selatan, hingga berlakunya referendum yang menghasilkan kemerdekaan bagi Sudan bagian Selatan.

Dari pengertian dan fakta tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ilmiah ini adalah:

“Apa yang melatarbelakangi *Sudan’s People Liberations Army (SPLA)* melakukan gerakan separatis di Sudan?”

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meneliti latar belakang munculnya gerakan separatis *Sudan’s People Liberation Army (SPLA)* di Sudan yang telah mengakibatkan perang sipil kedua di Sudan pada tahun 1983.

¹³ UPT Penerbitan Universitas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember University Press. Hlm. 18.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan kajian para mahasiswa, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis, khususnya studi pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional. Selain itu penelitian ini digunakan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan mencapai gelar Sarjana Sosial.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, kerangka konseptual menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam proses penulisan. Kerangka konseptual menjadi sebuah kerangka kerja yang membantu penulis terhindar dari pembahasan yang menyimpang dan membantu penulis dalam melakukan suatu analisa yang akurat terhadap suatu masalah.

Kerangka konseptual disusun secara sistematis untuk membantu dalam penulisan dan pemahaman analisis yang dilakukan. Definisi konsep menurut Mochtar Mas'ood adalah:

“Sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Ia bukan sesuatu yang asing, kita menggunakannya sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-ciri yang relevan bagi kita”¹⁴

Konsep yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah konsep separatisme. Menurut Walter S. Jones, separatisme adalah sebuah gerakan yang berniat untuk memisahkan diri dari sebuah negara kesatuan atau negara induknya dengan tujuan membentuk sebuah pemerintahan sendiri yang independen. Gerakan ini selalu identik dengan cara-cara kekerasan. Separatisme sendiri biasanya dilakukan oleh kelompok minoritas yang merasa berbeda (dalam segi etnis, ras, bahasa, agama) dengan kelompok penduduk lain. Dari perlakuan

¹⁴ Mochtar Mas'ood. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES. Hlm. 94.

diskriminatif yang dialami akan berkembang menjadi alasan kuat untuk memisahkan diri.¹⁵

Gerakan separatis merupakan fenomena umum di beberapa negara (baru) yang tujuan utamanya ingin memisahkan diri dari negara yang sejak semula diperjuangkan dan dipatuhi bersama. Berbagai faktor yang melatarbelakangi separatisme adalah; i) Pemerintah pusat tidak memperhatikan pembangunan (ekonomi) di daerah tersebut. ii) Penerapan hukum yang tidak adil (karena perbedaan ras dan adat istiadat). iii) Semangat kedaerahan (sukuisme) yang sangat kuat. iv) Adanya propaganda (intervensi asing).¹⁶

Seperti Negara Sudan, dimana merupakan sebuah negara yang di wilayahnya terdapat gerakan yang menjurus ke arah separatis. Gerakan tersebut bernama *Sudan's People Liberation Army* (SPLA). Gerakan SPLA merupakan sebuah bentuk upaya perlawanan untuk melepaskan diri dari wilayah pemerintah pusat Sudan. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah tindakan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan pembangunan (ekonomi) dan ketidakadilan oleh pemerintah pusat terhadap hak-hak warga di Sudan bagian selatan. Dari segi politik dan ekonomi, Sudan bagian selatan sering tidak dianggap dalam keputusan politik, dan proliferasi ekonomi ke daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan ketidaksetaraan lapangan pekerjaan dan perkembangan daerah. Sering pula terjadi eksploitasi di daerah Sudan bagian selatan oleh pemerintahan pusat yang berlokasi di Sudan bagian utara.

Faktor yang kedua adalah penerapan hukum yang tidak adil dan adanya diskriminasi ras dan agama oleh pemerintah pusat. Sudan bagian utara mayoritas ras Arab beragama Islam, sedangkan Sudan bagian selatan mayoritas ras Negro beragama Kristen. Presiden Sudan saat itu, Gaafar Nimeiry bermaksud mengabaikan perjanjian Addis Ababa dan berniat akan menjalankan peraturan berbasis Hukum Islam (hukum syariah) sebagai peraturan nasional bagi

¹⁵ Walter S. Jones. 1993. *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional Dan Tataan Dunia 2*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 184.

¹⁶ Suharyo. 2010. *Interaksi Hukum Nasional dan Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hlm. 37.

seluruh wilayah Sudan. Keputusan Presiden Nimeiry tersebut langsung memicu kontroversi karena pemerintah pusat dianggap akan berlaku tidak adil terhadap Sudan bagian selatan yang mayoritas warganya non-Muslim (Kristen dan Animisme).

Faktor ketiga adalah timbulnya semangat kedaerahan (sukuisme) yang sangat kuat. Hal ini dipicu oleh rasa tidak terima atas pernyataan warga Sudan bagian utara yang mayoritas Arab dan Muslim yang menganggap bahwa warga Sudan di bagian utara lebih superior daripada warga Negro dan Kristen di Sudan bagian selatan. Karena pernyataan tersebut banyak warga Negro dan Kristen mendukung gerakan separatis SPLA pimpinan John Garang untuk mendirikan sebuah negara baru. Hal ini sekaligus menunjukkan pada warga Arab-Muslim di Sudan bagian utara bahwa warga Negro-Kristen di Sudan bagian selatan bisa hidup mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat Sudan di Khartoum.

Sedangkan faktor keempat adalah adanya campur tangan pihak asing dalam terjadinya separatisme di Sudan. Sejak berdirinya SPLA di tahun 1983, Israel dan Amerika Serikat melalui Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata militer di SPLA, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan bagian utara dan selatan. Selama peperangan terjadi, Ethiopia mengizinkan SPLA untuk bermarkas di Naru, dan memberikan kebebasan untuk melakukan perekrutan anggota pada warga Sudan yang mengungsi di Ethiopia. Selain itu, dukungan pihak asing tersebut juga berupa pemberian persenjataan serta pelatihan militer kepada anggota SPLA.¹⁷

Beberapa faktor seperti pemerintah pusat yang tidak memperhatikan pembangunan ekonomi di wilayah Sudan bagian selatan, penerapan hukum yang tidak adil, timbulnya semangat kedaerahan di Sudan bagian selatan, dan adanya campur tangan pihak asing dalam terjadinya konflik sipil di Sudan ini yang kemudian memicu timbulnya gerakan separatis di Sudan bagian selatan. Gerakan separatis ini bernama *Sudan People's Liberation Army* (SPLA; Tentara

¹⁷ Richard Dowden. 1994. *Israeli weapons 'bound for rebels' in Southern Sudan: Arms May Be Destined For SPLA Fight Against Khartoum*. <http://www.independent.co.uk/news/world/israeli-weapons-bound-for-rebels-in-southern-sudan-arms-may-be-destined-for-spla-fight-against-khartoum-1430077.html>. [15 April 2013]

Pembebasan Rakyat Sudan) yang didirikan pada tahun 1983 pimpinan John Garang de Mabior¹⁸, dengan kelompok *Sudan People's Liberation Movement* (SPLM; Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan) sebagai sayap politiknya.¹⁹ Dalam perjalanan konfliknya, Sudan dan SPLA telah membawa Sudan dalam perang saudara terpanjang di Afrika dengan jumlah korban tewas melebihi angka 2 juta jiwa.

Terlepas dari semakin kompleksnya perang sipil di Sudan, upaya-upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai terus dilakukan. Bulan Januari 2002, gencatan senjata antara pemerintah Sudan dengan SPLA akhirnya tercapai dan Sudan Selatan kembali menikmati periode damai. Usai tercapainya gencatan senjata, perundingan-perundingan damai untuk menentukan nasib Sudan Selatan pun terus dilakukan. Akhirnya, setelah perundingan demi perundingan terus dilakukan antara pemerintah pusat Sudan dengan SPLA, sebuah perjanjian damai pada tahun 2005 di Naivasha, Kenya, yang difasilitasi oleh *Inter-governmental Authority for Development* (IGAD) telah mencapai finalisasi perjanjian perdamaian antara pihak yang terlibat. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan perjanjian perdamaian komprehensif (*comprehensive peace agreement*), yang intinya adalah mengakhiri perang sipil kedua yang telah berlangsung 21 tahun. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemimpin SPLA, John Garang dan Ali Osman Taha (wakil presiden Sudan).

1.6 Argumen Utama

Dengan mengacu pada kerangka konsep di atas, maka penulis merumuskan argumen utama sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat Sudan tidak memperhatikan pembangunan (ekonomi) di Sudan bagian selatan;

¹⁸ Nolly Prapti M. Mokke. 2011. Suatu Analisis Tentang Masa Depan Negara Sudan Pasca Referendum. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin. Hlm. 21

¹⁹ Citra Graha. 2011. Menanti Nama Sebuah Negara Di Sudan Selatan. <http://www.suarapembaruan.com/home/menanti-nama-sebuah-negara-di-sudan-selatan/2601>. [15 Maret 2013]

2. Munculnya semangat kedaerahan (sukuisme) yang sangat kuat di Sudan bagian selatan;
3. Adanya propaganda pihak asing dalam kekacauan konflik di Sudan.

1.7 Metode Penelitian

Pengumpulan data merupakan suatu tahap dimana penulis melakukan suatu penelitian terhadap suatu sumber dan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode untuk mendapatkan informasi dari sumber dan data yang dibutuhkan, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode studi literatur untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini langkah yang diambil adalah melengkapi literatur yang relevan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku ilmiah, jurnal, situs-situs internet, dan sumber-sumber lain. Dengan demikian data-data yang diperoleh seluruhnya merupakan data sekunder.

Tempat untuk memperoleh sumber data yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Sedangkan untuk studi pustaka, penulis peroleh dari:

1. Buku
2. Internet
3. Jurnal

1.7.2 Metode Analisis Data

Penelitian harus menggunakan proses berpikir yang baik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tahap analisis data ditujukan untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-kualitatif. Dalam mengkaji masalah ini penulis menggunakan analisa data kualitatif karena

data yang diperoleh tidak bisa diukur secara statistik-matematis. Data kualitatif hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena apa adanya tanpa memerlukan penelaahan secara sistematis.

Dalam penulisan skripsi ini, data sekunder yang dipakai mayoritas berupa pendapat orang dan data pendukung kualitatif lain yang mencerminkan sikap, perilaku, pandangan, dan ideologi seseorang yang tercermin dalam berbagai bentuk publikasi, baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan analisis data tersebut, penulis menggambarkan dan menjelaskan tentang latar belakang gerakan separatis SPLA dalam upayanya untuk memisahkan diri dari negara Sudan.

1.8 Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan sebuah karya tulis, baik yang bersifat ilmiah dan non ilmiah diperlukan suatu sistematika tertentu agar dapat menguraikan dengan jelas isi dari tulisan tersebut. Penulis mengajukan sistematika penulisan untuk mengetahui gambaran umum dari karya ilmiah ini sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 GAMBARAN UMUM SUDAN

Berisi tentang gambaran umum Sudan di bagian utara dan selatan, sejarah terbentuknya negara Sudan, kondisi geografis, Komposisi etnis dan stratifikasi sosial di Sudan, potensi sumber daya alam dan ekonomi di Sudan, serta politik dan pemerintahan di Sudan.

BAB 3 GERAKAN SEPARATIS SUDAN'S PEOPLE LIBERATION ARMY

Berisi tentang sejarah berdirinya gerakan separatis SPLA, pemimpin gerakan separatis SPLA, kekuatan militer gerakan separatis SPLA, serta upaya penyelesaian konflik SPLA dengan Pemerintah Sudan.

BAB 4 LATAR BELAKANG SUDAN'S PEOPLE LIBERATION ARMY MELAKUKAN GERAKAN SEPARATIS DI SUDAN

Berisi tentang latar belakang munculnya gerakan separatis SPLA di Sudan, pemerintah pusat sudan yang tidak memperhatikan pembangunan (ekonomi) di sudan bagian selatan, munculnya semangat kedaerahan (sukuisme) yang sangat kuat di Sudan bagian selatan, Adanya propaganda pihak asing dalam kekacauan konflik di Sudan.

BAB 5 KESIMPULAN

Berisi kesimpulan berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dan pembahasan hasil penelitian.



BAB 2. GAMBARAN UMUM SUDAN

2.1 Sejarah Terbentuknya Negara Sudan

Negara Sudan merupakan kumpulan dari kerajaan-kerajaan kecil (seperti kerajaan Kush, Kerma, Nobatia, Alodia, Maqurra, Alwa, dan lain-lain), dan secara historis Sudan pernah dijajah oleh Mesir. Salah satu kerajaan Sudan yang didirikan di bawah aturan-aturan Mesir sebelum tahun 2.600 Sebelum Masehi (SM) adalah Nubia.²⁰

Sudan juga dikenal sebagai kota perdagangan. Para saudagar datang ke Sudan tidak hanya sekedar melakukan barter anggur, kebutuhan sandang, rempah-rempah, tetapi juga mengadakan perdagangan budak. Mereka juga merupakan pengabar Injil. Para pengabar Injil kemudian mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Sudan untuk menganut Agama Kristen yang tersebar di Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan pada abad ke-4.²¹ Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 569 SM, mayoritas penduduk di Sudan bagian selatan menganut Agama Kristen Orthodox.²² Pada tahun 652 M, gelombang perpindahan orang-orang Arab Muslim dari Mesir pada abad ke-16 telah menggantikan Kristen menjadi agama minoritas, sedangkan Islam menjadi mayoritas terutama di Sudan bagian Utara.²³

Setelah berakhirnya era Kristiani, penguasa Mesir bernama Mohammed Ali telah memerintahkan tentaranya untuk melakukan invasi ke Sudan dan menyatukan bagian utara negara tersebut pada tahun 1820. Bertahun-tahun sejak invasi dimulai, Mesir memperluas daerah kekuasaannya di Sudan hingga lepas pantai Laut Merah dan ke arah wilayah danau terbesar Afrika Timur. Beberapa tahun kemudian Khartoum dijadikan sebagai pusat administratif provinsi Mesir di Sudan.²⁴ Mohammed Ali mengklaim bahwa kemerdekaan yang diberikan kepada

²⁰ S. O. Y. Keita. 1993. Studies and Comments on Ancient Egyptian Biological Relationships, dalam *History in Africa. North America: African Studies Association*. Vol. 20: 129-154.

²¹ John Diggle. 2005. *History of The Sudan*. <http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa86>. [15 April 2013]

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Sudan pada saat itu merupakan pengakuan Sudan sebagai provinsi paling selatan Mesir.

Perkembangan di Sudan selama dalam masa periode invasi oleh Mesir tidak mudah dipahami tanpa terlebih dahulu melihat referensi historis keberadaan Inggris di Mesir. Pada tahun 1869, Terusan Suez dibuka dan segera menjadi jalur penting ekonomi Inggris ke India dan wilayah Timur Jauh. Inggris kemudian mencari peran yang lebih besar dalam hubungannya dengan Mesir untuk mempertahankan jalur ini. Oleh karena itu, Pemerintah Inggris mendukung program komisi utang *Anglo-French* mengambil alih tanggung jawab dalam mengelola urusan fiskal Mesir pada tahun 1873. Anglo-French merupakan badan fiskal bentukan negara Inggris dan Perancis untuk mengurus kebijakan fiskal di Mesir.²⁵ Komisi ini yang kemudian memaksa Khedive Ismail yang saat itu merupakan penguasa yang memerintah Mesir dan Sudan untuk turun tahta pada tahun 1877.²⁶

Setelah perpindahan kekuasaan pada tahun 1877, Charles George Gordon yang pada saat itu merupakan perwira militer Inggris diangkat menjadi Gubernur Jenderal Sudan.²⁷ Dalam masa kekuasaan ini, Gordon mampu mengurangi tingkat perdagangan budak yang terjadi di Sudan bagian selatan.²⁸ Namun hal ini tidak berlangsung lama setelah Charles George Gordon memutuskan mengundurkan diri sebagai Gubernur Jenderal Sudan pada tahun 1880. Akibatnya, perdagangan budak secara ilegal kembali terjadi. Tentara Sudan menderita kekurangan sumber daya dan pajak semakin meningkat di Sudan saat itu. Adanya kekacauan ini, telah memunculkan seorang pemimpin religius pada tahun 1881, yaitu Muhammad Ahmad bin Abd Allah yang mengklaim dirinya sebagai “Mahdi” (Yang Diharapkan) yang bertujuan untuk menyatukan berbagai suku bangsa di bagian barat dan selatan Sudan dibawah Pemerintahan Islam. Tidak lama kemudian,

²⁵ Mark Francis. 1999. *Sudan History*. http://www.mongabay.com/reference/country_studies/sudan/HISTORY.html. [2 Oktober 2013]

²⁶ Johnny Shaman. *Sudan-THE MAHDIYAH, 1884-98*. http://www.mongabay.com/reference/country_studies/sudan/HISTORY.html. [28 Agustus 2014]

²⁷ BBC. *General Charles George Gordon (1833-1885)*. http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/gordon_general_charles.shtml. [11 Januari 2014]

²⁸ US Departement Of State. 1999. *A Brief History Of Sudan*. <http://africanhistory.about.com/od/sudan/p/SudanHist1.htm>. [2 Agustus 2013]

Mahdi menjadi pemimpin Samaniyah. Gerakan Mahdi dengan cepat berkembang dan memiliki banyak pengikut yang menamakan diri mereka sebagai “Anshar” (Sang Pengikut).²⁹

Namun demikian, adanya eksploitasi dan penyelewengan wewenang oleh penjajah Mesir, mendorong Mahdi untuk memimpin sebuah pemberontakan nasionalis yang mencapai klimaksnya pada saat jatuhnya ibukota Khartoum tahun 1885. Pada akhir abad ke-19, gerakan Mahdi di Sudan menarik perhatian internasional karena berhasil mengibarkan bendera revolusi Islam. Para pengikut Mahdi mendirikan negara nasional Sudan yang merdeka dan pertama kali dengan sistem politik berlandaskan Islam. Rezim Mahdi atau yang lebih dikenal sebagai *Mahdiah* berhasil mengibarkan bendera revolusi Islam dan menerapkan hukum Islam tradisional.³⁰ Mahdiah kemudian dikenal sebagai pemerintahan nasionalis Sudan yang pertama. Mahdi menyatakan bahwa gerakannya itu bukan perintah agama yang dapat diterima atau ditolak. Maksudnya bahwa gerakan yang dibawa oleh Mahdi adalah rezim yang universal, yang mewajibkan setiap penduduk untuk tunduk di bawah kekuasaannya. Mahdi memimpin rezim hingga beliau meninggal pada bulan Juni tahun 1885. Peran Mahdi digantikan oleh Abdullah ibn Mohammed yang kemudian dikenal sebagai Khalifa.³¹

Selama 13 tahun, Khalifa memimpin tentara negara Islam dan tetap menjaga tradisi kekhalifahan serta memperluas ekspansi. Pada tahun 1887, Khalifa menyerang Ethiopia dengan 60.000 pasukan Anshar. Setelah menolak untuk berdamai pasukan Anshar berhasil mengalahkan pasukan Ethiopia, dan Khalifa berhasil menduduki Ethiopia pada tahun 1889.³² Pada tahun 1889, Khalifa juga menyerbu Mesir, namun tentara Mesir yang dipimpin oleh Inggris mampu mengalahkan Anshar di Tushkah (daerah Mesir). Gagalnya invasi terhadap Mesir

²⁹ Quentin Lance. 2000. *Muhammad Ahmad al-Mahdi*. <http://www.answers.com/topic/muhammad-ahmad>. [2 Oktober 2013]

³⁰ John L. Esposito & John O. Voll. 1996. *Islam And Democracy*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 102

³¹ Lucas Hilton. 1991. *Abdullah Ibn Mohammed*. <http://www.answers.com/topic/abdallahi-ibn-muhammad>. [2 Oktober 2013]

³² *Ibid*

oleh Khalifa akhirnya memaksa Anshar untuk keluar dari Ethiopia sekaligus mengakhiri masa kejayaan Anshar.³³

Pasca kekalahan kelompok Muslim Anshar, Pemerintah Mesir berniat menaklukkan kembali wilayah Sudan. Mesir meminta bantuan dari Inggris yang masih menjadi pelindungnya pada saat itu. Pada tahun 1892, Herbert Kitchener (Lord Kitchener) ditunjuk sebagai komandan dari tentara gabungan Mesir dan Inggris untuk menaklukkan Sudan.³⁴ Serangan pendudukan tentara gabungan Mesir dan Inggris yang dipimpin oleh Lord Kitchener ini telah berhasil menguasai wilayah Sudan pada tahun 1898.³⁵ Kemenangan tentara gabungan yang dipimpin Lord Kitchener ini tentu saja mengembalikan kontrol kekuasaan Inggris dan Mesir terhadap Sudan. Masa kolonisasi di Sudan juga ditandai dengan dibentuknya *Anglo-Egyptian Condominium* pada tahun 1899-1955. *Anglo-Egyptian Condominium* merupakan sebuah status negara dengan kepemilikan bersama yang dikuasai oleh Inggris dan Mesir.³⁶ Struktur pemerintahan Sudan berada di tangan kondominium tersebut, namun dalam prakteknya Inggris yang memiliki kendali penuh atas Sudan.³⁷ Inggris juga menerapkan kebijakan *divide and rule*, yaitu membagi Sudan menjadi dua koloni terpisah yaitu Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan dengan peraturan yang berbeda tiap koloninya.³⁸

Dari awal terbentuknya *Anglo-Egyptian Condominium*, Inggris berusaha untuk melakukan modernisasi di Sudan dengan menerapkan teknologi Eropa untuk memajukan wilayah yang memiliki keterbelakangan ekonomi dengan mengganti lembaga otoriter dengan orang-orang yang menganut tradisi Inggris liberal. Namun, beberapa provinsi di Sudan bagian selatan, yaitu Equatoria, Bahr

³³ Linnia Arisulistia. 2014. Power Sharing sebagai bagian dari resolusi konflik Comprehensive Peace Agreement di Sudan. Jember: FISIP Universitas Jember. Hlm. 22

³⁴ Muhammad Mirza. 2006. *Peran Uni Afrika Dalam Penyelesaian Konflik Darfur*. Jember: FISIP Universitas Jember. Hlm. 37

³⁵ Walter Steele. 1994. *Horatio Herbert Kitchener*. <http://www.answers.com/topic/herbert-kitchener-1st-earl-kitchener>. [2 Oktober 2013]

³⁶ U.S. Library Of Congress. 2011. *Anglo-Egyptian Condominium, 1899-1955*. <http://countrystudies.us/sudan/15.htm>. [11 Januari 2014]

³⁷ Billy Wintergreen. 2005. *Sudan Profile*. <http://www.state.gov/outofdate/bgn/sudan/47181.htm>. [2 Oktober 2013]

³⁸ Eisa. 2011. *Sudan: British Colonialism's Divide And Rule (1896-1939)*. <http://www.content.eisa.org.za/old-page/sudan-british-colonialisms-divide-and-rule-1896-1939>. [11 Januari 2014]

al Ghazal, dan Upper Nile mendapat sedikit perhatian dari Pemerintah Mesir, terpencil, dan tidak berkembang, kecuali dalam upaya menekan perang suku dan perdagangan budak. Inggris melihat keadaan ini dengan mengklaim bahwa Sudan bagian selatan tidak siap untuk menjalani perubahan ke dunia modern, mempertahankan adat istiadat, dan menutup wilayah untuk pendatang. Akibatnya, Sudan bagian selatan tetap terisolasi dan terbelakang.³⁹ Inggris juga melakukan kontrol terhadap beberapa kegiatan komersial pedagang Arab di Sudan bagian selatan. Namun, di balik itu semua, realita yang terjadi adalah hadirnya misionaris Kristen untuk mengoperasikan sekolah, klinik medis, dan pelayanan sosial di Sudan bagian selatan. Dengan demikian, banyak warga Sudan bagian selatan yang lebih memilih memeluk agama Kristen karena menganggap para misionaris Kristen lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Sudan bagian selatan pada saat itu. Misionaris Kristen melakukan misi kemanusiaan sekaligus penyebaran agama Kristen di Sudan bagian selatan sebelum masa kejayaan Mahdiah.⁴⁰ Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Inggris dan Pemerintah Mesir mempertahankan wilayah yang terpisah. Pemerintah Inggris fokus pada perkembangan Sudan bagian selatan, sedangkan Pemerintah Mesir mendominasi Sudan bagian utara.

Pemerintah Inggris menganggap bahwa perannya di Sudan adalah sebagai proteksi terhadap penduduk Sudan dari dominasi Mesir. Hal ini menyebabkan pemimpin nasionalis dan agamis terbagi dalam isu-isu yang berbeda, yaitu antara kemerdekaan bagi Sudan atau integrasi dalam wilayah Mesir. Kelompok agamis merupakan orang-orang Sudan Muslim yang terpelajar dan ingin membatasi kekuasaan Gubernur Jenderal untuk memperoleh partisipasi bagi penduduk Sudan dalam segala kebijakan-kebijakan Dewan. Namun, untuk mewujudkan pemerintahan seperti yang diharapkan oleh kelompok agamis membutuhkan perubahan dalam amandemen kesepakatan kondominium. Inggris dan Mesir tidak menyetujui modifikasi kesepakatan yang telah dibuat. Putra Mahdi menjadi tokoh

³⁹ Savo Heleta. 2008. *Roots Of Sudanese Conflict Are In The British Colonial Policies*. <http://www.sudantribune.com/spip.php?article25558>. [24 Mei 2014]

⁴⁰ Mark Francis. 1999. *Sudan History*. http://www.mongabay.com/reference/country_studies/sudan/HISTORY.html. [6 September 2011]

yang menyuarkan kemerdekaan bagi Sudan sedangkan para nasionalis radikal menyuarkan integrasi dengan Mesir.⁴¹ Pada akhirnya, bulan Januari 1954, pemerintahan baru di Sudan terbentuk untuk mengisi masa transisi menuju kemerdekaan, yaitu dibawah kekuasaan pemimpin *National Unionist Party* (NUP) Ismail al Azhari.⁴²

Kurang dari enam bulan sebelum kesepakatan mengenai tanggal kemerdekaan bagi Sudan, terjadi gejolak di Sudan bagian selatan. Kekhawatiran penduduk Non-Muslim yang merupakan mayoritas di Sudan bagian selatan terhadap dominasi yang besar dari orang-orang Muslim Arab di Sudan bagian utara, merupakan latar belakang terjadinya perang saudara yang berkepanjangan lebih dari satu dekade.⁴³ Pemerintahan Azhari sementara menghentikan rencana penentuan nasib sendiri bagi Sudan, dan mengupayakan penyatuan Sudan dengan Mesir. Walaupun pada pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1953 dimenangkan oleh Azhari, namun ia sadar bahwa mayoritas opini yang berkembang di Dewan Perwakilan menghendaki kemerdekaan bagi Sudan. Pada akhirnya, Azhari serta NUP harus mengakomodir mayoritas suara yang mendukung kemerdekaan bagi Sudan. Pada tanggal 19 Desember 1955, Parlemen Sudan menyusun deklarasi kemerdekaan Sudan, dan pada tanggal 1 Januari 1956, Sudan resmi menjadi negara republik.⁴⁴

2.2 Keadaan Geografis Sudan

Republik Sudan merupakan negara terluas di Afrika yang memiliki luas sekitar 2.505.810 km². Wilayah Sudan didominasi oleh sungai Nil dan anak-anak sungainya. Sudan terletak di Afrika Utara dan beribukota di Khartoum. Sudan

⁴¹ Mark Francis. *Op. Cit*

⁴² Richard Gale. 1985. *Sayyid Ismail Al-Azhari*. <http://www.answers.com/topic/ismail-al-azhari>. [3 Oktober 2013]

⁴³ Penduduk non-Muslim di Sudan bagian selatan terdiri dari penganut Kristiani serta animisme, sedangkan Sudan bagian utara lebih didominasi oleh orang-orang Muslim. Jalan menuju kemerdekaan Sudan sarat akan konflik internal yang menyangkut bentuk pemerintahan, ideologi, serta *national identity*.

⁴⁴ Billy Wintergreen. 2005. *Sudan Profile: Independence*. <http://www.state.gov/outofdate/bgn/sudan/47181.htm>. [2 Oktober 2013]

berbatasan dengan Mesir di utara, Eritrea dan Ethiopia di timur, Kenya dan Uganda di tenggara, Kongo dan Republik Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat laut.⁴⁵

Sudan terdiri dari daratan yang sangat luas dengan gurun sahara di sebelah utara, daerah pegunungan di bagian timur dan barat. Selain itu, terdapat rawa-rawa dan hutan hujan tropis yang sangat besar di bagian selatan. Sudan bagian selatan beriklim tropis, sedangkan bagian utara beriklim kering dan tandus, karena daratannya di dominasi oleh padang pasir. Titik terendah Sudan adalah Laut Merah yaitu 0 m, sedangkan titik tertinggi di Sudan adalah puncak Gunung Kinyeti Imatong, yaitu sekitar 3187 m.⁴⁶

Gambar 1. Keadaan Geografis Sudan⁴⁷



⁴⁵ Floyd Lawton. 2011. *About The Republic Of The Sudan*. <http://www.sudan.net/about.php>. [3 Oktober 2013]

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Rose Stimson. 2000. *Map Of Sudan*. <http://southsudaninfo.net/maps/>. [1 Oktober 2013]

Perbedaan iklim dan kondisi geografis diyakini sebagai salah satu penyebab kesenjangan hubungan antara penduduk di Sudan bagian utara dan selatan. Penduduk di Sudan bagian utara yang kondisi geografisnya gersang seringkali memanfaatkan hasil bumi (seperti minyak dan pertanian) dari wilayah penduduk Sudan bagian selatan untuk kepentingan pembangunan di Sudan bagian utara. Hal ini yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial dari pihak Sudan bagian selatan karena pembangunan oleh pemerintah pusat hanya terfokus di Sudan bagian utara saja. Pada akhirnya, muncul sebuah gerakan separatis di Sudan bagian selatan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat Sudan. Gerakan separatis ini bernama *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) yang dipimpin oleh John Garang.⁴⁸

2.3 Komposisi Etnis dan Kelas Sosial di Sudan

2.3.1 Komposisi Etnis

Sudan merupakan negara terbesar di Afrika yang memiliki populasi lebih dari 41 juta jiwa dan terbagi menjadi beberapa kelompok etnis serta agama. Masyarakat Sudan terdiri lebih dari 100 etnis yang menetap maupun nomaden di wilayah Sudan, namun diklasifikasikan dalam Afrika kulit hitam (52%), Arab (39%), Beja dan Nubian (6%), dan lain-lain (3%). Sebagian besar kelompok etnis di Sudan menafsirkan tradisi dan asal-usul mereka mengacu pada peristiwa masa lampau. Sebagai contoh, orang-orang Berti dan Zaghawa mengklaim diri mereka keturunan suku Nilo-Sahara yang berasal dari barat laut Sudan. Namun, beberapa kelompok etnis yang hidup di Sudan juga merupakan imigran dari negara-negara tetangga Sudan yang terjadi puluhan tahun yang lalu.⁴⁹

Agama juga merupakan elemen penting dalam melihat sejarah, baik konflik maupun politik di Sudan. Islam merupakan agama mayoritas di Sudan bagian utara. Etnis Arab yang mayoritas menetap di Khartoum, ibukota Sudan,

⁴⁸ Rahmat Budi Luhur. 2011. Sang Pemberontak Selatan Sudan. <http://www.intelijen.co.id/index.php/sang-pemberontak-selatan-sudan/>. [13 Oktober 2013]

⁴⁹ Pamela Paglia. 2007. *Ethnicity and Tribalism: are these the Root Causes of the Sudanese Civil Conflicts?*. <http://www.africaeconomicanalysis.org/articles/pdf/sudan0807.pdf>. [10 Oktober 2013]

merupakan penganut agama Islam (70%) serta sebagian dari etnis Afrika berkulit hitam. Sedangkan sebagian etnis Afrika kulit hitam yang lain merupakan penganut Kristen (5%) yang tersebar di Sudan bagian selatan, dan etnis yang lain banyak yang menganut kepercayaan kuno atau animisme sebesar 25%.⁵⁰

Tabel 1. Kelompok Etnis Mayoritas di Sudan berdasarkan Wilayah, Afiliasi Agama, dan Latar Belakang Bahasa⁵¹

No.	Wilayah	Kelompok Etnis Utama	Afiliasi Agama	Latar Belakang Bahasa
1	Bahr El-Ghazal Barat	Ndogo, Balanda, Bongo, Kresh	Lebih dari 60% beragama Kristen dan 20% Muslim.	<i>Sudanic group language</i> , seperti bahasa yang digunakan Niger-Kongo.
2	Rest Of Bahr El-Ghazal	Kelompok Nilotic: sebagian besar Dinka dan Jur yang mendiami wilayah sekitar danau, Warrab dan negara bagian Bahr El-Gazhal Utara.	Kurang dari 50% yang beragama Kristen dan 5% Muslim. Mayoritas adalah penganut kepercayaan kuno (Animisme).	Bahasa Nilo-Sahara
3	Equatoria Barat	Azande, Muru, Baka, Mundu, Avukaya	Lebih dari 75% mengaku sebagai penganut Kristiani dan 5% Islam, 20% Animisme.	Bahasa Sudanic dan Niger-Kongo.

⁵⁰ Floyd Lawton. 2011. *About The Republic Of The Sudan*. <http://www.sudan.net/about.php>. [2 Oktober 2013]

⁵¹ Kuel Maluil Jok. 2012. *Conflict Of National Identity In The Sudan*. <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/30239/conflict.pdf?sequence=1>. [16 Maret 2013]

No.	Wilayah	Kelompok Etnis Utama	Afiliasi Agama	Latar Belakang Bahasa
4	Rest Of Equatoria	Nilo-Hamitic Groups, seperti suku Bari, Kuku, Kakwa, Mundari, Nyangwara, dan Pajulu; <i>Lotuho-Speaking Groups, Toposa-Speaking Group, Didinga</i>	40% Kristiani, kurang dari 6% Muslim dan sisanya Animisme.	Nilo-Sahara
5	North Upper Nile, Central Upper Nile, South Upper Nile, Western Upper Nile	Dinka Abialang, Nuer, Shilluk	Dinka Abialang sebagian besar beragama Islam yang berada di <i>North Upper Nile</i> . Sedangkan yang lainnya merupakan penganut Animisme.	Bahasa Nilo-Sahara
6	Khartoum	Semua kelompok Etnis berada di sini. Khartoum merupakan <i>melting pot</i> (tempat berkumpul) semua kelompok etnis Sudan.	Arab dan kelompok yang berasal dari Sudan bagian Barat adalah Muslim, sedangkan kelompok etnis yang berasal dari Sudan Selatan menganut agama Kristiani dan Islam.	Bahasa Arab

No.	Wilayah	Kelompok Etnis Utama	Afiliasi Agama	Latar Belakang Bahasa
7	South Blue Nile	The Fung, Kadalo, Berta, Dowala, Uduk, Gumuz, Wataweet, Koma	Islam, Kristiani dan Animisme	Bahasa Nilo-Sahara
8	Rest Of Blue Nile	Orang Arab asli dengan orang Afrika Barat, yang dikenal sebagai Fellata.	Muslim	Bahasa Arab, Niger-Kongo, dan Kordofanian
9	Sudan Timur	Sebagian besar kelompok Etnis Beja	Sebagian besar Muslim	Bahasa Afro-Asiatic yang dikenal sebagai <i>Chuistic</i>
10	Kordofan	Di Selatan Kordofan sebagian besar kelompok Arab yang disebut Baggara, sedangkan di Abyei yakni Dinka Ngok	50% Islam, 30% Kristen dan sebagian lainnya adalah animisme	Bahasa Arab bagi kelompok Arab sedangkan yang lain adalah bahasa Niger-Kongo dan Kurdufanian
11	Darfur	Terdiri dari <i>African origin</i> , seperti Fur, Zaghawa, Massalit, Berti, Borgo, Birgid, Tama, dan Tungur. Kelompok etnis Arab terdiri dari Baggara (<i>cattle nomads</i>) dan Abballa (<i>camel nomads</i>).	Muslim (Islam)	Orang-orang Afrika kulit hitam menggunakan bahasa Niger-Kongo, sedangkan orang Arab menggunakan bahasa Arab

Republik Sudan memiliki komposisi masyarakat yang pluralistis di masing-masing wilayahnya. Hal ini dikarenakan adanya dua kebudayaan besar yaitu Arab dan orang Afrika berkulit hitam, dengan banyak kelompok etnis, suku dan bahasa. Penduduk Sudan berasal dari berbagai macam kelompok etnis yang berbeda, yaitu etnis Afrika sebesar 52%, yang mana banyak terdapat di wilayah Bahr El-Gazhal, Equatoria, Upper Nile, dan Darfur. Etnis Arab sebanyak 39% mendominasi wilayah Khartoum, Blue Nile, dan Kordofan. Etnis Beja sebanyak 6% banyak mendiami wilayah Sudan Timur, yang mana sebagian besar merupakan orang-orang Muslim. Sedangkan kelompok etnis lain sebanyak 3% tersebar hampir di seluruh wilayah Sudan.⁵²

Dalam masyarakat pluralistis seperti di Sudan, Pemerintah Sudan menghadapi sebuah tantangan besar dalam mewujudkan entitas sebuah bangsa. Persoalan dalam menetapkan identitas yang dapat memberi legitimasi dan juga mekanisme guna menentukan dan menanggapi kemauan masyarakat juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Islamisasi dan Arabisme merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Sudan dan diduga sebagai aksi *ethnic cleansing* bagi etnis Afrika serta pemeluk animisme yang merupakan *second class citizen* di Sudan. Pemberlakuan Hukum Islam sebagai hukum negara sudah dilakukan sejak Pemerintahan Nimeiry. Pemberlakuan hukum Islam ini kemudian menimbulkan banyak protes yang akhirnya berujung pada pemberontakan, terutama dari penduduk Sudan bagian selatan yang mayoritas Kristen dan Animisme.⁵³

Diskriminasi yang dilakukan pemerintahan Khartoum telah menutup akses ekonomi dan politik bagi warga non-Arab di Sudan bagian selatan. Sudan bagian utara merupakan sentral pembangunan, baik itu ekonomi, politik, pendidikan, serta kesehatan, yang akibatnya banyak daerah di luar Sudan bagian utara yang tertinggal. Tingkat pendidikan dari daerah Sudan bagian utara yang mencapai 67% lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah perkotaan Sudan bagian

⁵² Linnia Arisulistia. 2014. Power Sharing sebagai bagian dari resolusi konflik Comprehensive Peace Agreement di Sudan. Jember: FISIP Universitas Jember. Hlm. 26

⁵³ John Diggle. 2005. *History of The Sudan*. <http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa86>. [2 Oktober 2013]

selatan yang berkisar 54%.⁵⁴ Distribusi sumber daya yang tidak merata telah berimbas pada minimnya tingkat kesejahteraan Sudan bagian selatan. Ketidakkampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta keberpihakan pada etnis tertentu (Arab Muslim) merupakan akar konflik di Sudan. Munculnya keinginan untuk berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka sangat diinginkan oleh penduduk Sudan bagian selatan yang kemudian mendukung berdirinya gerakan separatis, yaitu *Sudan's People Liberation Army* (SPLA).⁵⁵

Marjinalisasi yang terjadi di Sudan tidak terlepas dari peninggalan penjajahan Inggris pada masa lalu. Hal ini kemudian berlanjut saat Sudan memperoleh kemerdekaan dimana ketimpangan terjadi antara *urban area* dan *rural area*. Ketidakseimbangan pemerataan sumber-sumber daya pascakolonial di Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan. Sudan bagian utara yang didominasi oleh etnis Arab mendapat warisan kekuasaan dari pemerintah kolonial dan memegang peranan penting dalam pemerintahan di Sudan. Pada akhirnya mereka mampu menekan wilayah lain yang berpenduduk non-Arab. Selama ini, belum ada pemimpin pemerintahan yang berasal dari wilayah lain selain Sudan bagian utara dan etnis Arab. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-Arab dipaksakan di daerah-daerah yang berpenduduk non-Arab. Sebenarnya hal ini tentu saja sulit untuk diterapkan karena perbedaan etnis, ras, dan budaya. Bahasa Arab juga harus dipelajari oleh sebagian besar anak muda di sekolah dan digunakan sebagai *lingua franca* (bahasa perhubungan) dalam perdagangan dan pemerintahan pusat.⁵⁶

Dominasi etnis tertentu dalam pemerintahan di Sudan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup kelompok marjinal. Dominasi ini juga menyebabkan kebutuhan-kebutuhan kelompok lain terabaikan, dan mengarah pada keinginan pemisahan yang lebih besar. Nasionalisme yang menjadi identitas sosial politik

⁵⁴ Kartika Wulandari. 2011. Implikasi Pemilu Sudan Tahun 2010 Terhadap Legitimasi Pemerintahan Omar Hassan Al-Bashir. Jember: FISIP Universitas Jember. Hlm 30

⁵⁵ Adam Donner. 2005. *Sudan Update: Sudan' People Liberation Army/Movement*. <http://www.sudanupdate.org/WHOSWHO/SPLAM.HTM>. [10 Maret 2013]

⁵⁶ Adiek Sier Abdallah Albaioh. 2011. *Sudan: Society and Culture*. <http://www.sudan.net/society.php>. [10 Maret 2013].

suatu negara dengan politik diskriminatif tidak berasal dari perpaduan antara berbagai paham sosio-kultural dan politik dari seluruh komponen bangsa, melainkan terbentuk dari dominasi paham nasional suatu etnik tertentu.⁵⁷

2.3.2 Kelas Sosial di Sudan

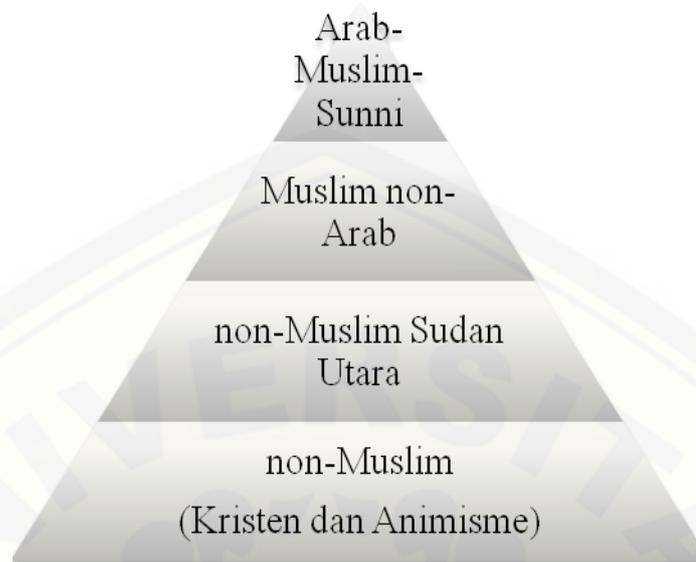
Sudan merupakan profil sebuah negara yang tidak terlepas dari persoalan heterogenitas masyarakatnya dalam menentukan identitas nasional yang terjadi sejak masa kolonialisasi Inggris. Perkembangan ekonomi di Sudan pada era kolonial (1898-1956) terpusat di beberapa wilayah, yakni Khartoum, *Blue Nile*, *White Nile*, bagian selatan Kassala dan Sudan bagian barat. Ketimpangan distribusi ekonomi semacam ini merupakan akibat dari rancangan sistem kolonial yang pada akhirnya mengarah pada ketimpangan pengembangan daerah perkotaan dan pedesaan serta stratifikasi sosial pada masyarakat Sudan.⁵⁸

Sejak Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya, belum ada pemimpin pemerintahan yang berasal dari wilayah lain selain dari Sudan bagian utara dan etnis Arab. Wilayah utara merupakan sentral pembangunan serta pengembangan baik itu sosial-ekonomi maupun politik yang pada umumnya didominasi oleh *upper class* serta dominasi etnis Arab di segala sektor terutama pemerintahan. Sebagai akibatnya, wilayah yang berpenduduk non-Arab juga dipaksa untuk mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-Arab. Hal ini tentu saja sulit untuk diterapkan karena Sudan merupakan negara dengan dua bagian wilayah yang memiliki perbedaan etnis dan budaya.⁵⁹ Masyarakat Sudan menjadikan kasta sebagai kelas sosial. Hal ini menunjukkan jati diri dan kedudukan secara rasial dan agama.

⁵⁷ Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 15

⁵⁸ Saadia L. Malik. 2003. *Exploring Aghani Al-Banat: A Postcolonial Ethnographic Approach To Sudanese Women's Song, Culture, And Performance*. Ohio: Ohio University Press. Hlm. 42

⁵⁹ Arifian Adi Winata. 2012. *Upaya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Sudan Dengan Sudan Selatan*. Yogyakarta: FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Hlm. 2

Gambar 2. Kelas Sosial Dalam Kultur Masyarakat Sudan⁶⁰

Masyarakat Sudan dalam kelas sosial diklasifikasikan dalam 4 kelas, yaitu; kelas pertama ditempati warga Arab-Muslim-Sunni yang kebanyakan tinggal di Khartoum. Kelompok ini yang mengontrol sistem politik dan ekonomi Sudan sejak merdeka.⁶¹ Kelas kedua ditempati oleh warga muslim non-Arab keturunan Afrika yang tinggal di Sudan bagian utara. Kelas ketiga ditempati non-Muslim yang tinggal di Sudan bagian utara. Sedangkan kelas keempat ditempati non-Muslim (Kristen dan Animis) yang menetap di Sudan bagian selatan.⁶²

Perkembangan sosial ekonomi maupun politik pemerintahan serta sentral pembangunan di Sudan pada umumnya didominasi oleh *upper class* etnis Arab Muslim. Pemerintah Sudan menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan entitas sebuah bangsa di tengah masyarakat pluralis. Islamisasi dan Arabisme merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Sudan sebagai aksi *ethnic cleansing* bagi etnis Afrika dan pemeluk animisme yang merupakan *second class citizen* di Sudan. Pemberlakuan hukum Islam ini kemudian menimbulkan banyak protes yang akhirnya berujung pada pemberontakan, terutama dari

⁶⁰ Khalid Mansour. 2006. *Sudan: Unity In Diversity*. <http://www.internationalstudies.ohio.edu/activities-outreach/files/Sudan.pdf>. [3 September 2013]

⁶¹ Saadia L. Malik. *Op.cit.* Hlm. 42

⁶² Khalid Mansour. 2006. *Sudan: Unity In Diversity*. <http://www.internationalstudies.ohio.edu/activities-outreach/files/Sudan.pdf>. [3 September 2013]

penduduk Sudan bagian selatan yang menganut ajaran Kristen dan animisme, dengan gerakan separatis SPLA sebagai salah satu aktor dalam perang sipil kedua di Sudan.

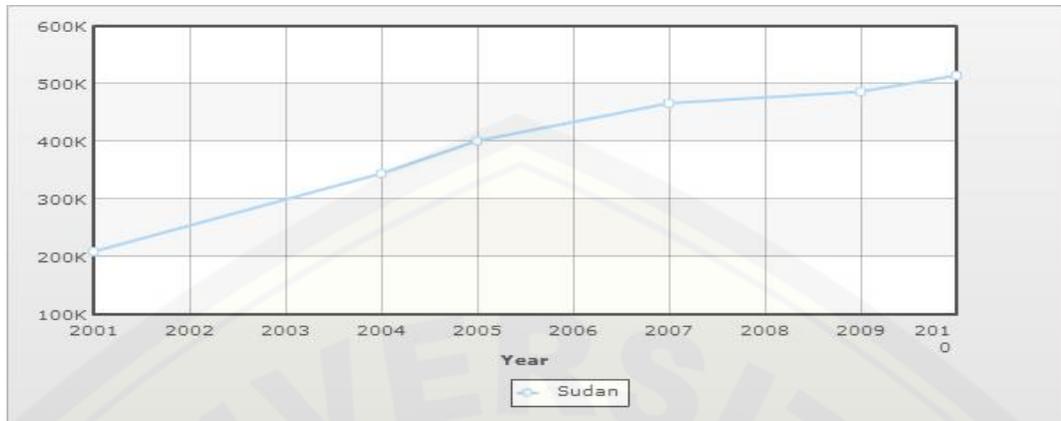
2.4 Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi di Sudan

2.4.1 Industri Minyak Bumi

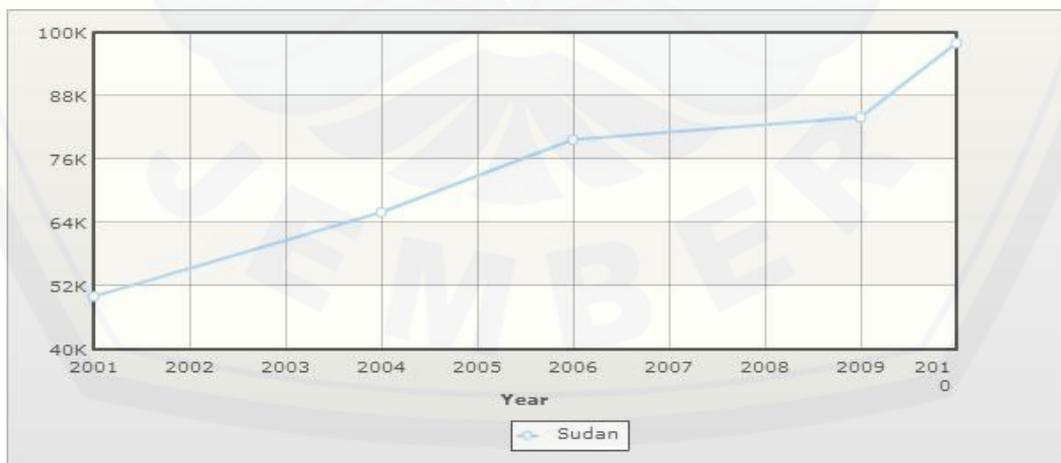
Sudan merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam maupun manusia. Sumber daya utama Sudan yang merupakan penyumbang bagi peningkatan ekonomi negara yakni pertanian dan industri minyak bumi. Sumber minyak bumi banyak ditemukan di bagian tengah dan selatan Sudan. Peninggalan kolonialisasi Inggris yang seringkali memihak pada etnis tertentu, berlanjut hingga Sudan memperoleh kemerdekaan. Wilayah-wilayah di Sudan tetap terjadi ketimpangan antara *urban area* dan *rural area*. Pemerataan sumber-sumber daya pasca kolonial yang tidak seimbang menjadikan etnis Arab Muslim yang mendominasi Sudan bagian utara memegang peran strategis dalam Pemerintahan di Sudan setelah memperoleh warisan kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Inggris.⁶³

Minyak merupakan komoditi utama bagi Sudan dalam aktivitas perekonomian negara. Minyak memegang peranan penting dalam perekonomian Sudan. Eksplorasi minyak bumi dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan menutupi seluruh keperluan energi dan ekonomi masyarakat Sudan. Daerah yang diindikasikan memiliki sumber minyak potensial adalah di daerah kordofan (Sudan bagian selatan) dan propinsi Laut Merah. Menurut data tahun 2001, Sudan memproduksi minyak sekitar 209.100 barel tiap hari dengan jumlah konsumsi minyak sebesar 50.000 barel tiap hari. Peningkatan produksi serta ekspor minyak merupakan tantangan bagi perekonomian Sudan. Namun, dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di Sudan tentu saja pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan dengan komposisi alokasi yang tepat.

⁶³ John Diggle. 2005. *History of The Sudan*. <http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa86>. [2 Oktober 2013]

Grafik 1. Produksi Minyak Sudan Tahun 2001-2010⁶⁴

Berdasarkan grafik 1 diatas, produksi minyak Sudan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, terutama dalam rentang tahun 2001-2010. Pada tahun 2001, produksi minyak Sudan adalah sekitar 209.100 barel/hari. Tahun 2005 produksi minyak Sudan mengalami peningkatan yang pesat, yaitu sekitar 401.300 barel/hari atau hampir dua kali lipat dalam rentang waktu empat tahun. Setelah produksi minyak pada tahun 2005, produksi minyak Sudan tetap meningkat meskipun tidak sepesat tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada grafik diatas, produksi minyak Sudan mencapai titik yang tertinggi, yaitu sekitar 514.300 barel/hari pada tahun 2010.

Grafik 2. Konsumsi Minyak Sudan Tahun 2001-2010⁶⁵

⁶⁴ William Tockman. 2011. *Sudan Oil Production*. <http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=su&v=88>. [7 Oktober 2013]

⁶⁵ *Ibid*

Jumlah konsumsi minyak Sudan dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Berdasarkan grafik 2 diatas, konsumsi minyak Sudan pada tahun 2001 sebesar 50.000 barel/hari. Selanjutnya pada tahun 2006 mengalami kenaikan konsumsi yang lumayan pesat, yaitu sekitar 79.760 barel/hari. Sudan mencapai puncak konsumsi minyak dari data pada grafik diatas yaitu pada tahun 2010 dengan konsumsi minyak yang mencapai 98.000 barel/hari.

Industri minyak di Sudan secara umum memang dikuasai oleh Pemerintah Sudan sendiri, namun secara khusus industri ini hanya dikuasai oleh kelompok Muslim-Arab di Sudan bagian utara. Pada masa pemerintahan Presiden Nimeiry, semakin ditegaskan batas antara Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan, termasuk tempat eksplorasi minyak. Namun setelah ditemukan cadangan minyak dalam jumlah besar di kawasan Bentiu yang berada di wilayah Sudan bagian selatan, Presiden Gaafar Nimeiry berniat mengeksploitasi secara sepihak. Keinginan Presiden Nimeiry jelas menuai rasa tidak suka dari kubu Sudan bagian selatan yang juga ingin mendapatkan keuntungan dari aktivitas pengilangan minyak di kawasan tersebut. Hasil dari industri minyak yang mayoritas didapat dari daerah Sudan bagian selatan sebagian besar difokuskan untuk pembangunan di Sudan bagian utara. Dengan adanya eksploitasi sepihak tersebut, penduduk di Sudan bagian selatan semakin terpuruk karena distribusi hasil minyak bumi yang tidak seimbang dan kurangnya *basic service* yang tidak disediakan oleh Pemerintah Pusat Sudan. Hal ini yang kemudian menuntut Sudan bagian selatan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat Sudan melalui gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army (SPLA)*.⁶⁶

2.4.2 Pertanian

Selain minyak, hasil-hasil pertanian juga merupakan sumber penting dari perekonomian masyarakat Sudan. Seperempat dari setiap pendapatan ekspor dihasilkan dari kapas dan wijen. Selain itu, Sudan juga merupakan negara pengekspor bahan makanan seperti padi-padian, gandum, kacang-kacangan,

⁶⁶ Adam Donner. 2005. *Sudan Update: Sudan's People Liberation Army/Movement*. <http://www.sudanupdate.org/WHOSWHO/SPLAM.HTM>. [10 Maret 2013]

sorghum, ubi, mangga, dan juga jagung ke Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya.⁶⁷ Selama periode tahun 1970-an hingga 2006, hasil pertanian rata-rata dalam GDP mencapai 35%. Pada tahun 2010, sektor pertanian telah menyumbangkan 80% pemasukan negara karena banyak daerah di Sudan yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian.⁶⁸

Daerah di Sudan yang banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian mayoritas yang berada di Sudan bagian selatan yang tanahnya lebih subur, beriklim tropis, dan banyak daerah hijau. Namun demikian, pemasukan yang berasal dari pertanian tersebut hanya difokuskan bagi pemerintahan pusat di Sudan bagian utara, sementara di Sudan bagian selatan dibiarkan terbengkalai. Rasa tidak puas akan ketidakadilan oleh pemerintah pusat di Khartoum ini yang kemudian menjadi salah satu alasan berdirinya gerakan separatis Sudan's People Liberation Army (SPLA) di Sudan bagian selatan.⁶⁹

2.5 Politik dan Pemerintahan di Sudan

2.5.1 Demokrasi dan Kudeta Militer

Sejak didirikannya pemerintahan pusat oleh Pemerintahan Mesir tahun 1820-an, para penguasa di Sudan terus memanfaatkan isu-isu Islam sebagai sebuah cara untuk menarik simpati dari umat Islam, yang merupakan mayoritas di Sudan. Pada gilirannya, legitimasi atas negara pun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bahkan Inggris juga pernah tampil sebagai pelindung Islam dengan bekerjasama dengan para bangsawan Muslim setempat. Sejak Sudan mendapatkan kemerdekaannya tahun 1956, baik rezim militer maupun rezim parlementer

⁶⁷ Kate Spencer. 2006. *Sudan-Agriculture*. <http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Sudan-AGRICULTURE.html>. [15 Oktober 2013]

⁶⁸ Alberto Fernandez. 2007. *U.S. Department of State Background Note-Sudan*. <http://www.factmonster.com/country/profiles/sudan.html>. [15 Oktober 2013]

⁶⁹ Adam Donner. *Op.cit.*

berusaha dengan berbagai cara untuk memanfaatkan tema dan lambang Islam yang setidaknya bisa digunakan sebagai basis legitimasi mereka.⁷⁰

Selama abad ke-20, Pemerintah Sudan tidak banyak berupaya untuk mengakomodir opini publik atau membuka jalan bagi rakyat Sudan untuk berpartisipasi secara aktif dalam urusan kenegaraan. Pada masa ini, belum dirasakan adanya kebutuhan untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak rakyat untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Partisipasi rakyat Sudan dalam bidang politik berkembang di bawah kekuasaan Inggris. Hampir dalam semua tujuan praktis partisipasi ini hanya dirasakan oleh rakyat Sudan bagian utara. Rendahnya antusiasme rakyat Sudan bagian selatan dalam persoalan nasional telah membuat wilayah tersebut semakin terpisah dengan Sudan bagian utara.⁷¹ Negara Sudan diperintah oleh Inggris sejak tahun 1848-1956, ketika pasukan Mahdi yang terakhir dikalahkan oleh angkatan bersenjata Anglo-Mesir.⁷²

Pada tanggal 12 Februari 1953, Mesir dan Inggris menandatangani persetujuan terkait masa depan Sudan dengan pemberian tempo tiga tahun untuk menentukan masa depan dan memilih antara merdeka sendiri atau bergabung dengan Mesir. Adanya kemenangan mutlak terjadi dari partai NUP (National Unionist Party) dengan pemimpinnya yaitu Ismail Azhari yang pro Mesir pada tahun 1953. Ismail Azhari ingin bergabung dengan Mesir, namun seiring berjalannya waktu Azhari menginginkan kemerdekaan bagi Sudan. Maka pada Januari 1954, Azhari diangkat sebagai Perdana Menteri di Sudan hingga mencapai kemerdekaan.⁷³

Pemerintahan awal Sudan sebenarnya merupakan pemerintahan militer. Namun, lambat laun hal ini berubah hingga Sudan meraih kemerdekaannya pada tahun 1956 dan seketika itu mengadopsi gaya pemerintahan *Westminster*. Sistem

⁷⁰ Rafiq Nurri Mahmuda. 2011. Kendala International Criminal Court (ICC) dalam Mengimplementasikan Keputusannya tentang Penangkapan Presiden Sudan Omar Al Bashir tahun 2005-2009. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo. Hlm. 12

⁷¹ Abdul Halim. 2004. Negeri-negeri Muslim yang terjajah. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah. Cetakan I. Hlm. 135

⁷² Billy Wintergreen. 2005. *Sudan Profile: Independence*. <http://www.state.gov/outofdate/bgn/sudan/47181.htm>. [2 Oktober 2013]

⁷³ Richard Gale. 1998. *Sayyid Ismail Al-Azhari*. <http://www.answers.com/topic/ismail-al-azhari>. 3 Oktober 2013].

parlemen semacam ini mengalami kegagalan dan digulingkan tiga kali (lihat dalam tabel) dalam sejarah perjalanan politik pemerintahan di Sudan.⁷⁴

**Tabel 2. Rezim Politik di Sudan Setelah Merdeka Pada Tahun 1956
Sekarang⁷⁵**

Periode	Pemimpin Pemerintahan	Rezim	Partisipasi
1956-1958	Abdullah khalil	<i>Parliamentary-Democratic</i>	<i>Multi-party Bicameral Parliament</i>
1958-1964	Jend Ibrahim Abboud	<i>Military</i>	<i>No parties Single Chambers Assembly</i>
1964-1965	Al-Khatim al-Khalifa	<i>Transitional Government</i>	<i>No parties Single Chambers Assembly</i>
1965-1969	Ismail Azhari	<i>Parliamentary-Democratic</i>	<i>Multi-party Single Chambers Parliament</i>
1969-1985	Jend Ja'far Nimeiry	<i>Military</i>	<i>One Party Single Chambers Assembly</i>
1985-1986	Jend Al-Dahab	<i>Military</i>	<i>No parties Single Chambers Assembly</i>
1986-1989	Ahmed al-Mirghani & Sadiq Al-Mahdi	<i>Parliamentary-Democratic</i>	<i>Multi-party Single Chambers Parliament</i>

⁷⁴ Richard Gale. 1998. *Al-Azhari Advocated A British Parliamentary Form Of Government*. <http://www.answers.com/topic/ismail-al-azhari>. [2 Oktober 2013].

⁷⁵ Ben Cahoon. 2005. *The Sudan*. <http://www.worldstatesmen.org/Sudan.html>. [5 Oktober 2013]

Periode	Pemimpin Pemerintahan	Rezim	Partisipasi
1989 - sekarang	Omar Bashir	<i>Military-Civilian</i>	<i>One Party Single Chambers Assembly</i>

Setelah Sudan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956, Azhari kehilangan mayoritas anggotanya di Parlemen karena anggota partai NUP yang pro Mesir memisahkan diri dan mengadakan koalisi dengan partai Ummah pimpinan Abdul Khalil yang berhaluan Islam moderat.⁷⁶ Khalil menjadi Perdana Menteri kedua Sudan, hingga terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ibrahim Abboud pada tanggal 17 November 1958, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Presiden Sudan.⁷⁷ Pemerintahan Abboud hanya berlangsung selama enam tahun, karena dalam pemerintahannya terjadi kekacauan situasi ekonomi yang memburuk dan masalah Sudan bagian selatan⁷⁸, sehingga pada tahun 1964 Abboud harus berhenti dari jabatannya dan menyerahkan kekuasaan kepada *United National Front* (UNF) pimpinan Al-Khatim Al-Khalifa yang kemudian menjadi presiden transisi Sudan selama satu tahun.⁷⁹

Pada tahun 1965 diadakan pemilu di Sudan untuk mengganti pemerintahan transisi. Pemilu ini menghasilkan partai *National Unionist Party* (NUP) dengan Ismail Azhari sebagai presiden baru di Sudan.⁸⁰ Kepemimpinan Ismail Azhari di Sudan hanya berlangsung selama empat tahun. Pada tanggal 25 Mei 1969

⁷⁶ Dodi Utama Putra. 2009. Konsep Syari'ah Dan Implikasinya Terhadap Masalah HAM (Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad 'Abid Al-Jabiri Dan Abdullah Ahmed An Naim). Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hlm. 76

⁷⁷ Mark Scheffer. 1983. *Ibrahim Abboud Was Sudan's Leader From 1958 to 1964*. <http://www.nytimes.com/1983/09/09/obituaries/ibrahim-abboud-82-was-sudan-s-leader-from-1958-to-1964.html>. [3 Oktober 2013]

⁷⁸ Gerakan separatis pertama di Sudan muncul pada tahun 1955 dengan *Anya Nya* dan *South Sudan Liberation Movement* (SSLM) yang menjadi aktor gerakan separatis dari Sudan bagian selatan.

⁷⁹ Jean Loring. 2006. *Sir Al-Khatim Al-Khalifa: Transition President Of Sudan*. <http://www.spokeo.com/Sirr+Al+Khatim+Al+Khalifa+1>. [4 Oktober 2013]

⁸⁰ Richard Gale. 1998. *Ismail Azhari: President Of Sudan From 1965 To 1969*. <http://www.answers.com/topic/ismail-al-azhari>. [4 Oktober 2013]

kelompok tentara dibawah pimpinan Jenderal Gaafar Nimeiry mengadakan kudeta terhadap pemerintahan Azhari dan menjadi Presiden Sudan selama 16 tahun.⁸¹

Dalam masa pemerintahan Nimeiry, Sudan kembali pada era militer. Kepemimpinan otoriter ala Nimeiry terlihat dari beberapa kebijakannya yang justru semakin memperbesar jurang perpecahan di Sudan. Program Islamisasi yang dibawa Nimeiry berdampak luar biasa bagi Sudan dan lebih memecah belah daripada membawa persatuan rakyatnya. Akibatnya terjadi ketegangan yang luar biasa antara penduduk Muslim dan non-Muslim. Terjadi perang saudara antara penduduk Sudan bagian selatan yang mayoritas non-Muslim dengan penduduk Sudan bagian utara yang mayoritas Muslim. Penduduk Sudan bagian selatan akhirnya membentuk sebuah gerakan separatis dengan nama *Anya Nya* Pimpinan Joseph Lagu dengan *South Sudan Liberation Movement* (SSLM) sebagai sayap politiknya untuk melawan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat Sudan.⁸²

Penduduk Sudan bagian selatan telah melakukan pemberontakan bersenjata sebagai akibat dari Islamisasi yang dilakukan oleh Gaafar Nimeiry. Hal ini tentu saja menambah rumit suasana, karena selain masalah agama, masalah sudah ditarik ke persoalan politik. Perang saudara tersebut berlangsung selama 17 tahun, sebelum akhirnya muncul kesepakatan Addis Ababa tahun 1972 yang memberikan otonomi warga Sudan bagian selatan dan menjamin hak-hak mereka dalam konstitusi 1973.⁸³

Pada tahun 1983, *Addis Ababa Accord* (AAA) yang merupakan perjanjian antara Pemerintah Sudan dengan pihak pemberontak *Anya Nya* telah dilanggar oleh Nimeiry. Isi perjanjian yang semula memberikan otonomi seluas-luasnya bagi Sudan bagian selatan telah diingkari oleh Nimeiry. Secara mengejutkan, pada tahun 1983, Nimeiry juga mengumumkan pemberlakuan Syariat Islam dan

⁸¹ Robert Queen. 2009. *Gaafar al-Nimeiry: Survived As Ruler Of Sudan For 16 Years*. <http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/politics-obituaries/5431188/Gaafar-al-Nimeiry.html>. [4 Oktober 2013]

⁸² Alistair Boddy-Evans. 2006. *Anya Nya*. <http://africanhistory.about.com/od/glossarya2/g/Anya-Nya.htm>. [5 Mei 2013]

⁸³ Marzuki Wahid & Rumadi. 2001. *Fiqh Mazhab Negara*. Yogyakarta: LKiS. Hlm 95.

melakukan gerakan Islamisasi di seluruh wilayah Sudan.⁸⁴ Hukum Islam menjadi hukum formal di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk di Sudan bagian selatan. Rakyat Sudan bagian selatan langsung menolak kebijakan Nimeiry. Pimpinan Sudan bagian selatan juga mengungkit perlakuan tidak adil yang dialami Sudan bagian selatan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pada saat itu pula, dideklarasikan pendirian kelompok bersenjata bernama *Sudan People's Liberation Army* (SPLA; Tentara Pembebasan Rakyat Sudan) pada tahun 1983, dengan kelompok *Sudan People's Liberation Movement* (SPLM; Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan) sebagai sayap politiknya yang dipimpin oleh John Garang untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat Sudan.⁸⁵

Keputusan Nimeiry untuk memberlakukan syariat Islam yang memicu munculnya gerakan separatis SPLA telah menjadi *boomerang*⁸⁶ bagi Nimeiry sendiri karena merusak citra baiknya di dalam maupun di luar negeri. Setelah dua tahun sejak diberlakukannya syariat Islam, Nimeiry digulingkan melalui kudeta militer oleh Jenderal Al-Dahab.⁸⁷ Jenderal Al-Dahab memerintah Sudan dari tahun 1985-1986. Pemerintahan Jenderal Al-Dahab bertujuan untuk menetralkan suasana yang kisruh sejak pemerintahan Nimeiry memaksakan diberlakukannya Syariat Islam secara nasional.

Periode ketiga sistem politik parlementer Sudan kemudian diawali saat pemilu tahun 1986 dimana Partai Ummah dan *Democratic Unionist Party* (DUP) pimpinan Ahmed Al-Mirghani meraih kemenangan dengan 70% suara. Kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Jenderal Al-Dahab akhirnya diserahkan pada pemerintahan koalisi yang baru. Pemilu ini mengantarkan Sadiq Al-Mahdi (berperan sebagai Perdana Menteri) dan Ahmed Al-Mirghani (berperan

⁸⁴ Dennis Hevesi. 2009. *Gaafar Nimeiry: Impose Islamic Law On All Of Sudan*. http://www.nytimes.com/2009/06/12/world/africa/12nimeiry.html?_r=0. [5 Oktober 2013]

⁸⁵ Citra Graha. 2011. Menanti Nama Sebuah Negara Di Sudan Selatan. <http://www.suarapembaruan.com/home/menanti-nama-sebuah-negara-di-sudan-selatan/2601>. [15 Maret 2013]

⁸⁶ Merusak nama baik Nimeiry di mata Internasional karena tidak bisa memimpin masyarakat yang heterogen dengan adil di negaranya, yaitu dengan pemaksaan penerapan Hukum Syariat Islam bagi seluruh wilayah Sudan.

⁸⁷ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabea. 2004. *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet. Hlm. 116-117.

sebagai Presiden), memimpin Sudan dari tahun 1986-1989.⁸⁸ Dengan mengungkap gaya politik lama, pemerintahan ini tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya juga disusupi oleh gaya sektarian.

Pada tahun 1989, dinamika lama yang diwarnai pergantian koalisi dan persaingan mulai berlangsung kembali. Tingkat kekerasan dalam perang saudara semakin besar, begitu juga buruknya kondisi ekonomi dan kesadaran akan stabilitas pemerintahan yang semakin lemah. Pada akhirnya, di tahun yang sama, pemerintahan koalisi Sadiq Al-Mahdi dan Ahmed Al-Mirghani dikudeta oleh militer dibawah pimpinan Jenderal Omar Hassan Al-Bashir. Kondisi ini kemudian mengantarkan Omar Bashir sebagai presiden Republik Sudan yang baru hingga saat ini.⁸⁹

2.5.2 Sudan Masa Pemerintahan Omar Hasan Al-Bashir

Republik Sudan dalam sejarah pergantian pemimpin hanya mengenyam era demokratis selama 3 kali. Kekuasaan pemimpin Sudan yang dipilih secara demokratis berlangsung secara singkat karena kudeta militer yang kemudian mengarahkan Sudan pada sistem otoritarian. Rezim demokratis terakhir adalah kepemimpinan Perdana Menteri Sadiq Al-Mahdi, yang kemudian dikudeta oleh militer dibawah komando Jenderal Omar Hasan Al-Bashir. Tingkat kekerasan dalam perang saudara yang semakin besar, buruknya kondisi ekonomi, dan kesadaran terhadap stabilitas pemerintah yang semakin lemah, merupakan hal-hal yang menjadi alasan kudeta oleh Bashir agar dia mampu memegang kendali kekuasaan. Setelah Presiden Bashir berkuasa, hal pertama yang dilakukan adalah mendapat pengakuan serta legitimasi bagi pemerintahannya. Secara historis, basis legitimasi bagi pemimpin Sudan selama ini adalah nilai-nilai sektarian. Setelah Nimeiry berkuasa, Arabisme dan Islamisme menjadi basis legitimasi bagi pemimpin yang berkuasa di Sudan. Hal yang sama juga berlaku pada masa

⁸⁸ Agence France-Presse. 2008. *Coalition Government Between Umma Party and Democratic Unionist Party*. <http://www.nytimes.com/2008/11/05/world/africa/05mirghani.html? r=0>. [13 Oktober 2013]

⁸⁹ Kenneth Ingham. 2006. *Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*. <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/54890/Omar-Hassan-Ahmad-al-Bashir>. [3 Oktober 2013]

pemerintahan Presiden Omar Hasan Al-Bashir. Selain itu, dalam usaha membangun legitimasinya, Bashir menjanjikan untuk memberikan kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dalam perjalanan pemerintahannya.⁹⁰ Walaupun pada kenyataannya, hal itu tidak terjadi di daerah Sudan bagian selatan. Kesenjangan antara Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan bisa mengarahkan Sudan ke dalam jurang konflik yang lebih besar.

Jenderal Omar Hasan Al-Bashir sebagai penguasa Sudan setelah melakukan kudeta terhadap koalisi Ahmed Al-Mirghani dan Sadiq Al-Mahdi telah membawa Sudan ke dalam era rezim militer yang sangat represif. Upaya penyelesaian konflik di Sudan bagian selatan setelah Bashir berkuasa pun banyak mengalami jalan buntu. Faktanya adalah rezim yang dibangun oleh Bashir justru membuat konflik di Sudan bagian selatan semakin mengarah pada pemisahan dan SPLA justru menjadi kelompok pemberontak yang sangat terorganisir. Bukan hanya persoalan konflik internal yang melanda Sudan. Namun, pemerintahan Bashir juga harus menghadapi sederet krisis dalam tubuh parlemen akibat koalisi dari kelompok-kelompok oposisi yang menghendaki kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, terlepas dari *background* etnis, suku, maupun agama. Pada masa kepemimpinan Bashir, pemerintahan militer membekukan sejumlah partai politik dan mengenakan Undang-Undang Syariah di level nasional. Omar Bashir akhirnya memimpin Majelis Komando Revolusi untuk Keutuhan Nasional (sebuah lembaga yang terdiri dari Legislatif dan Eksekutif). Selanjutnya, Omar Bashir juga memegang kepemimpinan dalam pemerintahan sebagai kepala negara, perdana menteri, kepala militer, dan menteri pertahanan.⁹¹

⁹⁰ Kartika Wulandari. 2011. Implikasi Pemilu Sudan Tahun 2010 Terhadap Legitimasi Pemerintahan Omar Hassan Al-Bashir. Jember: FISIP Universitas Jember. Hlm 56

⁹¹ Alan Cowell. 1989. *Military Coup In Sudan Ousts Civilian Regime*. <http://www.nytimes.com/1989/07/01/world/military-coup-in-sudan-ousts-civilian-regime.html>. [5 Oktober 2013]

BAB 3. GERAKAN SEPARATIS SUDAN'S PEOPLE LIBERATION ARMY (SPLA)

3.1 Sejarah Berdirinya Gerakan Separatis Sudan's People Liberation Army (SPLA)

Mayoritas konflik intra negara seringkali dapat ditemukan di berbagai negara di Afrika (seperti Kongo, Sierra Leone, Somalia, dan Rwanda). Konflik intra negara ini tidak hanya sebatas perpecahan pada kesatuan rakyat dalam sebuah negara. Tetapi juga cenderung mengarah ke perang saudara atau konflik etnis/internal yang dilatarbelakangi oleh persaingan atau perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat (SARA). Perang saudara atau konflik internal juga biasa terjadi akibat perbedaan paham antar kedua belah pihak yang tidak mampu hidup harmonis dalam sebuah negara.⁹²

Sudan adalah negara terbesar di Afrika yang berada di sebelah utara benua tersebut. Negara Sudan merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1956. Pertikaian etnis yang menghasilkan perang saudara dan konflik internal juga terjadi di Sudan, karena negara tersebut didominasi oleh dua kelompok besar masyarakat, yaitu Arab dan Afrika. Sudan juga memiliki jumlah suku yang tidak kurang dari 400 suku dengan bahasa yang berbeda satu sama lain. Sudan menganut sistem pemerintahan federal, oleh karena itu seluruh suku ini berbaur di dua puluh enam negara bagian yang mempunyai otonomi yang cukup besar.⁹³

Sudan terbagi dalam dua bagian, yaitu Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan. Sudan bagian utara dihuni oleh ras Arab, berdarah dan berbahasa Arab, dan yang non-Arab (suku Nubia) tetapi memeluk agama Islam dan dekat dengan ras Arab karena kesamaan akidah, serta bahasa sehari-hari. Sedangkan di Sudan bagian selatan, terdapat berbagai suku dari berbagai ras. Mereka mengaku sebagai penduduk asli Sudan dan Afrika, yang terdiri dari suku-suku Dinka, Nuer, Shilluk, Azande, dan Bari. Mayoritas dari masyarakat Sudan bagian selatan

⁹² Arifian Adi Winata. 2012. Upaya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Sudan Dengan Sudan Selatan. Yogyakarta: FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Hlm. 11

⁹³ John Diggle. 2005. *History Of The Sudan*. <http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa86>. [15 April 2013]

memeluk Agama Kristen dan sebagian kecil tetap mempertahankan agama tradisi Afrika (Animisme).⁹⁴ Dominasi Sudan bagian utara yang Muslim Arab (kecuali Muslim Nubia) terhadap Sudan bagian selatan yang non-Muslim, nyaris tidak pernah berhenti menyulut perlawanan dan pemberontakan bersenjata dari Sudan bagian selatan, yang sekaligus menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan pusat.⁹⁵ Maka sejak merdeka tahun 1956, Sudan telah mengalami berkali-kali pergolakan, sebagai dampak dari kemelut antar kelompok yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.

Kemerdekaan Sudan pada tahun 1956 memberikan harapan besar bagi rakyat Sudan bagian selatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dari segi pendidikan, politik, ekonomi, dan perkembangan yang merata. Tidak hanya berfokus di daerah Sudan bagian utara. Namun, kemerdekaan menjadi ajang memperlebar jarak perkembangan antar kedua wilayah tersebut. Sudan bagian utara meneruskan kebijakan yang sebelumnya diaplikasikan oleh penjajahan dari Inggris. Pemerintahan pusat terus menerus mengaplikasikan program perkembangan ekonomi regional tidak merata, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak memberikan kesempatan kepada Sudan bagian selatan untuk berkembang. Harapan Sudan bagian selatan untuk mengembangkan wilayah, serta membentuk negara persatuan yang lebih baik ternyata telah memperburuk keadaan dan mempebesar diskriminasi tersebut.

Keadaan Sudan terbilang kacau karena perang sipil yang berlarut-larut selama sisa abad ke-20. Konflik tersebut berakar pada keadaan ekonomi, politik, dan dominasi sosial yang besar terhadap masyarakat non-Muslim dan non-Arab di Sudan bagian selatan. Masyarakat yang merasa tertindas, terutama dalam hal kebebasan agama, dan kesempatan dalam kontribusi ekonomi negara yang tidak merata telah menyebabkan perang sipil selama dua periode di Sudan. Perang sipil pertama dimotori oleh *Anya Nya* dan *South Sudan Liberation Movement (SSLM)* dimulai pada tahun 1955 dan berakhir pada tahun 1972 yang ditandai dengan

⁹⁴ Ahmad Priambodo. 2011. Kebijakan Luar Negeri Sudan Terhadap Ketidakstabilan Politik di Sudan. <http://dc341.4shared.com/doc/7y2orYyD/preview.html>. [2 Februari 2013]

⁹⁵ John Pike. 2000. *Sudan Civil War*. <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan.htm>. [5 Februari 2013]

perjanjian Addis Ababa tanggal 27 Maret 1972.⁹⁶ Fase damai dari perjanjian Addis Ababa berakhir saat Perang Sipil kedua meletus pada tahun 1983 ketika *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat Sudan. Perang sipil kedua ini berakhir pada tahun 2005 yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan damai dalam perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) di Naivasha, Kenya.⁹⁷

TABEL 3. GERAKAN SEPARATIS DI SUDAN

No.	Perang Sipil	Tahun Konflik	Pihak Yang Bertikai	Resolusi Konflik
1.	Pertama	1955-1972	Pemerintah Sudan vs <i>Anyanya</i> dan <i>South Sudan Liberation Movement</i> (SSLM)	Penandatanganan perjanjian damai <i>Addis Ababa Accord</i> di Ethiopia pada tanggal 27 Maret 1972 yang diwakili oleh Joseph Lagu (SSLM) dan Gaafar Nimeiry (Sudan).
2.	Kedua	1983-2005	Pemerintah Sudan vs <i>Sudan's People Liberation Army</i> (SPLA)	Penandatanganan perjanjian damai <i>Comprehensive Peace Agreement</i> (CPA) di Naivasha, Kenya pada tanggal 9 Januari 2005 yang diwakili oleh Omar Al-Bashir (Sudan) dan John Garang (SPLA).

⁹⁶ Alistair Boddy-Evans. 2006. *1972, Addis Ababa Agreement (for The Sudan)*. <http://africanhistory.about.com/od/glossarya2/g/1972-Addis-Ababa-Agreement.htm>. [5 Agustus 2013]

⁹⁷ Roba Gibia. 2008. *Feature: Naivasha agreement was imposed on the Sudan*. <http://www.sudantribune.com/spip.php?article26444>. [17 Agustus 2013]

Berakhirnya perang sipil pertama yang dimotori oleh gerakan separatis *Anya Nya* (melawan pemerintah pusat di Sudan bagian utara dari tahun 1955-1972) pimpinan Joseph Lagu telah menghasilkan perjanjian damai Addis Ababa di Ethiopia pada tahun 1972. Kondisi negara Sudan setelah perjanjian damai secara perlahan mulai kembali kondusif. Wilayah Sudan bagian selatan juga mulai mendapatkan sejumlah kebebasan dan kelonggaran yang selama ini tidak mereka dapat saat perang sipil pertama masih berlangsung. Momen penandatanganan Perjanjian Addis Ababa pada tanggal 27 Maret 1972 juga sempat diperingati sebagai hari raya nasional dengan nama “Hari Persatuan Nasional”.⁹⁸

Perjanjian Addis Ababa memberikan harapan kepada rakyat Sudan bagian selatan tentang perdamaian dan perkembangan sosio-ekonomi daerah pada saat itu. Namun, krisis politik yang terjadi di pemerintahan Sudan sebagai akibat dari perbedaan etnis, agama, dan dominasi oleh Sudan bagian utara terhadap Sudan bagian selatan masih tetap saja mengganggu bagi perdamaian yang tengah berlangsung di negara tersebut. Artinya, perdamaian yang terjadi di Sudan diprediksi tidak berlangsung lama. Tanda-tanda bahwa konflik sipil kembali timbul bisa diprediksi ketika pada tahun 1978 ditemukan cadangan minyak dalam jumlah besar di kawasan Bentiu yang berada di wilayah Sudan bagian selatan. Penemuan cadangan minyak dalam jumlah besar itu telah menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi secara sepihak oleh Presiden Gaafar Nimeiry untuk pembangunan Sudan bagian utara. Pihak Sudan bagian selatan yang juga menginginkan keuntungan dari aktivitas pengilangan minyak di kawasan tersebut jelas tidak menerima kebijakan Nimeiry.⁹⁹

Kontroversi yang terjadi selama fase damai sementara di Sudan belum berhenti sampai di situ (eksploitasi minyak secara sepihak oleh pemerintah pusat Sudan di kawasan Bentiu yang berada di wilayah Sudan bagian selatan). Pasca disahkannya Perjanjian Addis Ababa 1972, banyak pihak di Sudan bagian utara yang sebenarnya tidak puas terhadap perjanjian tersebut. Seiring waktu, pihak-pihak yang menentang Perjanjian Addis Ababa berhasil mendapatkan posisi yang

⁹⁸ Alistair Boddy-Evans. *Op.cit.*

⁹⁹ Steven Aftergood. 2000. *Sudan's People Liberation Army/Movement*. <http://www.fas.org/irp/world/para/spla.htm>. [5Juli 2013]

semakin kuat dalam tubuh pemerintahan pusat Sudan. Hasilnya, pihak-pihak yang menentang Perjanjian Addis Ababa mulai menekan Presiden Nimeiry untuk mengabaikan hasil perjanjian tersebut dan menjalankan Hukum Islam secara sepihak ke seluruh wilayah Sudan tanpa terkecuali.¹⁰⁰

Pada tahun 1983, Presiden Nimeiri akhirnya melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan perjanjian Addis Ababa yang sebelumnya telah memberikan otonomi atas wilayah Sudan bagian selatan. Penyimpangan perjanjian yang paling tampak adalah ketika penetapan peraturan berbasiskan Hukum Syariah Islam sebagai peraturan nasional diterapkan bagi seluruh wilayah Sudan.¹⁰¹ Keputusan Presiden Nimeiry tersebut tidak hanya menuai kontroversi dari kubu Sudan bagian selatan yang hanya memiliki minoritas pemeluk Islam di wilayahnya, tetapi juga dari sesama penganut Islam di Sudan bagian utara.¹⁰² Pada tahun yang sama, kubu Sudan bagian selatan di bawah pimpinan Kolonel John Garang da Mabior mendirikan kelompok bersenjata baru yang bernama *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) atau Tentara pembebasan Rakyat Sudan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi dari Pemerintah Pusat Sudan di Khartoum.¹⁰³

Berdirinya *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) di Sudan bagian selatan telah memicu terjadinya perang saudara kedua di Sudan. John Garang mengklaim bahwa kebijakan kontroversial Nimeiry yang telah memicu perpecahan di Sudan. Garang sebagai pimpinan SPLA juga mengungkit perlakuan tidak adil yang terus dialami Sudan bagian selatan di bidang ekonomi, sosial, dan politik.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Dennis Hevesi. 2009. *Gaafar Nimeiry: Impose Islamic Law On All Of Sudan*. http://www.nytimes.com/2009/06/12/world/africa/12nimeiry.html?_r=0. [5 Oktober 2013]

¹⁰¹ Peter Woodward. 1990. *Sudan 1898-1989: The Unstable State*. Colorado: Lynne Rienner Publishers. Hlm.123

¹⁰² Denny Jati. 2013. *Mahmoud Mohammed Taha*. http://inspirasi.co/ensiklopedia_inspirasi/summary/910. [29 Oktober 2014]

¹⁰³ Jeffrey Morgan. 2007. *Sudan's People Liberation Army/Movement (SPLA/M)*. <http://www.sudantribune.com/spip.php?mot183>. [3 Juni 2013]

¹⁰⁴ Egidius Patnistik. 2011. *Dampak Penolakan Negara Pada Pluralisme*. <http://internasional.kompas.com/read/2011/01/11/07230187/Dampak.Penolakan.Negara.pada.Pluralisme-5>. [15 November 2013]

3.2 Pemimpin Gerakan Separatis Sudan's People Liberation Army (SPLA)

3.2.1 John Garang

Kolonel John Garang de Mabior adalah seorang pemimpin pemberontak Sudan, pendiri gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) atau Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (Dari Sudan bagian selatan). Gerakan separatis SPLA ini adalah gerakan yang terlibat perang saudara selama 22 tahun melawan pemerintahan pusat di utara (Khartoum) yang didominasi oleh Islam. John Garang dilahirkan dari kelompok etnis Dinka pada tanggal 23 Juni 1945 di Wangkulei, Anglo-Egyptian Sudan (sekarang masuk dalam wilayah negara Sudan).¹⁰⁵

John Garang menempuh pendidikannya di Tanzania dan melanjutkan ke perguruan tinggi melalui beasiswa di Grinnell College, Iowa. Setelah lulus pada tahun 1969, Garang kembali ke Sudan dan bergabung dengan tentara nasional Sudan, tetapi pada tahun berikutnya bergabung dengan pemberontak *Anya Nya*. *Anya Nya* adalah gerakan separatis yang dipimpin oleh Joseph Lagu, sebuah kelompok pemberontak sebelum SPLA yang juga berjuang untuk hak-hak Sudan bagian selatan.¹⁰⁶ *Anya Nya* merupakan kelompok pemberontak yang berusaha melawan pemerintah pusat Sudan yang pada saat itu dikuasai oleh warga Sudan bagian utara. Gerakan pemberontakan ini dipicu oleh keputusan yang dibuat oleh kolonial Inggris yang telah menggabungkan dua bagian dari Sudan ketika kemerdekaan diberikan pada tahun 1956. Penggabungan tersebut menyebabkan diskriminasi oleh Sudan bagian utara yang mayoritas Islam terhadap Sudan bagian selatan yang mayoritas Kristen dan animisme. Dominasi oleh Islam yang bertempat di Sudan bagian utara ini yang kemudian menjadi alasan berdirinya gerakan separatis *Anya Nya* di Sudan bagian selatan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Derrick Lang. 2010. *John Garang*. <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/225584/John-Garang>. [7 November 2103]

¹⁰⁶ Alistair Boddy-Evans. 2006. *Joseph Lagu: Founder and Leader of the Sudanese Rebel Group Anya Nya*. <http://africanhistory.about.com/od/biography/a/Bio-Joseph-Lagu.htm>. [12 November 2013]

¹⁰⁷ Alistair Boddy-Evans. 2006. *Anya Nya*. <http://africanhistory.about.com/od/glossary2/g/Anya-Nya.htm>. [5 November 2013]

Terlepas dari masih berjalannya konflik antara Pemerintah Sudan dan gerakan separatis Anya Nya, pembicaraan damai untuk mengakhiri perang sipil juga telah berjalan pada saat itu. Melalui perjanjian damai yang difasilitasi oleh Kaisar Ethiopia, Haile selassie pada tahun 1972, presiden Sudan Gaafar Nimeiry dan Joseph Lagu, pemimpin Anya Nya, menandatangani Perjanjian Addis Ababa yang memberikan otonomi di Sudan bagian selatan. Para pemberontak, termasuk John Garang dimasukkan ke dalam tentara militer Pemerintah Sudan. Garang dipromosikan menjadi Kolonel dan dikirim ke Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat, untuk menempuh pelatihan militer. Garang juga menerima gelar doktor ekonomi pertanian dari Iowa State University pada tahun 1981. Setelah kembali ke Sudan, Garang diangkat menjadi wakil direktur penelitian militer dan komandan batalion infanteri.

Pemerintah Sudan juga berusaha menjadi sebuah negara Arab Islam dengan menerapkan hukum Syariah di seluruh Sudan dan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Sudan Pada tahun 1983. Munculnya peraturan ini tentu saja membuat warga Sudan bagian selatan tidak menyetujuinya karena mayoritas kepercayaan mereka bukan Agama Islam. Kebijakan pemerintah ini telah menyulut pemberontakan baru dari warga Sudan bagian selatan yang menginginkan otonomi khusus sesuai perjanjian Addis Ababa. Pada tahun tersebut, Letnan Kolonel John Garang (yang saat itu masih bergabung dengan tentara nasional Sudan) dari Tentara Nasional Sudan atau yang dikenal dengan *Sudanese People Armed Force* (SPAF) dikirim untuk memadamkan pemberontakan di kota Bor (sekarang ibukota negara bagian Jonglei di Sudan Selatan). Pemberontakan ini berasal dari 500 pasukan Sudan bagian selatan bekas pemberontak Anya Nya yang menolak perintah untuk bergabung dengan tentara Sudan bagian utara. Setelah tiba di kota Bor, Garang memilih untuk menolak mengakhiri pemberontakan. Garang yang juga bekas pemberontak Anya Nya justru membelot dan mendorong pemberontakan dari daerah lain di Sudan bagian selatan.¹⁰⁸ Akhirnya, pada tahun yang sama Garang membentuk sebuah Gerakan

¹⁰⁸ Asep Syamsul M. Romli, S.IP. 2000. *Demonologi Islam: upaya barat membasmi kekuatan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 109

separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) atau Tentara pembebasan Rakyat Sudan di Sudan bagian selatan, dan menempatkan dirinya sebagai kepala pemberontakan terhadap Pemerintahan Pusat Sudan. Gerakan separatis SPLA ini bertujuan untuk memisahkan Sudan bagian selatan dari Pemerintah Pusat Sudan yang dikuasai oleh Arab-Muslim.¹⁰⁹

Demi mendapat sejumlah pasukan tambahan yang mencukupi untuk melakukan serangan terhadap pemerintah pusat Sudan, SPLA bentukan John Garang berusaha menarik perhatian massa dengan cara membuat daftar keluhan. Daftar keluhan ini terdiri dari kegagalan pemerintah pusat Sudan dan perjanjian Addis Ababa dalam menyikapi berbagai permasalahan. Dari permasalahan tersebut, SPLA berharap dapat menambah aliansi untuk menghadapi perang. Selain itu, SPLA berharap bahwa aliansi yang nantinya tergabung bisa dipersatukan dalam satu komando berdasarkan kesamaan kepentingan dalam menyikapi pertentangan dengan pemerintah pusat Sudan. Hal ini sangat penting karena sejumlah etnis yang kemungkinan akan bergabung sangat beragam.¹¹⁰

Lepas dari semakin kompleksnya perang sipil kedua di Sudan, upaya-upaya untuk mendamaikan pihak yang terlibat terus dilakukan. Pada bulan Januari tahun 2002 John Garang memulai pembicaraan perdamaian dengan Presiden Sudan Omar Bashir, yang kemudian mencapai kesepakatan final dalam penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif atau *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) pada 9 Januari 2005.¹¹¹ Sebagai bagian dari perjanjian tersebut Garang diangkat sebagai wakil presiden I di Sudan, sekaligus Presiden wilayah otonomi Sudan bagian selatan. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 30 Juli 2005, sebuah helikopter yang membawa Garang kembali dari sebuah pertemuan dengan Presiden Uganda jatuh di pegunungan dekat perbatasan. Kecelakaan yang menewaskan John Garang telah membuat hubungan Pemerintah

¹⁰⁹ Steven Aftergood. 2000. *Sudan's People Liberation Army*. <http://www.fas.org/irp/world/para/spla.htm>. [15 Agustus 2013]

¹¹⁰ Linnia Arisulistia. 2014. Power Sharing sebagai bagian dari resolusi konflik Comprehensive Peace Agreement di Sudan. Jember: FISIP Universitas Jember. Hlm. 48

¹¹¹ Alistair Boddy-Evans. 2006. *Comprehensive Peace Agreement of 2005 – Sudan*. <http://africanhistory.about.com/od/glossary/c/Comprehensive-Peace-Agreement-Of-2005.htm>. [5 Agustus 2013]

Sudan dan SPLA sedikit kembali merenggang karena pihak SPLA menuduh pemerintah pusat Sudan sebagai aktor dalam tewasnya John Garang.¹¹²

3.2.2 Salva Kiir Mayardit

Salva Kiir Mayardit adalah orang kepercayaan John Garang yang lahir pada tanggal 13 September 1951 di wilayah Akon, Sudan (sekarang termasuk dalam wilayah Sudan Selatan). Pada tahun 1960, selama terjadinya perang sipil pertama (1955-1972), Kiir bergabung dengan *Anya Nya* (sama seperti John Garang), gerakan separatis pimpinan Joseph Lagu dari Sudan bagian selatan dalam memerangi dominasi pemerintahan Sudan bagian utara. Setelah pertempuran berakhir dengan perjanjian damai Addis Ababa pada tahun 1972, Kiir dimasukkan dalam tentara nasional Pemerintah Sudan dan akhirnya mencapai pangkat Letnan Kolonel.

Ketika bibit pemberontakan mulai muncul akibat dari penetapan Hukum Syariah sebagai Hukum Nasional Sudan oleh rezim Nimeiry Pada tahun 1983, maka Kiir dan Kolonel John Garang de Mabior, membelot dari tentara Pemerintahan Sudan. Bersama dengan Garang, Kiir membantu pembentukan gerakan separatis Tentara Pembebasan Rakyat Sudan atau *Sudan's People Liberation Army* (SPLA), yang akan mewakili Sudan bagian selatan dalam pertempuran dengan kubu Pemerintah yang berpusat di Sudan bagian utara.¹¹³

Pemerintah Sudan dan SPLA pimpinan Garang akhirnya menandatangani kesepakatan damai di Naivasha Pada tanggal 9 Januari 2005. Perjanjian Perdamaian Komprehensif atau *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) secara resmi mengakui otonomi Sudan selatan dan membuat jalan bagi referendum kemerdekaan (dengan pemberian waktu selama enam tahun bagi rakyat Sudan bagian selatan untuk menentukan pilihan). John Garang dipilih sebagai Wakil

¹¹² Lauren Davis. 2006. *John Garang De Mabior*. <http://africanhistory.about.com/od/biography/a/John-Garang-De-Mabior.htm>. [7 Desember 2013]

¹¹³ Bobby Singer. 2013. *South Sudan President Salva Kiir In Profile*. <http://www.bbc.com/news/world-africa-12107760>. [20 Mei 2013]

Presiden I Sudan sekaligus sebagai Presiden otonomi dari Pemerintahan Sudan Selatan.¹¹⁴

Salva Kiir Mayardit adalah salah satu orang kepercayaan Garang yang juga berjuang dalam perang sipil bersama gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) dari tahun 1983-2005. Ketika John Garang tewas dalam sebuah kecelakaan helikopter bulan Juli 2005, Kiir menggantikan posisi Garang untuk menjadi pemimpin SPLA yang kedua. Dalam pemerintahan Sudan Kiir juga mengisi tempat yang ditinggalkan Garang, yaitu sebagai Presiden otonomi Sudan bagian selatan sekaligus Wakil Presiden I dalam Pemerintahan Pusat Sudan dari tahun 2005-2010.¹¹⁵

Salva Kiir lebih berpengalaman dalam bidang militer daripada berpolitik, namun hal itu tidak membuatnya kehilangan kepercayaan dari rakyat Sudan bagian selatan. Pada pemilu tahun 2010 di wilayah otonomi Sudan bagian selatan, Kiir terpilih lagi sebagai presiden setelah memenangkan 93% suara yang mengalahkan pesaingnya, Lam Akol yang hanya mampu meraih 7% suara.¹¹⁶ Kemenangan Kiir sebagai Presiden Otonomi Sudan bagian selatan juga membuatnya otomatis meneruskan jabatan sebagai Wakil Presiden I di Pemerintahan Nasional Sudan.¹¹⁷

Ketentuan lain dari perjanjian dalam CPA adalah diadakan sebuah referendum bagi Sudan bagian selatan.¹¹⁸ Referendum tersebut bertujuan untuk mengetahui pilihan dari rakyat Sudan bagian selatan, tetap bergabung dengan negara Sudan atau menginginkan kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 15 Januari 2011, sebuah referendum tentang penentuan nasib sendiri yang diadakan di Sudan bagian selatan sebagai hasil kesepakatan dalam CPA telah selesai dilaksanakan. Hasilnya adalah 98% suara dari rakyat Sudan bagian selatan yang menghendaki

¹¹⁴ Security Council. 2005. *Comprehensive Peace Agreement Press Release* <http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8306.doc.htm>. [20 September 2013]

¹¹⁵ Amy Mckenna. 2010. *Salva Kiir Mayardit*. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1115961/Salva-Kiir-Mayardit>. [7 Desember 2013]

¹¹⁶ Pete Muller. 2010. *South Sudan's Polling Problems*. <http://www.aljazeera.com/focus/sudanelection/2010/04/2010429115818482446.html>. [1 April 2013]

¹¹⁷ Amy Mckenna. 2010. *Salva Kiir Mayardit*. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1115961/Salva-Kiir-Mayardit>. [7 Desember 2013]

¹¹⁸ *Ibid*

kemerdekaan. Pada 9 Juli 2011 Republik Sudan Selatan resmi lepas dan merdeka dari Negara Sudan, dengan Salva Kiir Mayardit sebagai presiden pertamanya.¹¹⁹

3.3 Kekuatan Militer Gerakan Separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA)

Anggota gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) banyak yang berasal dari bekas anggota pemberontak *Anya Nya* yang tergabung dalam kesatuan Tentara Nasional Sudan (sebagai bagian dari perjanjian *Addis Ababa*). Namun mereka kemudian membelot karena penerapan perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972 telah dilanggar oleh pemerintahan Nimeiry.¹²⁰ Sejak tahun 1982, bekas pemberontak *Anya Nya* (yang membelot dari Tentara Pemerintah Sudan) merasa akan berakhirnya masa damai di Sudan yang ditandai dengan tidak efektifnya Perjanjian Addis Ababa, mulai melakukan komunikasi dengan bekas pasukan *Anya Nya* yang masih berada di daerah Sudan bagian selatan. Komunikasi tersebut menjelaskan secara komprehensif akan ketidakadilan pemerintahan pusat Sudan yang harus dihentikan. Pada tahun 1983 sekitar 2.500 pasukan yang dahulunya netral, kembali bergabung dengan anggota gerakan separatis SPLA.¹²¹

Pada tahun 1986, jumlah anggota SPLA diperkirakan telah mencapai 12.500 pengikut yang terbagi dalam dalam dua belas batalion yang dilengkapi dengan senjata kecil dan beberapa mortir. Pada tahun 1989 kekuatan SPLA bertambah menjadi 20.000 - 30.000 jiwa, dan pada tahun 1991 anggota milisi separatis SPLA diperkirakan telah mencapai 50.000 - 60.000 jiwa. Pada tahun tersebut setidaknya telah terbentuk empat puluh batalion, dengan beberapa nama operasi seperti *Tiger*, *Crocodile*, *Fire*, *Nil*, *Kalishnikov*, *Bee*, *Eagle*, dan *Hippo*.

¹¹⁹ Samsul Hadi. 2005. SPLA Tunjuk Salva Kiir Gantikan Garang. <http://www.merdeka.com/politik-internasional/splm-tunjuk-salva-kiir-gantikan-garang-9eozl2l.html>. [7 Desember 2013]

¹²⁰ Alistair Boddy-Evans. 2006. *Anya Nya*. <http://africanhistory.about.com/od/glossarya2/g/Anya-Nya.htm>. [20 September 2014]

¹²¹ Nolly Prapti M. Mokke. 2011. Suatu Analisis Tentang Masa Depan Negara Sudan Pasca Referendum. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin. Hlm. 36

Semakin bertambahnya anggota gerakan separatis dari tahun ke tahun disebabkan oleh keinginan masyarakat Sudan bagian selatan untuk memiliki kehidupan yang lebih layak tanpa adanya diskrimansi dan juga keinginan untuk segera mengakhiri dominasi dari pemerintahan pusat di Sudan bagian utara.¹²²

Selain berasal dari bekas militer yang memberontak dan para sukarelawan dari daerah Sudan bagian selatan, anggota milisi separatis SPLA juga berasal dari anak-anak yang dijadikan tentara. SPLA telah merencanakan kebijakan jangka panjang dengan merekrut anak-anak untuk digunakan dalam organisasi mereka. SPLA berperan langsung dalam perekrutan lebih dari 10.000 anak laki-laki usia muda (14-16 tahun) di Sudan bagian selatan untuk kemudian dimasukkan dalam pelatihan militer dan diajari cara berperang.¹²³

Sejak SPLA berdiri di tahun 1983, SPLA banyak mendapatkan dukungan dari pihak luar, salah satunya dari Ethiopia. Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata militer di SPLA, sehingga mempengaruhi dinamika perang sipil kedua yang terjadi antara Pemerintah Sudan dengan separatis SPLA. Mengistu Haile Mariam, adalah orang yang sangat berpengaruh di Ethiopia merupakan salah satu sekutu dari organisasi separatis SPLA. Selama peperangan terjadi, Mengistu telah mengizinkan SPLA untuk bermarkas di Naru, dan memberikan kebebasan untuk melakukan perekrutan anggota pada warga Sudan yang mengungsi di Ethiopia. Selain itu, Ethiopia juga menghibahkan senjata-senjatanya (karena banyak mendapat bantuan militer dari Uni Soviet) yang tidak terbatas saat itu untuk digunakan separatis SPLA.¹²⁴ John Garang juga didukung oleh negara-negara seperti Kuba, Uganda, Chad, dan terutama Israel yang telah memberikan persenjataan, serta pelatihan militer kepada anggota SPLA.¹²⁵

¹²² Steven Aftergood. 2000. *Sudan's People Liberation Army*. <http://www.fas.org/irp/world/para/spla.htm>. [15 Agustus 2013]

¹²³ Human Rights Watch. 1995. *Children in Sudan: Slaves, Street Children, and Child Soldiers*. <http://www.hrw.org/reports/1995/Sudan.htm>. [5 Januari 2014]

¹²⁴ Paan Luel Wel. 2012. *Timeline of South Sudan*. <http://www.southsudannewsagency.com/opinion/articles/timeline-south-sudan-the-evolutionary-phases-of-south-sudans-liberation-struggle-part-4>. [17 Juli 2013]

¹²⁵ Morgan Jeffery. 2002. *Sudan rebels advance with new weapons from Israel*. http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2002/af_sudan_10_04.html. [19 Juni 2013]

SPLA menyatakan bahwa senjata-senjata yang digunakan untuk berjuang melawan Pemerintah Sudan juga berasal dari persenjataan milik pemerintah yang berhasil dirampas saat terjadinya perang atau dibawa oleh Tentara Sudan yang membelot dari *Sudanese People Armed Forces* (SPAF). SPLA juga mengakui telah menerima sejumlah besar dukungan dan bahan-bahan dari Libya sebelum tahun 1985 karena permusuhan Libya terhadap Nimeiry dan keinginan untuk melihat Nimeiry digulingkan. Menurut *The Military Balance*, pada periode 1991-1992, SPLA telah memiliki 60 mm mortir, senjata antipesawat 14.5 mm, dan Soviet SA-7 Shoulder-Fired SAMs (sejenis Bazooka). Sumber-sumber lain mengklaim bahwa SPLA juga telah merampas atau memperoleh meriam *howitzer*, senapan mesin, truk peluncur roket BM - 21, jip antitank *recoilless* 106 mm, sekitar dua puluh kendaraan lapis baja, dan juga ranjau darat yang sudah banyak digunakan.¹²⁶

Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengirim hampir \$20 juta berupa peralatan militer melalui Ethiopia, Eritrea dan Uganda untuk membantu separatis SPLA menggulingkan rezim Khartoum di Sudan pada tahun 1996. Selain itu, beberapa Detasemen Operasional Alpha (juga disebut *The A Team*) dari tentara Amerika Serikat juga beroperasi untuk mendukung SPLA, baik dalam gerilya maupun pelatihan militer.¹²⁷

3.4 Upaya-upaya Penyelesaian Konflik *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) dengan Pemerintah Sudan

Pemerintahan Gaafar Nimeiry telah memperbesar keinginan warga Sudan Selatan untuk melakukan pemberontakan melalui *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) sebagai akibat dari kebijakan Syariah Islam pada tahun 1983 yang diterapkan (dipaksakan) saat itu. Kebijakan tersebut tidak hanya mendapat penolakan dari mayoritas masyarakat beragama Kristen di Sudan bagian selatan,

¹²⁶ Richard Dalton. 2006. *Sudan's People Liberation Army – Profile*. <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/spla-1.htm>. [2 September 2013]

¹²⁷ *Ibid*

tetapi juga antar sesama umat Muslim di Sudan bagian utara.¹²⁸ Namun popularitas Nimeiry tidak hanya jatuh disebabkan oleh Islamisasi tersebut. Masa pemerintahan Nimeiry juga merefleksikan masa kejatuhan ekonomi paling mengkhawatirkan di Sudan. Pada akhirnya Gaafar Nimeiri di kudeta oleh Jenderal Al-Dahab pada tahun 1985.¹²⁹

Setelah kekuasaan dipegang oleh Jenderal Al-Dahab selanjutnya diserahkan pada pemerintahan koalisi yang baru sebagai hasil dari Pemilihan Umum. Pemilu ini mengantarkan Sadiq Al-Mahdi (berperan sebagai Perdana Menteri) dan Ahmed Al-Mirghani (sebagai Presiden), memimpin Sudan dari tahun 1986-1989.¹³⁰ Sejak masa pemerintahan Sadiq sebagai Perdana Menteri, faktor eksternal banyak membentuk kebijakan politik dalam negerinya. Dukungan finansial serta perangkat militer oleh Libya dan Amerika Serikat terus-menerus berlanjut. Pasukan militer Sudan berada dalam posisi yang sangat kuat karena mendapat pasokan persenjataan dari bantuan tersebut.¹³¹

Perundingan perdamaian dimulai antara kedua belah pihak antara Pemerintah Sudan dengan gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) untuk meredakan ketegangan konflik. Perundingan demi perundingan terus diusahakan untuk mencapai hasil yang sama-sama diinginkan oleh kedua pihak. Perundingan damai antara Pemerintah Sudan dengan pihak separatis SPLA ini berlangsung dari tahun 1986-2005.

¹²⁸ Denny Jati. 2013. *Mahmoud Mohammed Taha*. http://inspirasi.co/ensiklopedia_inspirasi/summary/910. [29 Oktober 2014]

¹²⁹ Abraham Barber. 2009. *Sudan – Timeline*. <http://www.humanrightsfirst.org/our-work/crimes-against-humanity/sudan-timeline/>. [25 Juni 2013]

¹³⁰ Agence France-Presse. 2008. *Coalition Government Between Umma Party and Democratic Unionist Party*. <http://www.nytimes.com/2008/11/05/world/africa/05mirghani.html? r=0>. [13 Oktober 2013]

¹³¹ Egidius Patnistik. 2011. *Dampak Penolakan Negara Terhadap Pluralisme*. <http://internasional.kompas.com/read/2011/01/11/07230187/Dampak.Penolakan.Negara.pada.Pluralisme-5>. [12 September 2013]

TABEL 4. PROSES PERDAMAIAN SUDAN – SPLA (1986-2005)

No.	Tahun Perundingan	Nama Perundingan	Hasil Perundingan
1	1986	<i>Koka Dam Declaration</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gencatan senjata - Hukum Syariah dihapus - Pembatalan aliansi militer Sudan dengan militer Mesir dan Libya - Amandemen konstitusi dasar
2	1994	<i>Declaration of Principles (DOP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudan adalah negara multi-etnis - Gencatan senjata - Pembagian sumber daya - Pengakuan Hak Asasi Manusia di Sudan
3	1997	<i>Fashoda Agreement</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Sudan dan SPLA harus mematuhi syarat-syarat perjanjian damai oleh Intergovernmental Authority for Development (IGAD) - Sudan bagian selatan mendapat hak otonomi dan penentuan nasib sendiri
4	2002	<i>Machakos Protokol</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudan bagian selatan berhak menjalankan sistem pemerintahan - Sudan bagian selatan berhak mengadakan referendum di masa depan - Pembagian hasil ekonomi - Hukum Syariah hanya berlaku di Sudan bagian utara

No.	Tahun Perundingan	Nama Perundingan	Hasil Perundingan
5	2002	<i>Memorandum of Understanding (MOU)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Militer dari Pemerintah Sudan dan SPLA harus pasif - Organisasi kemanusiaan berhak masuk Sudan - Menahan operasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
6	2005	<i>Comprehensive Peace Agreement (CPA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi dua wilayah Sudan selama 6 tahun - Gencatan senjata menyeluruh - Otonomi wilayah Sudan bagian selatan - Hukum Syariah berlaku di Sudan bagian utara - Pengadaan referendum setelah 6 tahun masa integrasi

Pada tahun 1986, Perdana Menteri Sadiq melakukan negosiasi perdamaian dengan John Garang selaku pemimpin SPLA. Negosiasi tersebut berlangsung selama dua tahun dan menghasilkan beberapa prasyarat gencatan senjata. Hasil dari negosiasi yang disebut dengan Deklarasi Koka Dam (*Koka Dam Declaration*) tersebut diantaranya adalah penghapusan Hukum Syariah Islam, menghilangkan aliansi antara militer Sudan dengan militer dengan Libya serta Mesir, gencatan senjata, dan mengadakan konferensi pembentukan konstitusi dasar. Perdana Menteri Sadiq telah menyetujui prasyarat yang disampaikan oleh pihak SPLA, dan diharapkan akan diaplikasikan pada bulan September 1989.¹³²

Negosiasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Sadiq dengan pihak SPLA ternyata telah menghilangkan banyak pendukung terhadap pemerintah, termasuk

¹³² Aboubakar Jeng. 2008. *Big Read: John Garang and The Sudanese Civil War*. <http://observer.gm/africa/gambia/article/2008/10/24/big-read-john-garang-and-the-sudanese-civil-war>. [1 juli 2013]

dari pihak militer Sudan. Komandan Omar Al-Bashiir adalah salah satu yang menentang keputusan Perdana Menteri Sadiq untuk melakukan negosiasi dengan SPLA. Disintegrasi antara Pemerintah Sudan dan militer menyebabkan kudeta pada bulan Juni 1989, yang akhirnya menjatuhkan Sadiq dari posisi Perdana Menteri. Kudeta militer ini sekaligus mengakhiri masa Pemerintahan koalisi antara Ahmed al-Mirghani dan Sadiq al-Mahdi. Sejak saat itu, Omar Al-bashiir menduduki posisi tertinggi di Pemerintahan Sudan. Bashir mengangkat diri sebagai Presiden dan Kepala Negara, Perdana Menteri, dan Kepala Angkatan Bersenjata.¹³³

Masa kepemimpinan Omar Al-Bashiir tergolong sewenang-wenang. Dalam menghadapi masalah gerakan pemberontakan yang dilakukan SPLA, Omar Bashir tidak ingin melakukan rekonsiliasi dengan pihak pemberontak meskipun konflik tersebut dapat memicu terpecahnya Sudan. SPLA dihadapkan dengan kekuatan militer yang terus menerus melakukan razia di berbagai daerah Sudan bagian selatan yang dikenal dengan sebutan Pasukan Pembela Rakyat atau *People Defence Force* (PDF). Sejak tahun 1991-2001, diperkirakan sekitar 200.000 wanita dan anak-anak dari Sudan bagian selatan diculik saat razia dilakukan dengan dalih memerangi pemberontak. Penculikan yang dilakukan militer Sudan ini sebenarnya dilakukan demi memenuhi kepentingan bisnis perbudakan di Sudan bagian utara.¹³⁴

Semakin kompleks perang sipil di Sudan, akhirnya menimbulkan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Usaha penyelesaian konflik sering dilakukan bukan hanya oleh kedua pihak (SPLA dengan Pemerintah Sudan), namun juga ada intervensi pihak luar. Tahun 1993, pemimpin dari Ethiopia, Uganda, dan Kenya berusaha membentuk perjanjian perdamaian dan gencatan senjata antar kedua pihak melalui organisasi IGAD (*Intergovernmental Authority*

¹³³ Michael Albert. 2008. *Sudan Civil War*. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sudanese_civil_war. [20 Juni 2013]

¹³⁴ Aboubakar Jeng. 2008. *Big Read: John Garang and The Sudanese Civil War*. <http://observer.gm/africa/gambia/article/2008/10/24/big-read-john-garang-and-the-sudanese-civil-war>. [1 juli 2013]

for Development).¹³⁵ Pada tahun 1994 IGAD berusaha mendorong proses perdamaian dari deklarasi prinsip (*Declaration of Principles*) yang mengidentifikasi elemen-elemen dasar dalam pembentukan perdamaian di Sudan. Pemerintahan Sudan pada awalnya tidak menandatangani deklarasi tersebut, namun ketika menghadapi banyak kekalahan di medan perang dari SPLA, maka deklarasi tersebut ditandatangani pada tahun 1997.

Deklarasi prinsip (*Declaration of Principles*) bukan deklarasi gencatan senjata, ataupun perjanjian mengikat yang akan mengakhiri perang. Deklarasi prinsip tahun 1994 oleh IGAD merupakan fondasi dasar beberapa elemen penting dalam perumusan sebuah perjanjian perdamaian di masa depan. Beberapa poin inti dalam deklarasi tersebut, diantaranya adalah mengakui bahwa Sudan merupakan negara multi-etnis, sehingga membutuhkan sistem pemerintahan yang dapat menghargai kenyataan tersebut melalui implementasi pemerintahan demokratis yang menghargai perbedaan agama dan etnis. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perlu merundingkan sebuah gencatan senjata, agar perang sipil kedua dapat dihentikan secepatnya. Pembagian sumber daya yang setara antara Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan. Adanya konstitusi yang mengakui Hak Asasi Manusia rakyat Sudan, sehingga operasi penculikan (perbudakan) oleh pemerintahan pusat seperti sebelumnya tidak terulang.¹³⁶

Perundingan damai terus dilanjutkan untuk mencegah semakin memburuknya hubungan Pemerintah Sudan dengan pihak separatis SPLA. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penghentian ketegangan, maka disepakatilah Perjanjian Fashoda (*Fashoda Agreement*) pada tahun 1997. Perjanjian ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah penghentian konflik militer antara Pemerintah Sudan dengan gerakan separatis SPLA. Pemerintah dan SPLA harus mematuhi syarat-syarat perjanjian oleh IGAD.

¹³⁵ US Department Of State. 2005. *A brief history of Sudan – part 3*. www.africanhistory.about.com/od/sudan/p/SudanHist3.htm. [11 Juli 2013]

¹³⁶ Jason Hughes. 2008. *Declaration of principles (IGADD/IGAD)*. http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/accord18_26Keytextsandagreements_2006_ENG.pdf. [27 Juni 2013]

Sudan bagian selatan mendapatkan hak otonomi dan hak penentuan nasib sendiri.¹³⁷

Proses perdamaian dibawah perlindungan IGAD mulai terlihat progres yang signifikan Pada tahun 2002. Lebih tepatnya tanggal 20 Juli 2002, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik perang sipil Sudan kedua menandatangani sebuah protokol yang disebut sebagai Protokol Machakos (*Machakos Protocol*) di Kenya. Dalam Protokol Machakos, perjanjian yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan deklarasi prinsip sebelumnya. Hasilnya antara lain, memberikan hak kepada Sudan bagian selatan untuk menjalankan sistem pemerintahan mereka sendiri tanpa campur tangan dari Sudan bagian utara. Sudan bagian selatan memiliki hak untuk mengadakan referendum di masa yang akan mendatang, untuk menentukan bagaimana nasib Sudan bagian selatan nantinya. Protokol Machakos juga mencari solusi yang komprehensif dan adil dalam mengatasi masalah ekonomi sosial yang dihadapi masyarakat Sudan. Hukum Syariah hanya berlaku di Sudan bagian utara, dan tidak berlaku di Sudan bagian selatan. Dalam protokol tersebut juga dijelaskan lebih terinci masalah bagaimana mekanisme transisi pemerintahan, serta struktur pemerintahan Sudan di masa depan.¹³⁸

Tidak lama setelah disepakati Protokol Machakos, yaitu pada bulan Agustus 2002, pembahasan mengenai perjanjian perdamaian dilanjutkan. Perundingan akhirnya menghasilkan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) pada 15 Oktober 2002. Tujuan penandatanganan memorandum tersebut adalah agar terjadi sebuah situasi yang damai selama proses negosiasi dalam proses. Memorandum tersebut berisi beberapa poin dasar seperti kedua pihak (SPLA – Pemerintah Sudan) diharuskan untuk menahan posisi militer masing-masing, menahan pendudukan wilayah, membekukan semua propaganda yang mungkin akan memicu terjadinya peperangan, diperbolehkan akses untuk organisasi kemanusiaan untuk masuk wilayah konflik dua bagian

¹³⁷ Pameld Nyhetbrev. 2000. *The 1997 Fashoda Agreement*. [http://www.sudansupport.no/gammel/english/special_folderhidden/left_menu/documents and resources/The+1997+Fashoda+Peace+Agreement.9UFRHMYS.ips](http://www.sudansupport.no/gammel/english/special_folderhidden/left_menu/documents_and_resources/The+1997+Fashoda+Peace+Agreement.9UFRHMYS.ips). [12 Oktober 2013]

¹³⁸ Laurel Brown. 2002. *Landmark Sudanese peace agreement: Sudan government concludes with the SPLA/M "Machakos Protocol" and issues a Joint Communique*. <http://reliefweb.int/node/106448>. [28 Juni 2013]

Sudan untuk membantu korban konflik, dan menahan semua operasi pelanggaran hak asasi manusia.¹³⁹

Negosiasi perdamaian oleh *Intergovernmental Authority fo Development* (IGAD) terus menerus berlanjut. Pada 19 November 2004, Pemerintah Sudan dan SPLA menandatangani sebuah deklarasi yang memberikan komitmen kepada kedua belah pihak tersebut untuk melakukan finalisasi perjanjian perdamaian komprehensif atau *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) sebelum Desember 2004. Pada akhirnya pada tanggal 9 Januari 2005, sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Gerakan Separatis SPLA dengan pemerintahan Sudan berhasil mengakhiri perang saudara kedua yang telah berlangsung selama 22 tahun. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemimpin SPLA, John Garang dengan Ali Osman Taha (wakil presiden Sudan). Perjanjian perdamaian komprehensif tersebut menyetujui gencatan senjata antar kedua pihak.¹⁴⁰

Dalam perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA), pasukan militer dari Sudan bagian selatan (SPLA) dan Pemerintah Sudan tetap menjadi unit militer yang terpisah satu sama lain. Langkah pertama adalah penarikan 91.000 pasukan Pemerintah Sudan dari Sudan bagian selatan selama dua setengah tahun, sedangkan pihak SPLA punya waktu 8 bulan untuk menarik pasukannya dari wilayah Sudan bagian utara. Integrasi militer antar kedua pihak telah direncanakan dengan jumlah tertentu (jadi pasukan militer masing-masing pihak tidak secara langsung diintegrasikan selama 6 tahun periode integrasi pemerintahan). Walaupun diintegrasikan, masing-masing unit militer berada dalam komando yang berbeda, hanya berada dalam markas yang sama. Hasil referendum enam tahun berikutnya, jika menghasilkan persatuan, maka integrasi militer akan dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak.¹⁴¹

¹³⁹ Kevin Fitzpatrick. 2003. *Machakos Sudan peace talks Memorandum of Understanding* <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/iss/pdfs/igad/machakosagre.pdf>. [22 Juni 2013]

¹⁴⁰ Khanisa. 2011. Referendum Penutup Konflik Sudan. <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/403-referendum-penutup-konflik-sudan>. [17 Agustus 2013]

¹⁴¹ Mollie Zapata. 2011. *Sudan: Comprehensive Peace Agreement And South Sudan Independence*. <http://www.enoughproject.org/blogs/sudan-comprehensive-peace-agreement-and-south-sudan-independence>. [16 Juli 2013]

Dalam perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) tahun 2005, masing-masing pihak juga tidak diberikan obligasi untuk menghilangkan pasukan militernya. Walaupun telah menyetujui gencatan senjata, namun tetap masih ada rasa saling ketidakpercayaan antar kedua pihak. Hak untuk tetap memiliki unit militer dianggap sebagai sebuah mekanisme *check and balance*. Selama enam tahun setelah diberlakukannya perjanjian CPA, jika ada kemungkinan salah satu pihak akan melanggar isi perjanjian yang telah disepakat dan menimbulkan konflik baru, maka setiap pihak mampu untuk melindungi diri mereka masing-masing.¹⁴²

Otonomi dalam perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) diberikan kepada Sudan bagian selatan. Otonomi ini bersifat sementara (selama masa integrasi dengan Pemerintah Pusat Sudan selama enam tahun), sebab masyarakat Sudan bagian selatan memilih sendiri apakah mereka menginginkan otonomi daerah (tetap dalam wilayah negara Sudan), atau mereka ingin merdeka dari Sudan dan membentuk Republik Sudan Selatan. Selama enam tahun tersebut, penghasilan dari industri minyak yang ada di Sudan bagian selatan dibagi dua.¹⁴³ Kepala Negara Sudan di duduki oleh Omar Bashir, dan wakil kepala Negara Sudan adalah John Garang (beberapa bulan kemudian posisinya digantikan oleh Salva Kiir Mayardit ketika Garang tewas dalam kecelakaan helikopter). Hukum Syariah akan tetap diterapkan di Sudan bagian utara, dan semua warga non-Muslim tidak akan terikat pada Hukum Syariah yang bertolak belakang dengan kepercayaan mereka.¹⁴⁴

Comprehensive Peace Agreement (CPA) atau biasa disebut *Naivasha Agreement* (karena proses penandatanganan berada di Naivasha, Kenya), merupakan hasil dari negosiasi perdamaian antar kedua pihak yang difasilitasi oleh IGAD. Perjanjian tersebut berisi beberapa hal seperti tindak lanjut dari pasukan militer setiap kubu, otonomi daerah, kekayaan minyak, isu ekonomi,

¹⁴² Gladys Njorge. 2005. *Historic Sudan peace Accord signed*. http://articles.cnn.com/2005-01-09/world/sudan.signing_1_rebel-group-spla-darfur?s=PM:WORLD. [16 Juli 2013]

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ Allistair Boddy-Evans. 2010. *Comprehensive Peace Agreement Of Sudan 2005*. <http://africanhistory.about.com/od/glossary/c/Comprehensive-Peace-Agreement-Of-2005.htm>. [25 Maret 2014]

administrasi, serta Hukum Syariah Islam. Enam tahun setelah pengaplikasian perjanjian tersebut, diputuskan kelanjutan dari nasib Sudan bagian selatan melalui sebuah referendum. Rakyat Sudan bagian selatan diberikan pilihan setelah enam tahun integrasi pemerintahan kedua pihak berakhir (Januari 2011), dengan memilih tetap bersatu dengan Pemerintah Pusat Sudan atau dengan memilih kemerdekaan.¹⁴⁵



¹⁴⁵ Gladys Njorge. *Op.cit.*

BAB 4. LATAR BELAKANG SUDAN'S PEOPLE LIBERATION ARMY (SPLA) MELAKUKAN GERAKAN SEPARATIS DI SUDAN

4.1 Pemerintah Pusat Sudan Tidak Memperhatikan Pembangunan (Ekonomi) di Sudan Bagian Selatan

Permulaan konflik di Sudan begitu kompleks, tetapi bibit-bibit konflik telah dimulai sejak era kolonial ketika pemerintahan koloni Inggris (Mesir) pada waktu itu memberikan kekuasaan pada Khartoum (Sudan bagian utara) untuk mengatur segala hal di negara kesatuan Sudan (Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan). Seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat di Khartoum secara terselubung telah melakukan diskriminasi terhadap warga non-Muslim di luar wilayah Sudan bagian utara. Sudan bagian utara merupakan pusat pembangunan bagi semua aspek, termasuk ekonomi. Hal tersebut secara tidak langsung telah mengakibatkan banyak wilayah diluar wilayah Sudan bagian utara menjadi daerah yang tertinggal, termasuk wilayah Sudan bagian selatan.¹⁴⁶

Secara geografis Sudan memang daerah yang kaya akan cadangan minyak, gas, dan uranium. Potensi-potensi Sudan antara lain: i) Sudan adalah negara yang terluas di benua Afrika dan wilayah subur di kawasan negara Arab. Hal ini memungkinkan adanya pemberdayaan sumber daya alam yang lebih dibanding negara-negara lainnya. ii) Negara Sudan yang saat ini dianggap miskin dan terbelakang, ternyata menyimpan kekayaan alam yang melimpah, seperti adanya kandungan minyak bumi di Sudan bagian selatan sebanyak 631,5 juta barel yang belum tereksplorasi. Produksi minyak mentahnya sekitar 200.000 barel per hari (pada tahun 2000). iii) Sudan berada di posisi strategis lalu lintas perairan Laut Merah. Sebuah posisi yang menguntungkan untuk menguasai perikanan hingga ke jantung Afrika. iv) Sudan adalah penguasa Sungai Nil kedua setelah Mesir. Sudan

¹⁴⁶ Linnia Arisulistia. 2014. Power Sharing sebagai bagian dari resolusi konflik Comprehensive Peace Agreement di Sudan. Jember: FISIP Universitas Jember. Hlm. 30

sebenarnya adalah negara subur dengan dua aliran anak Sungai Nil yang memberi berkah pertanian yang menjadi pilar utama perekonomian negara.¹⁴⁷

Sudan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam maupun manusia. Salah satu sumber daya utama Sudan yang merupakan penyumbang bagi peningkatan ekonomi negara adalah industri minyak bumi. Sumber minyak bumi banyak ditemukan di bagian tengah dan selatan Sudan, berbeda dengan wilayah Sudan bagian utara. Pada masa pemerintahan Nimeiry, semakin ditegaskan batas antara Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan termasuk tempat eksplorasi minyak. Penduduk di Sudan bagian selatan semakin terpuruk karena distribusi hasil minyak bumi yang tidak seimbang dan kurangnya *basic service* yang tidak disediakan oleh pemerintah karena terlalu fokus pada pembangunan di Sudan bagian utara.

Kemerdekaan pada tahun 1956 memberikan harapan besar bagi rakyat Sudan bagian selatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dari segi pendidikan, politik, ekonomi, serta perkembangan yang merata dan tidak hanya berfokus di daerah Sudan bagian utara. Namun, kemerdekaan menjadi ajang memperlebar jarak perkembangan antar kedua wilayah tersebut. Sudan bagian utara meneruskan kebijakan yang sebelumnya diaplikasikan oleh penjajahan dari Inggris. Keuntungan monopoli kekuasaan politik yang dimiliki Pemerintahan pusat di Sudan bagian utara, mendorong mereka untuk menggunakan kewenangan dalam melakukan penyimpangan terhadap kesempatan pembangunan ekonomi di wilayah lain di Sudan. Pemerintah pusat terus menerus mengaplikasikan program pembangunan ekonomi regional secara tidak merata, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak memberikan kesempatan kepada Sudan bagian selatan untuk berkembang. Kondisi tersebut telah mengakibatkan kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi di daerah termarginalkan apabila dibandingkan dengan Sudan bagian utara yang beribukota di Khartoum. Kesenjangan yang terjadi di wilayah Sudan bagian selatan diperkuat dengan adanya bukti bahwa alokasi dana pembangunan di wilayah Negara Sudan tidak dibagi dengan merata.

¹⁴⁷ Triono Akhmad Munib. 2012. Konflik Sudan: Review. <http://djangka.com/2012/06/21/konflik-sudan-review/>. [17 November 2013]

Tabel 5. Alokasi Dana Pembangunan Untuk Wilayah Negara Sudan Pada Tahun 1996-2001 (Dalam Juta Dinar)¹⁴⁸

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Total Alokasi Dana
Northern	121,3	368,5	763,8	823,6	1.402,4	659,6	4.139,2
Central	340,8	634,5	1.788,1	806,9	492,1	0	4062,4
Khartoum	4.351,4	6.477,3	11.461	13.355,5	3.313	5.740,6	44.698,8
Kordofan	14,6	122	265,2	302,1	164,6	175,2	1.043,7
Darfur	168,3	433,2	169,9	350,6	12,8	0	1.134,8
Eastern	614,1	741,5	580,1	1117	922,6	413,3	4.388,6
South Sudan	610,1	756,2	997,1	1.200	1.006	1.378,2	5.947,6

Perang sipil yang terjadi antara Pemerintah Pusat Sudan di utara dan gerakan separatis SPLA di Sudan bagian selatan, bukan semata-mata karena faktor historis adanya diskrimansi agama yang diwarisi dari pemerintahan kolonial. Namun, lambatnya pembangunan di daerah Sudan bagian selatan yang diakibatkan oleh minimnya alokasi dana pembangunan dalam sektor ekonomi di daerah tersebut. Daerah Sudan bagian utara merupakan wilayah yang memiliki alokasi dana pembangunan daerah tertinggi di Sudan. Dalam kurun waktu 1996-2001, wilayah utara dan Khartoum merupakan daerah dengan alokasi dana pembangunan terbesar, sangat jauh apabila dibandingkan dengan dana pembangunan daerah yang diterima Sudan bagian selatan yang memiliki sumberdaya alam melimpah. Kesenjangan pendapatan dari sumberdaya alam di Sudan bagian selatan telah memicu pemberontakan di wilayah tersebut yang

¹⁴⁸ Eltigani Seisi M. Atemm. 2007. *The Root Causes Of Conflicts In Sudan And The Making Of The Darfur Tragedy*. http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5425~v~The_root_causes_of_conflicts_in_Sudan_and_the_makink_of_the_Darfur_tragedy.pdf. [4 Maret 2015]

dimotori oleh gerakan separatis SPLA, yang menuntut persamaan hak dalam pembagian penghasilan dalam pembangunan ekonomi.

Perusahaan minyak Amerika Serikat, Chevron, menemukan cadangan minyak di wilayah Sudan bagian selatan, yaitu di Bentiu dan Heglig pada tahun 1979 yang berada di Propinsi Unity, sebelah barat Upper Nile. Sejak saat itu faktor minyak ini menjadi rebutan. Wilayah otonomi Sudan bagian selatan menghendaki pembagian hasil minyak yang merata karena cadangan minyak terbesar terdapat di wilayah Sudan bagian selatan. Presiden Sudan yang berkuasa saat itu, Gaafar Nimeiry berusaha merubah batas antara Sudan bagian utara dengan Sudan bagian selatan agar daerah yang kaya minyak itu bisa masuk ke wilayah Sudan bagian utara.¹⁴⁹ Penemuan minyak ini juga memainkan peran penting dalam memicu timbulnya perang saudara kedua di Sudan pada tahun 1983.¹⁵⁰

Minyak merupakan komoditi utama bagi Sudan dalam aktivitas perekonomian negara karena memegang peranan penting dalam perekonomian Sudan. Peningkatan produksi serta ekspor minyak merupakan tantangan bagi perekonomian Sudan. Namun, dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Sudan tentu saja pengelolaan hasil sumber daya ini harus dilakukan dengan komposisi alokasi yang tepat dan berimbang untuk seluruh wilayah Sudan. Pengalokasian hasil sumber daya minyak untuk pembangunan ekonomi di Sudan sudah terhambat dengan adanya perang saudara kedua yang melanda Sudan sejak tahun 1983. Efek negatifnya sering dirasakan oleh masyarakat di wilayah Sudan bagian selatan, karena selain pembangunan ekonomi dipusatkan di Sudan bagian utara, hasil dari sumber daya minyak bumi juga digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai perang melawan gerakan separatis *Sudan's People Liberations Army* (SPLA).¹⁵¹

¹⁴⁹ Emile Schepers. 2012. *Oil in the balance in Sudan-South Sudan war*. <http://www.peoplesworld.org/oil-in-the-balance-in-sudan-south-sudan-war/>. [12 Oktober 2014]

¹⁵⁰ Ismail S. H. Ziada. 2008. *Oil in Sudan*. http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Oil_industry_in_Sudan.pdf. [14 Oktober 2013]

¹⁵¹ Ismail S. H. Ziada. *op.cit.*

Sudan merupakan produsen minyak bumi terbesar ketiga di Afrika, yang menghasilkan sekitar 500.000 ribu barel per harinya. Sebagian besar diantaranya diekspor ke Cina. Pendapatan dari penjualan minyak bumi itu seharusnya menopang perekonomian kedua kawasan utara dan selatan, namun kawasan selatan yang kaya minyak stagnan dalam kemiskinan.¹⁵² Pengelolaan sumber daya alam yang tidak efektif tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pembangunan dan mengakibatkan pertumbuhan perekonomian yang tidak merata. Distribusi sumber daya yang tidak merata telah mengakibatkan minimnya tingkat kesejahteraan di Sudan bagian selatan apabila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan di Sudan bagian utara. Harapan Sudan bagian selatan untuk mengembangkan wilayah, serta membentuk negara persatuan yang lebih baik ternyata telah memperburuk keadaan dan memperbesar diskriminasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat.¹⁵³

Tabel 6. Perbandingan Indikator Pembangunan Antara Sudan Bagian Utara Dengan Sudan Bagian Selatan¹⁵⁴

No.	Indikator Pembangunan	Sudan bagian utara	Sudan bagian selatan
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah-sekolah banyak dibangun di perkotaan daerah utama, yaitu perkotaan wilayah Sudan bagian utara. - Terdapat tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah yang terletak di Sudan bagian Selatan dan Barat telah rusak dan bahkan hancur akibat konflik di Negara tersebut. Tidak ada upaya untuk

¹⁵² Ayu Purwaningsih. 2011. Referendum Sudan, Jalan Menuju Kebebasan. <http://www.dw.de/referendum-sudan-jalan-menuju-kebebasan/a-14755970>. [12 Juli 2014]

¹⁵³ Nolly Prapti M. Mokke. 2011. Suatu Analisis Tentang Masa Depan Negara Sudan Pasca Referendum. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin. Hlm. 23

¹⁵⁴ Paddy Allen. 2011. *Development in North and South Sudan*. <http://www.theguardian.com/global-development/interactive/2011/jul/07/north-south-sudan-development-indicators-interactive>. [25 Februari 2015]

		<p>pendidikan yang lengkap dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat melek huruf warganya mencapai 73,6%, karena penduduk Sudan bagian utara yang terdaftar di sekolah dasar mencapai 71% dari total 30 juta jiwa. 	<p>memperbaiki karena Pemerintah Pusat lebih terfokus dalam pembiayaan perang dalam menangani gerakan separatis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekitar 85% warganya masih buta huruf karena hanya 48% dari 8 juta jiwa warga Sudan bagian selatan yang terdaftar di sekolah dasar.
No.	Indikator Pembangunan	Sudan bagian utara	Sudan bagian selatan
2.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Sudan bagian utara menerima lebih dari 80% dan pembangunan dari pemerintah pusat. - Populasi dibawah garis kemiskinan hanya 46,5% dari total 30 juta jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudan bagian selatan hanya menerima 2% dana pembangunan karena harus berbagi dengan wilayah lain di Sudan yang sebagian besar dananya sudah dikuasai oleh Sudan bagian utara. - Populasi dibawah garis kemiskinan

			mencapai 50,6% dari total 8 juta jiwa.
No.	Indikator Pembangunan	Sudan bagian utara	Sudan bagian selatan
3.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gizi buruk hanya 31,8% dari total 30 juta jiwa. - Jumlah kematian bayi mencapai 71 jiwa per 1000 kelahiran. - Jumlah kematian ibu mencapai 638 jiwa dari 100.000 kelahiran. - Terdapat 111 rumah sakit yang disertai dengan jumlah tenaga medis yang mencapai 46% dari total 30 juta jiwa sebagai penunjang kesehatan bagi warganya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gizi buruk mencapai 48% dari total 8 juta jiwa. - Jumlah kematian bayi mencapai 131 jiwa per 1000 kelahiran. - Jumlah kematian ibu mencapai 1989 jiwa dari 100.000 kelahiran. - Hanya terdapat 68 rumah sakit yang disertai dengan jumlah tenaga medis yang mencapai 2,8% saja dari total 8 juta jiwa sebagai penunjang kesehatan bagi warganya.

Masyarakat Sudan bagian selatan harus menghadapi kondisi serba terbatas mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, dan pendapatan ekonominya. Akses yang terbatas bagi wilayah-wilayah yang termarjinalkan telah menimbulkan disparitas yang begitu besar. Kebijakan Pemerintah Sudan yang tidak pro rakyat

telah mengakibatkan ketimpangan dalam hal pemenuhan kebutuhan hajat hidup rakyat. Pemerintah seolah mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, *public service*, dan lebih mengutamakan kepentingan daerah Khartoum di Sudan bagian utara. Pembangunan ekonomi seolah terpusat disatu wilayah yang pada akhirnya kondisi tersebut telah menciptakan pola diskriminasi di wilayah-wilayah yang lain, termasuk wilayah Sudan bagian selatan.

Marjinalisasi (pembatasan) ekonomi antara Pemerintah Pusat Sudan dengan Sudan bagian selatan telah mendorong lahirnya gerakan separatis *Sudan's People Liberations Army (SPLA)* pada tahun 1983. Berdirinya SPLA juga merupakan sinyal terhadap pemerintah pusat bahwa Sudan bagian selatan juga merasa berhak mendapatkan keuntungan dalam pembangunan ekonomi yang merata karena sebagian besar industri minyak (sekitar 80%) berada di wilayah Sudan bagian selatan.¹⁵⁵

Ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi ini yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi munculnya gerakan separatis SPLA yang menuntut kemerdekaan dari wilayah Sudan bagian selatan. Pengaruh kolonial masih sangat kuat pada sistem ekonomi Sudan, dimana pembangunan ekonomi hanya berpusat di Sudan bagian utara. Wilayah Sudan bagian selatan yang banyak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, emas, besi, perak, serta hasil-hasil pertanian seperti kapas, padi, dan rempah-rempah tidak mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang mereka miliki sehingga menyebabkan perekonomian Sudan bagian selatan sangat memprihatinkan.¹⁵⁶

4.2 Semangat Kedaerahan (Sukuisme) Yang Sangat Kuat Di Sudan Bagian Selatan

Konflik internal hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Penyebab terjadinya konflik biasanya karena adanya suatu perbedaan dan diskriminasi. Hal

¹⁵⁵ Sulaiman Syakir. 2007. Demi Ketentraman Sudan. <http://www.beritaindonesia.co.id/mancanegara/2061-demi-ketentraman-sudan>. [23 Januari 2014]

¹⁵⁶ Fierda Milasari Rahmawati. 2010. *Peacekeeping Operation Darfur*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia. Hlm. 28

yang sama juga terjadi di Sudan, setelah merdeka pada tahun 1956, negara terbesar di Afrika ini tidak pernah lepas dari konflik internal yang kemudian menyebabkan pecahnya Sudan menjadi dua negara pada tahun 2011 melalui sebuah referendum.¹⁵⁷

Sudan merupakan negara terbesar di Afrika yang memiliki populasi lebih dari 41 juta jiwa dan terbagi menjadi beberapa kelompok etnis serta agama. Masyarakat Sudan terdiri lebih dari 100 etnis yang menetap maupun nomaden di wilayah Sudan, namun diklasifikasikan dalam Afrika kulit hitam (52%), Arab (39%), Beja dan Nubian (6%), dan lain-lain (3%). Sebagian besar kelompok etnis di Sudan menafsirkan tradisi dan asal-usul mereka mengacu pada peristiwa masa lampau. Sebagai contoh, orang-orang Berti dan Zaghawa mengklaim diri mereka keturunan suku Nilo-Sahara yang berasal dari barat laut Sudan. Namun, beberapa kelompok etnis yang hidup di Sudan juga merupakan imigran dari negara-negara tetangga Sudan yang terjadi puluhan tahun yang lalu.¹⁵⁸ Populasi penduduk Sudan merupakan populasi yang paling berbeda dengan negara-negara lain di benua Afrika. Hal ini dikarenakan adanya dua kebudayaan besar yaitu Arab dan orang Afrika berkulit hitam, dengan ratusan kelompok etnis, suku dan bahasa. Sebagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab. Selain itu masih juga menggunakan bahasa suku mereka seperti Nubian, Beja, Ta Bedawie, Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotic dan Nilo-Hamitic.¹⁵⁹

Permulaan konflik di Sudan begitu kompleks tetapi bibit-bibit konflik telah dimulai sejak era kolonial ketika pemerintahan koloni Inggris memberikan kekuasaan pada Khartoum (Sudan bagian utara) untuk mengatur segala hal di negara kesatuan Sudan. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi munculnya gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan dari kawasan Sudan bagian selatan. Pemerintahan yang dijalankan sangat didominasi oleh kaum Arab

¹⁵⁷ Voice Of America. 2011. Hasil Referendum: 90 Persen Dukung Kemerdekaan Di Sudan Selatan. <http://www.voaindonesia.com/content/hasil-referendum-90-persen-dukung-kemerdekaan-di-sudan-selatan-114353874/88868.html>. [4 Oktober 2013]

¹⁵⁸ Kartika Wulandari. 2011. Implikasi Pemilu Sudan Tahun 2010 Terhadap Legitimasi Pemerintahan Omar Hassan Al-Bashir. Jember: FISIP Universitas Jember. Hlm 26

¹⁵⁹ Pamela Paglia. 2007. *Ethnicity and Tribalism: are these the Root Causes of the Sudanese Civil Conflicts?*. <http://www.africaeconomicanalysis.org/articles/pdf/sudan0807.pdf>. [10 Oktober 2013]

yang merupakan penduduk mayoritas di Sudan bagian utara, sedangkan kaum Negro Afrika di Sudan bagian selatan kurang mendapatkan tempat di politik dan Pemerintahan Sudan.

Agama juga merupakan elemen penting dalam melihat sejarah, baik konflik maupun politik di Sudan. Islam merupakan agama mayoritas di Sudan bagian utara. Etnis Arab yang mayoritas menetap di Khartoum, ibukota Sudan, merupakan penganut Agama Islam (70%) serta sebagian dari etnis Afrika kulit hitam. Sedangkan sebagian etnis Afrika kulit hitam yang lain merupakan penganut penganut Agama Kristen (5%) yang tersebar di Sudan bagian selatan, serta etnis lain yang banyak menganut kepercayaan kuno atau animisme sebesar 25%.¹⁶⁰ Di Negara Sudan, agama sering dijadikan dalih untuk membantai pemeluk agama yang lain. Konflik lain yang biasa terjadi di Sudan adalah konflik kesukuan atau ras. Eksistensi dari suatu suku (Arab-Muslim) dalam sebuah negara cenderung menghasilkan suatu etnis/suku lain yang akan terabaikan atau tidak diberikan pelayanan publik yang sama dengan suku yang lain sehingga memunculkan diskriminasi pada suatu suku minoritas (Negro-Kristen). Ketidakadilan terhadap suatu suku ini yang kemudian memicu munculnya konflik internal di Sudan agar suku yang terabaikan tersebut bisa lebih dihargai.¹⁶¹

Perasaan diasingkan dan disisihkan oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat Sudan selatan memicu terjadinya perang sipil pertama di negara Sudan. Konflik yang berlangsung selama dua dekade dan telah merenggut nyawa setidaknya setengah juta jiwa. Perang ini berakhir pada tahun 1972 melalui Perjanjian Addis Ababa, yang menjamin otonomi bagi wilayah Sudan bagian selatan. Keefektifitasan kesepakatan Addis Ababa mulai memudar pada tahun 1979 setelah ditemukannya minyak di kawasan perbatasan antara selatan dan utara. Akan tetapi cadangan minyak terbesar terdapat di wilayah Sudan bagian selatan, hingga membuat Nimeiry ingin merubah batas wilayah yang sudah ditentukan melalui perjanjian Addis Ababa. Kesepakatan damai akhirnya berakhir

¹⁶⁰ Floyd Lawton. 2011. *About The Republic Of The Sudan*. <http://www.sudan.net/about.php>. [3 Oktober 2013]

¹⁶¹ John Pike. 2000. *Sudan Civil War*. <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan.htm>. [5 Februari 2013]

pada tahun 1983 ketika Gaafar Nimeiry berupaya mendeklarasikan Sudan sebagai negara Islam, akan menerapkan hukum syariah, berusaha menyingkirkan populasi non-Muslim di kawasan selatan Sudan, dan distribusi hasil minyak bumi yang lebih banyak menguntungkan pihak Pemerintah Pusat di Khartoum.¹⁶²

Adanya ketidakpercayaan yang terus-menerus terhadap Pemerintah Pusat Sudan sejak pengaplikasian perjanjian Addis Ababa berubah haluan, ketidaksetaraan alokasi hasil sumber daya antara Sudan bagian utara dengan selatan, dan kebijakan radikal Islami dengan berkedok pada Hukum Syariah yang dilakukan oleh pemerintahan Nimeiry, telah membuat warga di Sudan bagian selatan berkeinginan untuk melanjutkan pemberontakan yang dihentikan pada tahun 1972. Hal ini berakibat pada kemunculan gerakan separtis di tahun 1983, *The Sudan People's Liberation Army (SPLA)*, cikal bakal angkatan bersenjata di Sudan selatan.¹⁶³

Dalam masyarakat pluralistis seperti di Sudan, Pemerintah Sudan menghadapi sebuah tantangan besar dalam mewujudkan entitas sebuah bangsa. Persoalan dalam menetapkan identitas yang dapat memberi legitimasi dan juga mekanisme guna menentukan dan menanggapi kemauan masyarakat juga merupakan hal yang tak dapat dihindari. Islamisasi dan Arabisme merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Sudan dan diduga sebagai aksi *ethnic cleansing* bagi etnis Afrika serta pemeluk animisme yang merupakan *second class citizen* di Sudan.¹⁶⁴

Latar belakang konflik internal antara Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan erat hubungannya dengan diskriminasi ras dan agama oleh pemerintahan pusat. Konflik internal yang terjadi di Negara Sudan bisa dianggap sebagai konflik antar agama sekaligus ras. Dari segi agama, daerah Sudan bagian utara memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, dan merupakan ras Arab. Sedangkan di Sudan bagian selatan, mayoritas penduduk beragama Kristen, dan

¹⁶² Emile Schepers. 2012. *Oil in the balance in Sudan-South Sudan war*. <http://www.peoplesworld.org/oil-in-the-balance-in-sudan-south-sudan-war/>. [12 Oktober 2014]

¹⁶³ Castiel. 2011. *SPLA to be called South Sudan Armed Forces after independence*. <http://www.sudantribune.com/spip.php?article38727>. [2 Nopember 2013]

¹⁶⁴ John Diggle. 2005. *History of The Sudan*. <http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa86>. [2 Oktober 2013]

ras kulit hitam atau negro. Pemerintahan pusat yang berpegang teguh pada ideologi Islam, kerap menganggap bahwa penduduk Arab Islam lebih *superior* dibandingkan mereka yang berkulit hitam dan beragama Kristen.¹⁶⁵ Munculnya pernyataan bahwa warga Sudan bagian utara yang mayoritas Arab dan Muslim di Sudan di bagian utara lebih superior daripada warga Negro dan non-Muslim di Sudan bagian selatan telah menimbulkan semangat kedaerahan yang kuat di Sudan bagian selatan.¹⁶⁶

Diskriminasi terhadap Negro-Kristen dan Animis di Sudan telah menjadi salah satu sebab terjadinya konflik yang paling lama di negara Afrika terbesar saat itu (sebelum referendum Sudan bagian selatan 2011). Munculnya pernyataan bahwa Arab-Muslim lebih superior juga telah membuat banyak warga Negro-Kristen dan Animis yang mendukung gerakan separatis *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) pimpinan John Garang untuk mendirikan sebuah negara baru dan lepas dari Pemerintah Sudan. Hal ini sekaligus menunjukkan pada warga Arab-Muslim di Sudan bagian utara bahwa warga Negro-Kristen di Sudan bagian selatan bisa hidup mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat Sudan di Khartoum.

Kesetaraan suku di Sudan bagian selatan pada saat itu, dimana tidak ada suku yang merasa lebih dominan karena sama-sama merupakan kaum Negro Afrika telah memunculkan rasa persatuan yang tinggi untuk segera terbebas dari belenggu Pemerintahan Arab di Khartoum. Kaum Negro yang berada di Sudan bagian selatan bahkan ikut ambil bagian dalam mendukung berdirinya SPLA dengan ikut masuk sebagai sukarelawan dalam militer. Selain itu tidak jarang pula kaum kulit hitam juga mengumpulkan bahan makanan sebagai konsumsi para pejuang dalam gerakan separatis SPLA.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Deng D. Akol Ruay. 1994. *The Politics of the Two Sudans*. Uppsala: The Scandinavian Institute of African Studies. Hlm. 56

¹⁶⁶ John Pike. 2000. *Sudan Civil War*. <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan.htm>. [5 Februari 2013]

¹⁶⁷ Steven Aftergood. 2000. *Sudan's People Liberation Army*. <http://www.fas.org/irp/world/para/spla.htm>. [15 Agustus 2013]

Tabel 7. Suku-suku Di Sudan bagian selatan yang mendukung Gerakan Separatis *Sudan People's Liberation Army SPLA*¹⁶⁸

No	Nama Suku	Keterangan
1.	Dinka	Suku dinka adalah suku terbesar dengan jumlah populasi yang mewakili 35,8% populasi diseluruh wilayah Sudan bagian selatan. Suku ini merupakan suku pertama yang mendukung berdirinya SPLA. Pendiri SPLA adalah salah satu masyarakat Dinka, yaitu John Garang.
2.	Nuer	adalah kelompok suku terbesar kedua yang mewakili 15,6% populasi diseluruh Sudan bagian selatan. Salah satu orang penting dari masyarakat Nuer adalah Riek Machar yang saat itu menjadi salah satu orang kepercayaan John Garang di gerakan separatis SPLA.
3.	Shilluk	merupakan suku animisme di Sudan bagian selatan yang sangat menentang diterapkannya Hukum Syariah oleh Pemerintah Pusat Sudan.
4.	Azande	Kelompok suku terbesar ketiga di wilayah Sudan bagian selatan yang memiliki kepercayaan Animisme dan Nasrani (setelah masuknya misionaris Kristen).
5.	Bari	Kelompok suku terbesar keempat di wilayah Sudan bagian selatan. Suku ini memiliki kepercayaan Animisme, namun di masa sekarang masyarakat suku ini lebih banyak memeluk Agama Nasrani.

Perang sipil kedua di Sudan berlangsung lebih lama dan menelan korban jiwa lebih banyak dari perang sipil pertamanya. Salah satu hal yang menjadi penyebab perang sipil kedua berlangsung lebih lama adalah munculnya semangat kedaerahan yang lebih tinggi di Sudan bagian selatan untuk mendapatkan

¹⁶⁸ Gordon Buay. 2011. *The Implementation Of Dinka Domination In South Sudan*. <http://www.southsudan.net/theimp.html>. [17 Nopember 2014]

kehidupan yang lebih baik dengan menjadi negara yang merdeka. Posisi pemerintahan Numeiri, Sadiq, dan Omar Al-Bashiir yang saat itu tidak memiliki keinginan untuk menghapuskan, atau setidaknya membatasi penerapan Hukum Syariah, juga membuat para pemberontak dari Sudan bagian selatan memiliki alasan untuk tetap melakukan pemberontakan sampai hukum tersebut dihapuskan. Adanya dukungan oleh masyarakat lokal terhadap gerakan yang dilakukan *Southern People's Liberation Army* (SPLA) juga ikut berkontribusi memperpanjang peperangan yang terjadi, karena hal tersebut telah meningkatkan jumlah pasukan SPLA, serta akses ke berbagai wilayah sebagai markas maupun tempat peperangan yang baru. SPLA pada akhirnya juga tidak lepas dari Pemerintahan baru di Sudan bagian selatan, karena SPLA merupakan cikal bakal angkatan bersenjata di negara baru Republik Sudan selatan.¹⁶⁹

4.3 Adanya Propaganda (Intervensi Asing) Dalam Kekacauan Konflik Di Sudan

Terbaginya Sudan menjadi dua negara memang menjadi cerminan kegagalan elit politik negara Sudan untuk mempersatukan bangsanya yang multi etnik dan kepercayaan, serta kegagalan dalam menanamkan *sense of nation* ke dalam jiwa masyarakat bangsanya. Terpecahnya negara Sudan juga bukan karena peran dari pihak Sudan bagian selatan dengan gerakan separatis *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) saja, tetapi juga karena adanya intervensi asing (terutama Amerika Serikat dan Israel) yang ikut memperkeruh terjadinya konflik di Sudan.

Sebelum munculnya konflik Sudan-SPLA, Amerika Serikat dan Sudan sebenarnya telah menjalin hubungan kerjasama. Dinamika hubungan dapat dilihat terutama pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Sudan. Sepanjang sejarah, Amerika terlihat banyak memberikan bantuan kepada pemerintahan pusat Sudan. Alasan adanya dukungan pemerintahan pusat Sudan dari awal bisa dilihat

¹⁶⁹ Eric Kripke. 2011. *SPLA to be called South Sudan Armed Forces after independence*. <http://www.sudantribune.com/spip.php?article38727>. [7 Maret 2014]

dari penyebaran paham Komunis di negara tetangga Sudan (Ethiopia dan Libya) pada masa perang dingin. Amerika Serikat berusaha untuk menghalangi penyebaran ideologi komunis agar tidak memasuki Sudan dengan memberikan bantuan-bantuan. Setelah kejatuhan rezim penyebar paham komunis di negara Ethiopia dan Libya, Amerika Serikat mulai mengurangi eksistensinya di negara Sudan.¹⁷⁰ Perubahan drastis eksistensi Amerika Serikat terlihat pada masa pemerintahan Omar Al-bashir. Sejak pemerintahan Omar, bantuan Amerika Serikat berpindah dari pemerintahan pusat, kepada pasukan pemberontak (walaupun dalam jumlah yang relatif kecil).¹⁷¹

Dukungan Omar Al-Bashiir terhadap Saddam Hussein dalam *Gulf War* (Perang Teluk tahun 1990) merupakan alasan Amerika Serikat kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin oleh Omar Al-Bashiir. Sebelum invasi Amerika Serikat di Iraq tahun 2003, Iraq menjadi aktor kunci dalam pemberian asistensi teknik kepada militer Sudan. Pemberian pelatihan militer kerap diberikan kepada Sudan dalam beberapa waktu. Bantuan yang diberikan oleh Saddam Hussein telah membangun hubungan bilateral yang sangat terikat antar kedua pihak. Pada saat Perang Teluk terjadi, Omar Al-Bashiir menunjukkan dukungannya terhadap Saddam Hussein, tindakan yang bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.¹⁷²

Perubahan posisi Amerika Serikat di awal tahun 1990-an telah memberikan banyak manfaat bagi pergerakan pihak separatis SPLA. Sejak perubahan tersebut, Amerika Serikat telah memberikan kontribusi bantuan perangkat militer secara tidak langsung terhadap SPLA melalui Ethiopia dan Uganda.¹⁷³ Pada tahun 1993, Amerika Serikat memasukkan Sudan ke dalam daftar negara pendukung teroris. Amerika Serikat menggerakkan agennya di negara-negara tetangga Sudan untuk memuluskan strategi pemecahbelahan

¹⁷⁰ Nolly Prapti M. Mokke. 2011. Suatu Analisis Tentang Masa Depan Negara Sudan Pasca Referendum. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin. Hlm. 35

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² Tom Cooper. 2003. *Iraqi Invasion of Kuwait*. http://www.acig.org/artman/publish/article_213.shtml. [24 Oktober 2013]

¹⁷³ Clayton Thyne. 2010. *Sudan Civil War*. <http://www.uky.edu/~clthyne2/Thyne-Sudan.pdf>. [19 Juni 2013]

Sudan. Pada tahun 1993 pemimpin Eritrea, Etiopia, Uganda dan Kenya merancang prakarsa perdamaian di Sudan melalui *Intergovernmental Authority for Development* (IGAD). Hasil terpenting dari IGAD diantaranya adalah menghasilkan rancangan *Declaration of Principle* (DOP) pada tahun 1994. DOP mengidentifikasi element dasar yang diperlukan bagi penciptaan perdamaian di Sudan, yaitu hubungan agama dan negara, pembagian kekuasaan, pembagian kekayaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Sudan bagian selatan. Pemerintah Sudan tidak menandatangani DOP pada tahun itu, namun ketika menghadapi banyak kekalahan di medan perang dari SPLA, maka deklarasi tersebut ditandatangani pada tahun 1997.¹⁷⁴

Sebaliknya, Amerika Serikat adalah negara yang paling serius mencari alasan untuk menekan Sudan. Pada November 1997, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi dengan alasan pemerintah Sudan merupakan negara pendukung terorisme dan menekan hak-hak beragama secara bebas. Serangan-serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Sudan diharapkan Amerika Serikat akan memberikan pelajaran bagi penguasa-penguasa di negeri-negeri Muslim lain agar tidak coba-coba menerapkan Islam secara total dalam negara jika tidak menginginkan nasib yang sama dengan Sudan.¹⁷⁵

Dalam konflik di Sudan, Amerika Serikat juga berperan dalam menginfiltrasi Sudan. Peran Amerika Serikat melengkapi permainan Rezim Zionis Israel yang berupaya mengobrak-abrik pemerintahan Khartoum. Bahkan sejumlah pengamat politik meyakini bahwa penandatanganan nota kesepakatan perdamaian antara SPLA dan Khartoum tidak terlepas dari peran Amerika Serikat. Meski penandatanganan itu mengakhiri konflik antara kelompok milisi dan pemerintah Khartoum, namun langkah itu pada dasarnya merupakan bagian konspirasi Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel untuk menggapai ambisinya di Afrika. Bahkan Amerika Serikat berada di belakang desakan internasional untuk melakukan perjanjian damai dengan kelompok separatis bersenjata tersebut yang

¹⁷⁴ Frank Brahim. 1994. *Declaration of principles (IGADD/IGAD)*. http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/accord18_26keytextsandagreements_2006_ENG.pdf. [27 Juni 2013]

¹⁷⁵ Asep Syamsul M. Romli, S.IP. 2000. *Demonologi Islam: upaya barat membasmi kekuatan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 111

pada akhirnya nanti membuat Pemerintah Sudan menjadikan negaranya sebagai negara dengan dua negara bagian (Sudan Utara dan Sudan Selatan) setelah perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) pada tahun 2005. Tujuannya tentu saja agar negara Sudan menjadi lemah sehingga kekayaan alamnya dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat.¹⁷⁶

Sudan adalah sebuah negara yang kaya akan minyak bumi, khususnya di wilayah Sudan bagian selatan. *Chevron Corporation*, salah satu perusahaan energi terbesar dunia yang berpusat di California, Amerika Serikat, memperkirakan cadangan minyak di Sudan melebihi cadangan minyak Arab Saudi dan Iran, meski cadangan minyak di kedua negara itu disatukan.¹⁷⁷ Melimpahnya cadangan minyak bumi di Sudan ini membuat Amerika Serikat tergerak untuk ikut campur tangan dalam konflik yang terjadi di negara itu dengan mendukung gerakan separatis *Sudan People's Liberation Army* (SPLA).¹⁷⁸ Dukungan terhadap SPLA dilakukan Amerika Serikat untuk menekan Pemerintah Sudan agar negara Sudan menjadi lemah, terpecah, dan porak-poranda, sehingga kekayaan alam minyak buminya (Khususnya di Sudan bagian selatan) dapat diolah oleh Amerika Serikat.¹⁷⁹

Selain keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik separatis di Sudan dengan dukungannya terhadap *Sudan People's Liberation Army* (SPLA), Israel juga berada di belakang SPLA untuk menekan terpecahnya Pemerintahan Sudan. Dalam salah satu aksinya, Israel mengirimkan bantuan senjata melalui Ethiopia. Perlu diketahui, sejak berdirinya SPLA di tahun 1983, Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata militer di SPLA, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan Utara dan Selatan. Presiden Ethiopia pada saat itu Mengistu Haile Miriam, merupakan

¹⁷⁶ Deni Subagus. 2011. Dunia Akui Sudan Selatan. <http://health.kompas.com/read/2011/07/11/04082913/Dunia.Akui.Sudan.Selatan>. [2 Februari 2014]

¹⁷⁷ Crowley. 2003. *The Chevron Period: 1974-1992*. <http://www.hrw.org/reports/2003/sudan1103/10.htm>. [12 Mei 2014]

¹⁷⁸ Asep Syamsul M. Romli, S.IP. 2000. *Demonologi Islam: upaya barat membasmi kekuatan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 110

¹⁷⁹ Dan Morrison. 2011. *Sudan Crack's Up*. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/dispatches/features/2011/sudan_cracks_up/south_sudans_oil_curse.html. [10 Juni 2014]

individual yang sangat berpengaruh dan salah satu sekutu organisasi SPLA. Selama peperangan terjadi, Mengistu telah mengizinkan SPLA untuk bermarkas di Naru, dan memberikan kebebasan untuk melakukan perekrutan anggota pada warga Sudan yang mengungsi di Ethiopia.¹⁸⁰

Bantuan yang paling berpengaruh terhadap dinamika peperangan sipil kedua adalah pasokan persenjataan. Tidak selamanya SPLA diberikan bantuan perangkat persenjataan tanpa bayaran apapun, namun seringkali persenjataan ini dapat di akses dengan mudah dari Ethiopia. Pada tahun 1980-an, Ethiopia banyak mendapatkan pasokan persenjataan (bantuan perangkat militer) oleh Uni Soviet, sehingga persediaan persenjataan Ethiopia tergolong tak terbatas dan disumbangkan kepada SPLA saat itu. John Garang juga didukung oleh negara-negara seperti Kuba, Uganda, Chad, terutama Israel yang telah memberikan persenjataan, serta pelatihan militer kepada anggota SPLA. Dalam pelatihan tersebut, pihak Israel melakukan pelatihan militer dan seni berperang terhadap gerakan separatis SPLA di markas-markas khusus yang dibuat di Ethiopia.¹⁸¹

Dukungan Israel kepada kelompok separatis di Sudan bagian selatan telah dilakukan jauh sebelum SPLA terbentuk. Tabel berikut ini akan menampilkan tahap-tahap bantuan dari Israel kepada pihak pemberontak Sudan bagian selatan hingga berdirinya gerakan separatis SPLA yang mengakibatkan pecahnya Negara Sudan.

¹⁸⁰ Richard Dowden. 1994. *Israeli Weapons 'Bound For Rebels' In Southern Sudan: Arms May Be Destined For SPLA Fight Against Khartoum*. <http://www.independent.co.uk/news/world/israeli-weapons-bound-for-rebels-in-southern-sudan-arms-may-be-destined-for-spla-fight-against-khartoum-1430077.html>. [25 Maret 2013]

¹⁸¹ Human Right Watch. 1998. *Sudan: Global Trade, Local Impact*. <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0898%20Report.pdf>. [19 Juni 2013]

Tabel 8. Bantuan Israel Terhadap Gerakan Separatis *Sudan People's Liberation Army (SPLA)*¹⁸²

No	Tahun	Jenis Bantuan
1.	1950-an	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan kemanusiaan (obat-obatan, bahan-bahan, makanan, dokter). - Pelayanan kepada pengungsi perang sipil I yang kabur ke Ethiopia.
2.	1960-an	<ul style="list-style-type: none"> - Mensuplai senjata terhadap pihak pemberontak di Sudan bagian selatan melalui wilayah Negara Uganda. - Pelatihan militer terhadap rakyat Sudan bagian selatan di wilayah Negara Ethiopia, Uganda, dan Kenya.
3.	1960 - 1970-an	<ul style="list-style-type: none"> - Mensuplai senjata buatan Rusia melalui truk-truk kontainer dan pesawat kargo menuju lapangan markas gerakan separatis. - Mendirikan sekolah infanteri untuk mencetak pemimpin-pemimpin gerakan separatis.
4.	1970 – 1980-an	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih pasukan gerakan separatis SPLA dengan berbagai seni perang, termasuk pelatihan penggunaan pesawat tempur.
5.	1990-an - CPA	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan militer dan politik dari pihak intelijen Israel kepada para pimpinan gerakan separatis SPLA. - Pengiriman senjata-senjata berat anti tank dan rudal anti pesawat.

¹⁸² Fahmi Huwaidi. 2011. *South Sudan Separation Affair*.

<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/1/10/الاذفصالقصةصديروون-اسرائيليون>

[7 Desember 2014]

Dukungan Israel terhadap pihak separatis *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) dimulai pada tahun 1950-an, yaitu pada perang saudara Sudan pertama. Pada masa itu, Israel masih berkonsentrasi pada bantuan kemanusiaan (obat-obatan, bahan makanan, dan dokter) kepada pengungsi perang yang kabur ke Ethiopia. Pada fase ini, Israel juga berusaha memperuncing konflik kesukuan dan menciptakan friksi antarsuku di Sudan.

Pada awal tahun 1960-an, Israel konsen dengan unsur-unsur militer rakyat dan melatihnya seni berperang di markas-markas khusus yang dibangun di Ethiopia. Pada fase ini, pemerintah Israel memiliki keyakinan bahwa melibatkan Sudan dalam perang internal dengan pihak separatis dari Sudan bagian selatan sudah cukup merepotkan mereka daripada membantu Mesir dalam konflik dengan Israel (Perang Israel-Mesir tahun 1967).¹⁸³ Organisasi-organisasi misionaris dan bantuan kemanusiaan dari Barat juga melakukan aktivitas di Sudan bagian selatan, sehingga hal ini cukup menarik minat Israel untuk ikut menyusupkan intelijennya ke daerah Sudan bagian selatan dibawah naungan lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan tersebut. Target utama dari intelijen Israel adalah menggalang kelompok-kelompok yang berpengaruh di masyarakat untuk dilatih melanggengkan ketegangan. Pada fase ini juga Israel sengaja memperluas jaringan dukungannya kepada kelompok separatis dengan mensuplai senjata kepada mereka melalui wilayah Uganda. Perjanjian pertama untuk pengiriman senjata diteken tahun 1962, sebagian besar adalah senjata-senjata ringan buatan Rusia yang diperoleh Israel dari sisa-sisa rampasan perang dengan Mesir tahun 1956.¹⁸⁴ Aksi-aksi pelatihan pasukan separatis Sudan bagian selatan juga terus berlangsung di Uganda, Ethiopia dan Kenya.

Tahap ketiga dalam proses bantuan dari Israel terhadap gerakan separatis di Sudan bagian selatan dimulai dari pertengahan tahun 1960-an hingga 1970-an. Dalam fase ini suplai senjata menuju gerakan separatis di Selatan terus

¹⁸³ Michael Cody. 2006. *1967: Israel Launches Attack On Egypt*. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/5/newsid_2654000/2654251.stm. [27 Juli 2014]

¹⁸⁴ Alex Murphy. 2008. *A History Of Israel*. <http://www.historycentral.com/Israel/1967SixDayWar.html>. [16 Juni 2014]

berdatangan melalui pihak intelijen Israel. pihak intelijen Israel mengirimkan truk-truk kontener berisikan senjata buatan Rusia kepada kelompok separatis di Sudan bagian selatan yang mereka peroleh dari rampasan perang dengan Mesir tahun 1967. Pesawat-pesawat kargo Israel menjatuhkan senjata dan alat-alatnya itu ke lapangan markas separatis di daerah Sudan bagian selatan.

Ketika gerakan separatis ini terlihat hampir menyerah pada tahun 1969, pihak Israel habis-habisan mendorong kelompok separatis untuk melanjutkan peperangannya. Mereka menggunakan segala cara dan makar yang bertujuan meyakinkan orang-orang Sudan bagian selatan bahwa mereka tengah terlibat konflik kebangsaan yang menentukan antara Sudan bagian utara yang berkebangsaan Arab muslim dan penjajah dengan Sudan bagian selatan yang berkebangsaan Negro Kristen dan Animis yang mengalami berbagai penderitaan akibat perampasan serta ketidakadilan. Untuk mendukung tujuannya, Israel juga mendirikan sekolah bagi komandan infanteri di untuk mencetak kader-kader terbina untuk memimpin faksi-faksi separatis. Sebelumnya, beberapa kelompok militer Israel ikut serta dalam sejumlah perang untuk menampilkan pengalaman mereka kepada pihak separatis dari Sudan bagian selatan. Pada fase ini juga beberapa kelompok separatis dari selatan dikirim ke Israel untuk mendapatkan latihan militer. Pada awal 1970-an jendela lain secara resmi dibuka untuk menyampaikan bantuan Israel ke Sudan Selatan melalui Uganda.

Tahap keempat dimulai pada akhir 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Bantuan dan dukungan Israel bagi kelompok separatis semakin bertambah setelah Ethiopia menjadi perlintasan terorganisir untuk suplai senjata ke Sudan bagian selatan. Pada fase ini muncul sosok John Garang sebagai pemimpin yang didukung penuh oleh Israel. Pihak separatis SPLA pimpinan John Garang dibekali dana serta senjata dan pelatihan berbagai seni perang oleh militer Israel. Di antara mereka yang dilatih adalah para pilot untuk menggunakan pesawat-pesawat tempur.

Tahap Kelima dimulai awal tahun 1990 dan di fase ini dukungan Israel terus berlanjut dan diperluas jangkauannya. Truk-truk kontainer mulai masuk ke Sudan bagian selatan melalui Kenya dan Ethiopia. Pihak Israel membekali orang-

orang selatan dengan senjata-senjata berat anti tank dan rudal anti pesawat. Pada awal tahun 1993 koordinasi antara pihak militer Israel dengan pihak separatis SPLA pimpinan John Garang telah mencakup berbagai sektor, baik yang berkenaan dengan pendanaan, pelatihan, persenjataan, informasi atau mengawasi pelatih-pelatih Israel dalam mempersiapkan aksi-aksi militer.

Peran Israel dalam konflik internal di Sudan dianggap penting karena Israel juga ingin mencegah penyebaran atau meluasnya pengaruh Islam di Afrika. Perhatian Israel untuk melemahkan Sudan dengan menyulut api perang di Sudan bagian selatan dan melemahkan kaum Muslimin di Ethiopia, Eritrea, dan negara-negara lain di Afrika, adalah untuk menciptakan pengaruhnya demi tujuan menguasai kawasan sungai Nil, Laut Merah, dan menghalangi kebangkitan Islam di wilayah Sudan. Kekuatan Zionis-Kristen menyatakan perang terhadap Sudan, menyusul terbentuknya pemerintahan Islami pimpinan Omar Bashir yang hendak mengangkat harkat masyarakat Sudan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁸⁵

Sudan merupakan negara yang kaya cadangan minyak bumi. Menurut data, banyak sumber minyak terdapat di kawasan Sudan bagian selatan (sekitar 85 persen cadangan minyak Sudan berada di wilayah Sudan bagian selatan). Sudan bagian selatan merupakan negara kaya minyak ketiga di Afrika setelah Nigeria dan Angola.¹⁸⁶ Apabila kekayaan alam di Sudan bagian selatan mampu dikelola dengan baik dan dikuasai penuh oleh umat Islam, tentu akan menjadi modal penting bagi tumbuhnya kekuatan Pemerintah pusat Sudan sehingga berpotensi mengancam kepentingan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Afrika. Sudan adalah negara kunci Islam di benua Afrika dan juga berdaulat di sebagian laut Merah. Sudan bisa menebarkan pengaruh Islam di negara-negara sekitar, seperti Kenya, Uganda, dan Kongo apabila Syariat Islam semakin kuat. Kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap konflik di Sudan lebih dari sekedar kepentingan ekonomi akan sumber daya alam potensial dari Sudan, tetapi juga

¹⁸⁵ Andrew Natsios. 2012. *War, War, And More War For Sudan*. http://www.nytimes.com/2012/08/25/opinion/war-war-and-more-war-for-sudan.html?pagewanted=all&_r=0. [27 Juli 2013]

¹⁸⁶ Budi Bagus. 2014. Sudan Selatan Penghasil Minyak Terbesar Ketiga Di Afrika. <http://www.pikiran-rakyat.com/node/265068>. [6 Mei 2013]

kepentingan politik dan sosial yang berorientasi jangka panjang. Negara-negara Zionis tidak menginginkan kedaulatan Islam ini terjadi, dan untuk itu Sudan perlu dilemahkan. Melalui intervensi mereka di berbagai lapisan, gerakan untuk melemahkan Islam terus dioptimalkan. Orientasi jangka panjang Amerika Serikat terletak pada usaha Amerika Serikat untuk membentuk Sudan bagian selatan sebagai negara yang demokratis dengan berusaha untuk meloloskan referendum rakyat Sudan bagian selatan untuk menentukan nasibnya sendiri.¹⁸⁷

Sumber kekayaan alam Sudan dan jumlah populasi besar yang berbeda budaya dan kepercayaan telah mengundang perhatian khusus Amerika Serikat dan Zionis Israel atas negara ini. Sejak Sudan mengeksplorasi dan mengekspor minyak, Amerika Serikat tidak dapat menahan ketamakannya untuk ikut mengeruk kekayaan negara ini. Karena hal tersebut, Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel berdampingan mengganggu pemerintahan Omar al-Bashir. Pernyataan Presiden Omar Bashir yang berani menyebut agama Islam sebagai sumber hukum dan undang-undang negara Sudan juga telah memperburuk citranya di Pemerintah Amerika Serikat. Lebih dari itu, Omar Bashir juga menunjukkan sikap tegas atas segala arogansi di dunia yang tentunya mengancam hegemoni Amerika Serikat di kawasan.¹⁸⁸

Brigadir Jenderal Moshe Faraji dalam bukunya yang berjudul *Mossad in Africa* menulis:

"Kehadiran Zionis Israel di 32 negara Afrika yang juga menggarap 67 proyek infrastruktur dan 28 proyek pertanian serta melakukan peran sebagai konsultan di negara ini, merupakan peluang besar Tel Aviv untuk menginfiltrasi benua ini."¹⁸⁹

Zionis Israel dalam beberapa dekade terakhir ini juga berupaya menginfiltrasi Sudan melalui tiga negara tetangga seperti Republik Demokratik

¹⁸⁷ Rezita Nailul Azizah. 2014. Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Di Sudan. Jember: FISIP Universitas Jember. Hlm. 66

¹⁸⁸ BBC Indonesia. 2009. Omar Bashir Kecam ICC. http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/090305_sudanicc.shtml. [16 Oktober 2014]

¹⁸⁹ Fahmi Howeidi. 2011. *Israelis Can Tell The Whole Story Of Sudan's Division - They Wrote The Script And Trained The Actors*. <https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/1955-israelis-can-tell-the-whole-story-of-sudans-division-they-wrote-the-script-and-trained-the-actors>. [7 November 2013]

Kongo, Ethiopia dan Uganda. Agen-agen Mossad Israel beraktivitas di tiga negara ini yang kemudian melakukan kontak dengan para pemimpin gerakan milisi di Sudan bagian selatan. Melalui infiltrasi itu, Zionis Israel membangun kekuatan untuk melawan pemerintah pusat Sudan yang dipimpin oleh Omar al-Bashir.¹⁹⁰

Selain itu, Sudan yang juga berdampingan dengan Sungai Nil tentunya menjadi incaran Zionis Israel yang memimpikan Israel Raya hingga Eufrat. Sedangkan Amerika Serikat tentunya ingin mengembangkan ekspansinya ke wilayah Afrika. Dengan cara itu, Amerika Serikat ingin bercokol di negara-negara yang berdekatan dengan perairan internasional Laut Merah. Setelah itu, Amerika Serikat bisa mengawasi perairan internasional ini dan memperkokoh posisi Gedung Putih di Tanduk dan Utara Afrika. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga mengincar minyak dan tambang uranium di Sudan. Faktor-faktor inilah yang membuat Amerika Serikat dan Zionis Israel kompak menginfiltrasi Afrika, khususnya Sudan.

Dengan memperhatikan fenomena yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa referendum menjadi alat Rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat untuk mencapai ambisi-ambisi mereka.¹⁹¹ Jadi, dengan melemahkan Sudan dengan memisahkannya menjadi dua negara, maka Amerika Serikat dan Israel dapat melakukan intervensi terhadap Sudan bagian selatan dengan sekehendak hati, termasuk dapat membentuk negara Kristen di negara baru itu agar peran negara Arab dan Islam Sudan untuk memasuki benua Afrika dapat diminimalisir dan dicegah keberlangsungannya.

Berdasarkan pembahasan yang disertai dengan bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan bahwa munculnya gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) di Sudan dilatarbelakangi oleh tiga hal. Latar belakang tersebut adalah pembangunan ekonomi oleh pemerintah pusat yang tidak merata, timbulnya semangat kedaerahan di Sudan bagian selatan, dan adanya intervensi asing.

¹⁹⁰ Sudan News Agency. 2011. *Blue Nile State Between SPLA Ambitions And Israeli Conspiracy*. http://english.sudansafari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2624:blue-nile-state-between-splm-ambitions-and-israel-conspiracy-&catid=4:press&Itemid=3. [7 Agustus 2013]

¹⁹¹ Indonesian Radio World Service. 2011. *Antara Referendum Sudan Dan Konspirasi Zionis*. <http://indonesian.tribune.com/ranah/telitik/item/34140-Antara-Referendum-Sudan-dan-Konspirasi-Zionis>. [3 Oktober 2013]

**Tabel 9. Latar Belakang Sudan's People Liberation Army (SPLA)
Melakukan Gerakan Separatis Di Sudan**

No.	Latar Belakang	
1.	Pembangunan ekonomi oleh pemerintah pusat yang tidak merata.	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi dana Pembangunan untuk wilayah Negara Sudan yang diterima oleh Sudan bagian selatan sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan dana pembangunan yang diterima oleh Sudan bagian utara. • Sarana pendidikan, kesehatan, dan pendapatan ekonomi yang serba terbatas di wilayah Sudan bagian selatan.
2.	Timbulnya semangat kedaerahan di Sudan bagian selatan.	Munculnya dukungan dari suku-suku mayoritas di Sudan bagian selatan terhadap gerakan separatis <i>Sudan's People Liberation Army</i> (SPLA) dalam perlawanan terhadap pemerintah pusat di Sudan bagian utara.
3.	Adanya intervensi asing.	Masuknya Bantuan Israel dan Amerika Serikat terhadap gerakan separatis <i>Sudan's People Liberation Army</i> (SPLA) dalam terjadinya perang sipil kedua di Sudan.

BAB 5. KESIMPULAN

Sudan merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai keberagaman. Salah satu keberagaman yang ternyata menjadi sumber konflik yang terjadi di Sudan adalah antara Arab (Islam) di Sudan bagian utara dengan Negro (Kristen/Animisme) di Sudan bagian selatan. Kegagalan perjanjian Addis Ababa 1972 dan Kebijakan pemerintahan pusat di Sudan bagian utara yang terkesan berpusat di Khartoum telah menjadi beberapa alasan munculnya gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) di Sudan. Kebijakan pemerintah yang telah melakukan diskriminasi ras dan agama, dominasi ekonomi, pembangunan yang tidak merata, dan masuknya negara lain dalam kekacauan konflik di Sudan bagian selatan, telah memicu terjadinya perang sipil kedua di Sudan pada tahun 1983.

Seiring dengan berjalannya waktu, latar belakang *Sudan's People Liberations Army* (SPLA) dalam melakukan gerakan separatis di Sudan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah alokasi dan pembangunan yang tidak merata dan cenderung terpusat di wilayah Sudan bagian utara. Perang sipil yang terjadi antara Pemerintah Pusat Sudan di utara dan gerakan separatis SPLA di Sudan bagian selatan, bukan semata-mata karena faktor historis adanya diskrimansi agama yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Inggris. Namun, lambatnya pembangunan di daerah Sudan bagian selatan yang diakibatkan oleh minimnya alokasi dana pembangunan dalam sektor ekonomi di daerah tersebut. Daerah Sudan bagian utara merupakan wilayah yang mendapatkan alokasi dana pembangunan daerah tertinggi di Sudan. Keuntungan monopoli kekuasaan politik yang dimiliki Pemerintahan pusat di Sudan bagian utara, mendorong mereka untuk menggunakan kewenangan dalam melakukan penyimpangan terhadap kesempatan pembangunan ekonomi di wilayah lain di Sudan. Pemerintah pusat terus menerus mengaplikasikan program pembangunan ekonomi regional secara tidak merata, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak memberikan kesempatan kepada Sudan bagian selatan untuk berkembang.

Ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi ini yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi munculnya gerakan separatis SPLA yang menuntut kemerdekaan dari wilayah Sudan bagian selatan.

Faktor yang kedua adalah diskriminasi terhadap Negro-Kristen dan Animis di Sudan. Diskriminasi oleh pemerintah pusat terhadap Negro-Kristen dan Animis telah menjadi salah satu sebab terjadinya konflik yang paling lama di negara Afrika terbesar saat itu (sebelum referendum Sudan bagian selatan 2011). Munculnya pernyataan bahwa Arab-Muslim lebih superior juga telah membuat banyak warga Negro-Kristen dan Animis yang mendukung gerakan separatis *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) pimpinan John Garang untuk mendirikan sebuah negara baru dan lepas dari Pemerintah Sudan. Hal ini sekaligus menunjukkan pada warga Arab-Muslim di Sudan bagian utara bahwa warga Negro-Kristen di Sudan bagian selatan bisa hidup mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat Sudan di Khartoum. Semangat persatuan antarsuku yang tinggi menjadi modal berharga pergerakan suku-suku di Sudan bagian selatan untuk segera terbebas dari belenggu Pemerintahan Arab di Khartoum. Kaum Negro yang berada di Sudan bagian selatan bahkan ikut ambil bagian dalam mendukung berdirinya SPLA dengan ikut masuk sebagai sukarelawan dalam militer.

Faktor yang ketiga adalah adanya campur tangan negara lain dalam terjadinya perang sipil kedua di Sudan. Negara seperti Israel dan Amerika Serikat telah menjadi donatur pihak SPLA dalam bantuan senjata hingga pelatihan militer. Kekayaan sumberdaya alam minyak bumi di Sudan bagian selatan menjadi perhatian tersendiri bagi Amerika Serikat. Namun, kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap konflik di Sudan lebih dari sekedar kepentingan ekonomi akan sumber daya alam potensial dari Sudan, tetapi juga kepentingan politik dan sosial yang berorientasi jangka panjang. Apabila kekayaan alam di Sudan bagian selatan mampu dikelola dengan baik dan dikuasai penuh oleh umat Islam, tentu akan menjadi modal penting bagi tumbuhnya kekuatan Pemerintah pusat Sudan sehingga berpotensi mengancam kepentingan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Afrika. Sudan adalah negara kunci Islam di benua Afrika dan

juga berdaulat di sebagian laut Merah. Sudan bisa menebarkan pengaruh Islam di negara-negara sekitar. Selain itu, Sudan yang juga berdampingan dengan Sungai Nil yang tentunya menjadi incaran Zionis Israel yang memimpikan Israel Raya hingga Eufrat. Peran Israel dalam konflik internal di Sudan dianggap penting karena Israel ingin mencegah penyebaran atau meluasnya pengaruh Islam di Afrika. Perhatian Israel untuk melemahkan Sudan yaitu dengan menyulut api perang di Sudan bagian selatan adalah untuk menciptakan pengaruhnya demi tujuan menguasai kawasan sungai Nil, Laut Merah, dan menghalangi kebangkitan Islam di wilayah Sudan.

Perang sipil kedua di Sudan resmi berakhir pada tahun 2005. Berakhirnya perang sipil ini ditandai dengan lahirnya kesepakatan damai *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) pada tahun 2005 antara Pemerintah Pusat Sudan dengan *Sudan's People Liberations Army* (SPLA). Sudan bagian selatan akhirnya resmi merdeka menjadi Republik Sudan Selatan pada tahun 2011 melalui sebuah referendum yang merupakan hasil dari kesepakatan CPA pada tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Cockett, R. 2010. *Sudan: Darfur and the Failure of an African State*. Connecticut: Yale University Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1992. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang.
- Glickman, Harvey. 2000. *Islamism in Sudan's Civil War*. Spring: Orbis Publishers.
- Halim, Abdul. 2004. *Negeri-negeri Muslim yang terjajah*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah. Cetakan I.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Johnson, Douglas. 2003. *The Root Causes of Sudan's Civil Wars*. Indiana: Indiana University Press.
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional Dan Tatanan Dunia 2*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Malik, Saadia L. 2003. *Exploring Aghani Al-Banat: A Postcolonial Ethnographic Approach To Sudanese Women's Song, Culture, And Performance*. Ohio: Ohio University Press.
- Mas'ood, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Panggabean dan Amal, Syamsu Rizal dan Taufik Adnan. 2004. *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvaber.
- Romli, Asep Syamsul M. 2000. *Demonologi Islam: upaya barat membasmi kekuatan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ruay, Deng D. Akol. 1994. *The Politics of the Two Sudans*. Uppsala: The Scandinavian Institute of African Studies.

Rumadi, dan Marzuki Wahid. 2001. *Fiqh Mazhab Negara*. Yogyakarta: LKiS.

Suharyo, dkk. 2010. *Interaksi Hukum Nasional dan Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

UPT Penerbitan Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Voll, John L. Esposito dan John O. 1999. *Demokrasi di Negara Muslim (Islam and Modernity)*. Terj Rahmaniastuti. Bandung: Mizan.

Woodward, Peter. 1990. *Sudan 1898-1989: The Unstable State*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.

Sumber Jurnal:

Keita, S. O. Y. 1993. Studies and Comments on Ancient Egyptian Biological Relationships, dalam *History in Africa*. *North America: African Studies Association*. Vol. 20

Sumber Skripsi:

Arisulistia, Linnia. 2014. *Power Sharing sebagai bagian dari resolusi konflik Comprehensive Peace Agreement di Sudan*. Jember: FISIP Universitas Jember.

Azizah, Rezita Nailul. 2014. *Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Di Sudan*. Jember: FISIP Universitas Jember.

Mahmuda, Rafiq Nurri. 2011. *Kendala International Criminal Court (ICC) dalam Mengimplementasikan Keputusannya tentang*

Penangkapan Presiden Sudan Omar Al Bashir tahun 2005-2009. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo.

Mirza, Muhammad. 2006. *Peran Uni Afrika Dalam Penyelesaian Konflik Darfur*. Jember: FISIP Universitas Jember.

Mokke, Nolly Prapti M. 2011. *Suatu Analisis Tentang Masa Depan Negara Sudan Pasca Referendum*. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin.

Putra, Dodi Utama. 2009. *Konsep Syari'ah Dan Implikasinya Terhadap Masalah HAM (Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad 'Abid Al-Jabiri Dan Abdullah Ahmed An Naim)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rahmawati, Fierda Milasari. 2010. *Peacekeeping Operation Darfur*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.

Satrio, Adhi. 2008. *Peran Pasukan Perdamaian PBB Dalam Konflik Internal Di Sierra Leone (1994-2005)*. Jakarta: FISIP UI.

Setiawan, Ricky. 2010. *Intervensi Ethiopia dalam konflik di Somalia (2006-2008)*". Yogyakarta: FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Winata, Arifian Adi. 2012. *Upaya Penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Sudan Dengan Sudan Selatan*. Yogyakarta: FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Wulandari, Kartika. 2011. *Implikasi Pemilu Sudan Tahun 2010 Terhadap Legitimasi Pemerintahan Omar Hassan Al-Bashir*. Jember: FISIP Universitas Jember.

Sumber Internet:

Aftergood, Steven. 2000. *Sudan's People Liberation Army/Movement*. <http://www.fas.org/irp/world/para/spla.htm>. [5Juli 2013]

Agence France-Presse. 2008. *Coalition Government Between Umma Party and Democratic Unionist Party*. <http://www.nytimes.com/2008/11/05/world/africa/05mirghani.html? r=0>. [13 Oktober 2013]

- Albaioh, Adiek Sier Abdallah. 2011. *Sudan: Society and Culture*. <http://www.sudan.net/society.php>. [10 Maret 2013].
- Albert, Michael. 2008. *Sudan Civil War*. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sudanese_civil_war. [20 Juni 2013]
- Allen, Paddy. 2011. *Development in North and South Sudan*. <http://www.theguardian.com/global-development/interactive/2011/jul/07/north-south-sudan-development-indicators-interactive>. [25 Februari 2015]
- Bagus, Budi. 2014. Sudan Selatan Penghasil Minyak Terbesar Ketiga Di Afrika. <http://www.pikiran-rakyat.com/node/265068>. [6 Mei 2013]
- Barber, Abraham. 2009. *Sudan – Timeline*. <http://www.humanrightsfirst.org/our-work/crimes-against-humanity/sudan-timeline/>. [25 Juni 2013]
- BBC Indonesia. 2009. Omar Bashir Kecam ICC. http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/090305_sudanicc.shtml. [16 Oktober 2014]
- BBC. *General Charles George Gordon (1833-1885)*. http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/gordon_general_charles.shtml. [11 Januari 2014]
- Brown, Laurel. 2002. *Landmark Sudanese peace agreement: Sudan government concludes with the SPLA/M “Machakos Protocol” and issues a Joint Communique*. <http://reliefweb.int/node/106448>. [28 Juni 2013]
- Buay, Gordon. 2011. *The Implementation Of Dinka Domination In South Sudan*. <http://www.southsudan.net/theimp.html>. [17 Nopember 2014]
- Cahoon, Ben. 2005. *The Sudan*. <http://www.worldstatesmen.org/Sudan.html>. [5 Oktober 2013]

- Castiel. 2011. *SPLA to be called South Sudan Armed Forces after independence*.
<http://www.sudantribune.com/spip.php?article38727>. [2
November 2013]
- Cody, Michael. 2006. *1967: Israel Launches Attack On Egypt*.
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/5/newsid_2654000/2654251.stm. [27 Juli 2014]
- Cooper, Tom. 2003. *Iraqi Invasion of Kuwait*.
http://www.acig.org/artman/publish/article_213.shtml. [24
Oktober 2013]
- Cowell, Alan. 1989. *Military Coup In Sudan Ousts Civilian Regime*.
<http://www.nytimes.com/1989/07/01/world/military-coup-in-sudan-ousts-civilian-regime.html>. [5 Oktober 2013]
- Crowley. 2003. *The Chevron Period: 1974-1992*.
<http://www.hrw.org/reports/2003/sudan1103/10.htm>. [12 Mei
2014]
- Dalton, Richard. 2006. *Sudan's People Liberation Army – Profile*.
<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/spla-1.htm>.
[2 September 2013]
- Davis, Lauren. 2006. *John Garang De Mabior*.
<http://africanhistory.about.com/od/biography/a/John-Garang-De-Mabior.htm>. [7 Desember 2013]
- Diggle, John. 2005. *History Of The Sudan*.
<http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa86>. [15 April 2013]
- Donner, Adam. 2005. *Sudan Update: Sudan' People Liberation Army/Movement*.
<http://www.sudanupdate.org/WHOSWHO/SPLAM.HTM>. [10
Maret 2013]
- Dowden, Richard. 1994. *Israeli Weapons 'Bound For Rebels' In Southern Sudan: Arms May Be Destined For SPLA Fight Against Khartoum*.
<http://www.independent.co.uk/news/world/israeli-weapons-bound-for-rebels-in-southern-sudan-arms-may-be->

- [destined-for-spla-fight-against-khartoum-1430077.html](#). [25 Maret 2013]
- Eisa. 2011. *Sudan: British Colonialism's Divide And Rule (1896-1939)*. <http://www.content.eisa.org.za/old-page/sudan-british-colonialisms-divide-and-rule-1896-1939>. [11 Januari 2014]
- Evans, Alistair Boddy. 2006. *1972, Addis Ababa Agreement (for The Sudan)*. <http://africanhistory.about.com/od/glossarya2/g/1972-Addis-Ababa-Agreement.htm>. [5 Agustus 2013]
- Evans, Alistair Boddy. 2006. *Anyanya*. <http://africanhistory.about.com/od/glossarya2/g/Anyanya.htm>. [5 Mei 2013]
- Evans, Alistair Boddy. 2006. *Comprehensive Peace Agreement of 2005 – Sudan*. <http://africanhistory.about.com/od/glossaryc/g/Comprehensive-Peace-Agreement-Of-2005.htm>. [5 Agustus 2013]
- Evans, Alistair Boddy. 2006. *Joseph Lagu: Founder and Leader of the Sudanese Rebel Group Anyanya*. <http://africanhistory.about.com/od/biography/a/Bio-Joseph-Lagu.htm>. [12 November 2013]
- Fadillah, Ramadhian. 2011. 15 Diktator Terbesar Dunia Yang Berhasil Digulingkan. <http://news.detik.com/read/2011/10/22/081456/1749913/1148/15-diktator-terbesar-dunia-yang-berhasil-digulingkan--1-?nd771104bcj>. [15 Juni 2013]
- Fernandez, Alberto. 2007. *U.S. Department of State Background Note-Sudan*. <http://www.factmonster.com/country/profiles/sudan.html>. [15 Oktober 2013]
- Francis, Mark. 1999. *Sudan History*. http://www.mongabay.com/reference/country_studies/sudan/HISTORY.html. [2 Oktober 2013]

- Gale, Richard. 1998. *Ismail Azhari: President Of Sudan From 1965 To 1969*. <http://www.answers.com/topic/ismail-al-azhari>. [4 Oktober 2013]
- Gale, Richard. 1998. *Sayyid Ismail Al-Azhari*. <http://www.answers.com/topic/ismail-al-azhari>. 3 Oktober 2013]
- Gale, Richard. 1998. *Al-Azhari Advocated A British Parliamentary Form Of Government*. <http://www.answers.com/topic/ismail-al-azhari>. [2 Oktober 2013]
- Gibia, Roba. 2008. *Feature: Naivasha agreement was imposed on the Sudan*. <http://www.sudantribune.com/spip.php?article26444>. [17 Agustus 2013]
- Graha, Citra. 2011. *Menanti Nama Sebuah Negara Di Sudan Selatan*. <http://www.suarapembaruan.com/home/menanti-nama-sebuah-negara-di-sudan-selatan/2601>. [15 Maret 2013]
- Hadi, Samsul. 2005. *SPLA Tunjuk Salva Kiir Gantikan Garang*. <http://www.merdeka.com/politik-internasional/splm-tunjuk-salva-kiir-gantikan-garang-9eozl.html>. [7 Desember 2013]
- Heleta, Savo. 2008. *Roots Of Sudanese Conflict Are In The British Colonial Policies*. <http://www.sudantribune.com/spip.php?article25558>. [24 Mei 2014]
- Hevesi, Dennis. 2009. *Gaafar Nimeiry: Impose Islamic Law On All Of Sudan*. http://www.nytimes.com/2009/06/12/world/africa/12nimeiry.html?_r=0. [5 Oktober 2013]
- Hilton, Lucas. 1991. *Abdullah Ibn Mohammed*. <http://www.answers.com/topic/abdallahi-ibn-muhammad>. [2 Oktober 2013]
- Howeidi, Fahmi. 2011. *Israelis Can Tell The Whole Story Of Sudan's Division - They Wrote The Script And Trained The Actors*. <https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/1955-israelis-can-tell-the-whole-story-of-sudans-division-they-wrote-the-script-and-trained-the-actors>. [7 November 2013]

- Human Rights Watch. 1995. *Children in Sudan: Slaves, Street Children, and Child Soldiers*.
<http://www.hrw.org/reports/1995/Sudan.htm>. [5 Januari 2014]
- Huwaidi, Fahmi. 2011. *South Sudan Separation Affair*.
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/1/10/إس/الاند-فصال-قصة-روون-راذ-يل-يون>. [7 Desember 2014]
- Indonesian Radio World Service. 2011. Antara Referendum Sudan Dan Konspirasi Zionis.
<http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/34140-Antara-Referendum-Sudan-dan-Konspirasi-Zionis>. [3 Oktober 2013]
- Ingham, Kenneth. 2006. *Omar Hassan Ahmad Al-Bashir*.
<http://global.britannica.com/EBchecked/topic/54890/Omar-Hassan-Ahmad-al-Bashir>. [3 Oktober 2013]
- Jati, Denny. 2013. *Mahmoud Mohammed Taha*.
http://inspirasi.co/ensiklopedia_inspirasi/summary/910. [29 Oktober 2014]
- Jeng, Aboubakar. 2008. *Big Read: John Garang and The Sudanese Civil War*.
<http://observer.gm/africa/gambia/article/2008/10/24/big-read-john-garang-and-the-sudanese-civil-war>. [1 juli 2013]
- Khanisa. 2011. Referendum Penutup Konflik Sudan.
<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/403-referendum-penutup-konflik-sudan>. [17 Agustus 2013]
- Kripke, Eric. 2011. *SPLA to be called South Sudan Armed Forces after independence*.
<http://www.sudantribune.com/spip.php?article38727>. [7 Maret 2014]
- Lance, Quentin. 2000. *Muhammad Ahmad al-Mahdi*.
<http://www.answers.com/topic/muhammad-ahmad>. [2 Oktober 2013]

- Lang, Derrick. 2010. *John Garang*. <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/225584/John-Garang>. [7 November 2103]
- Lawton, Floyd. 2011. *About The Republic Of The Sudan*. <http://www.sudan.net/about.php>. [3 Oktober 2013]
- Loring, Jean. 2006. *Sir Al-Khatim Al-Khalifa: Transition President Of Sudan*. <http://www.spoeko.com/Sirr+Al+Khatim+Al+Khalifa+1>. [4 Oktober 2013]
- Luhur, Rahmat Budi. 2011. *Sang Pemberontak Selatan Sudan*. <http://www.intelijen.co.id/index.php/sang-pemberontak-selatan-sudan/>. [13 Oktober 2013]
- Mckenna, Amy. 2010. *Salva Kiir Mayardit*. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1115961/Salva-Kiir-Mayardit>. [7 Desember 2013]
- Morgan, Jeffery. 2002. *Sudan rebels advance with new weapons from Israel*. http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2002/af_sudan_10_04.html. [19 Juni 2013]
- Morgan, Jeffrey. 2007. *Sudan's People Liberation Army/Movement (SPLA/M)*. <http://www.sudantribune.com/spip.php?mot183>. [3 Juni 2013]
- Morrison, Dan. 2011. *Sudan Crack's Up*. http://www.slate.com/articles/news_and_politics/dispatches/features/2011/sudan_cracks_up/south_sudans_oil_curse.html. [10 Juni 2014]
- Muller, Pete. 2010. *South Sudan's Polling Problems*. <http://www.aljazeera.com/focus/sudanelection/2010/04/2010429115818482446.html>. [1 April 2013]
- Munib, Triono Akhmad. 2012. *Konflik Sudan: Review*. <http://djangka.com/2012/06/21/konflik-sudan-review/>. [17 November 2013]

- Murphy, Alex. 2008. *A History Of Israel*. <http://www.historycentral.com/Israel/1967SixDayWar.html>. [16 Juni 2014]
- Natsios, Andrew. 2012. *War, War, And More War For Sudan*. <http://www.nytimes.com/2012/08/25/opinion/war-war-and-more-war-for-sudan.html?pagewanted=all&r=0>. [27 Juli 2013]
- Njorge, Gladys. 2005. *Historic Sudan peace Accord signed*. http://articles.cnn.com/2005-01-09/world/sudan.signing_1_rebel-group-spladarfur?s=PM:WORLD. [16 Juli 2013]
- Nyhetsbrev, Pameld. 2000. *The 1997 Fashoda Agreement*. http://www.sudansupport.no/gammel/english/special_folderhidden/left_menu/documents_and_resources/The+1997+Fashoda+Peace+Agreement.9UFRHMYS.ips. [12 Oktober 2013]
- Patnistik, Egidius. 2011. Dampak Penolakan Negara Pada Pluralisme. <http://internasional.kompas.com/read/2011/01/11/07230187/Dampak.Penolakan.Negara.pada.Pluralisme-5>. [15 November 2013]
- Pike, John. 2000. *Sudan Civil War*. <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan.htm>. [5 Februari 2013]
- Priambodo, Ahmad. 2011. Kebijakan Luar Negeri Sudan Terhadap Ketidakstabilan Politik di Sudan. <http://dc341.4shared.com/doc/7y2orYyD/preview.html>. [2 Februari 2013]
- Purwaningsih, Ayu. 2011. Referendum Sudan, Jalan Menuju Kebebasan. <http://www.dw.de/referendum-sudan-jalan-menuju-kebebasan/a-14755970>. [12 Juli 2014]
- Queen, Robert. 2009. *Gaafar al-Nimeiry: Survived As Ruler Of Sudan For 16 Years*. <http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/politics-obituaries/5431188/Gaafar-al-Nimeiry.html>. [4 Oktober 2013]

- Reis, Ana. 2004. Sudan Hadapi Tantangan Berat Dalam Membangun Nasionalisme.
<https://groups.yahoo.com/neo/groups/KESTA/conversations/messages/5674>. [15 Desember 2014]
- Scheffer, Mark. 1983. *Ibrahim Abboud Was Sudan's Leader From 1958 to 1964*. <http://www.nytimes.com/1983/09/09/obituaries/ibrahim-abboud-82-was-sudan-s-leader-from-1958-to-1964.html>. [3 Oktober 2013]
- Schepers, Emile. 2012. *Oil in the balance in Sudan-South Sudan war*. <http://www.peoplesworld.org/oil-in-the-balance-in-sudan-south-sudan-war/>. [12 Oktober 2014]
- Security Council. 2005. *Comprehensive Peace Agreement Press Release*. <http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8306.doc.htm>. [20 September 2013]
- Shaman, Johnny. *Sudan - THE MAHDIYAH, 1884-98*. http://www.mongabay.com/reference/country_studies/sudan/HISTORY.html. [28 Agustus 2014]
- Singer, Bobby. 2013. *South Sudan President Salva Kiir In Profile*. <http://www.bbc.com/news/world-africa-12107760>. [20 Mei 2013]
- Spencer, Kate. 2006. *Sudan-Agriculture*. <http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Sudan-AGRICULTURE.html>. [15 Oktober 2013]
- Steele, Walter. 1994. *Horatio Herbert Kitchener*. <http://www.answers.com/topic/herbert-kitchener-1st-earl-kitchener>. [2 Oktober 2013]
- Stimson, Rose. 2000. *Map Of Sudan*. http://www.brandeis.edu/projects/sudan_center/kakuma_exhibit/sudan_map.html. [1 Oktober 2013]
- Subagus, Deni. 2011. *Dunia Akui Sudan Selatan*. <http://health.kompas.com/read/2011/07/11/04082913/Dunia.Akui.Sudan.Selatan>. [2 Februari 2014]

- Sudan News Agency. 2011. *Blue Nile State Between SPLA Ambitions And Israeli Conspiracy*. http://english.sudansafari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2624:blue-nile-state-between-splm-ambitions-and-israel-conspiracy-&catid=4:press&Itemid=3. [7 Agustus 2013]
- Syakir, Sulaiman. 2007. *Demi Ketentruman Sudan*. <http://www.beritaindonesia.co.id/mancanegara/2061-demi-ketentruman-sudan>. [23 Januari 2014]
- Tockman, William. 2011. *Sudan Oil Production*. <http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=su&v=88>. [7 Oktober 2013]
- U.S. Library Of Congress. 2011. *Anglo-Egyptian Condominium, 1899-1955*. <http://countrystudies.us/sudan/15.htm>. [11 Januari 2014]
- US Departement Of State. 1999. <http://africanhistory.about.com/od/sudan/p/SudanHist1.htm>. [2 Agustus 2013]
- US Department Of State. 2005. *A brief history of Sudan – part 3*. www.africanhistory.about.com/od/sudan/p/SudanHist3.htm. [11 Juli 2013]
- Voice Of America. 2011. *Hasil Referendum: 90 Persen Dukung Kemerdekaan Di Sudan Selatan*. <http://www.voaindonesia.com/content/hasil-referendum-90-persen-dukung-kemerdekaan-di-sudan-selatan-114353874/88868.html>. [4 Oktober 2013]
- Wel, Paan Luel. 2012. *Timeline of South Sudan*. <http://www.southsudannewsagency.com/opinion/articles/timeline-south-sudan-the-evolutionary-phases-of-south-sudans-liberation-struggle-part-4>. [17 Juli 2013]
- Wintergreen, Billy. 2005. *Sudan Profile: Independence*. <http://www.state.gov/outofdate/bgn/sudan/47181.htm>. [2 Oktober 2013]

Zapata, Mollie. 2011. *Sudan: Comprehensive Peace Agreement And South Sudan Independence*.
<http://www.enoughproject.org/blogs/sudan-comprehensive-peace-agreement-and-south-sudan-independence>. [16 Juli 2013]

Sumber E-Book:

Atemm, Eltigani Seisi M. 2007. *The Root Causes Of Conflicts In Sudan And The Making Of The Darfur Tragedy*.
[http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5425~v~The root causes of conflicts in Sudan and the makink of the Darfur tragedy.pdf](http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5425~v~The%20root%20causes%20of%20conflicts%20in%20Sudan%20and%20the%20making%20of%20the%20Darfur%20tragedy.pdf). [4 Maret 2015]

Brahimi, Frank. 1994. *Declaration of principles (IGADD/IGAD)*.
http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/accord18_26Keytextsandagreements_2006_ENG.pdf. [27 Juni 2013]

Fitzpatrick, Kevin. 2003. *Machakos Sudan peace talks Memorandum of Understanding*.
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/iss/pdfs/igad/machakosagre.pdf>. [22 Juni 2013]

Hughes, Jason. 2008. *Declaration of principles (IGADD/IGAD)*.
http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/accord18_26Keytextsandagreements_2006_ENG.pdf. [27 Juni 2013]

Human Right Watch. 1998. *Sudan: Global Trade, Local Impact*.
<http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0898%20Report.pdf>. [19 Juni 2013]

Jok, Kuel Maluil. 2012. *Conflict Of National Identity In The Sudan*.
<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/30239/conflict.pdf?sequence=1>. [16 Maret 2013]

Mansour, Khalid. 2006. *Sudan: Unity In Diversity*.
<http://www.internationalstudies.ohio.edu/activities-outreach/files/Sudan.pdf>. [3 September 2013]

Paglia, Pamela. 2007. *Ethnicity and Tribalism: are these the Root Causes of the Sudanese Civil Conflicts?*.
<http://www.africaeconomicanalysis.org/articles/pdf/sudan0807.pdf>. [10 Oktober 2013]

Thyne, Clayton. 2010. *Sudan Civil War*.
<http://www.uky.edu/~clthyn2/Thyne-Sudan.pdf>. [19 Juni 2013]

Warburg, Gabriel R. 1990. *The Sharia In Sudan: Implementation And Repercussions, 1983-1989*.
<http://www.artsrn.ualberta.ca/amcdouga/Hist347/autumn%202012/additional%20readings/sharia%20in%20sudan%20%20warburg.pdf>. [12 Juni 2014]

Ziada, Ismail S. H. 2008. *Oil in Sudan*.
[http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Oil industry in Sudan.pdf](http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Oil%20industry%20in%20Sudan.pdf). [14 Oktober 2013]

**The Comprehensive Peace
Agreement**

Between

**The Government of The Republic
of The Sudan**

and

**The Sudan People's Liberation
Movement/Sudan People's
Liberation Army**

CHAPEAU OF THE COMPREHENSIVE PEACE AGREEMENT

WHEREAS the Government of the Republic of the Sudan (GOS) and the Sudan People's Liberation Movement/Sudan People's Liberation Army (SPLM/A) (hereinafter referred to as the "Parties"), having met in continuous negotiations between May 2002 and December 2004, in Karen, Machakos, Nairobi, Nakuru, Nanyuki and Naivasha, Kenya, under the auspices of the Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) Peace Process, and, in respect of the issues related to the Conflict Areas of Southern Kordofan and Blue Nile States and Abyei Area, under the auspices of the Government of the Republic of Kenya;

CONSCIOUS that the conflict in the Sudan is the longest running conflict in Africa; that it has caused tragic loss of life, destroyed the infrastructure of the country, eroded its economic resources and caused suffering to the people of the Sudan;

MINDFUL of the urgent need to bring peace and security to the people of the Sudan who have endured this conflict for far too long;

AWARE of the fact that peace, stability and development are aspirations shared by all people of the Sudan;

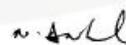
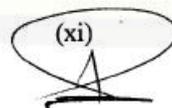
IN PURSUANCE OF the commitment of the Parties to a negotiated settlement on the basis of a democratic system of governance which, on the one hand, recognizes the right of the people of Southern Sudan to self-determination and seeks to make unity attractive during the Interim Period, while at the same time is founded on the values of justice, democracy, good governance, respect for fundamental rights and freedoms of the individual, mutual understanding and tolerance of diversity within the realities of the Sudan;

RECORDING AND RECONFIRMING that in pursuance of this commitment the Parties duly reached agreement on the following texts: the Machakos Protocol, dated 20th July, 2002 which is set out in Chapter I of the Comprehensive Peace Agreement (CPA); the Agreement on Security Arrangements, dated 25th September, 2003 which is set out in Chapter VI of the CPA; the Agreement on Wealth Sharing, dated 7th January, 2004 which is set out in Chapter III of the CPA; the Protocol on Power Sharing, dated 26th May, 2004 which is set out in Chapter II of the CPA; the Protocol on the Resolution of the Conflict In Southern Kordofan and Blue Nile States, dated 26th May, 2004 which is set out in Chapter V of the CPA; and the Protocol on the Resolution of the Conflict in Abyei Area, dated 26th May, 2004 which is set out in Chapter IV of the CPA; and that the Security Council of the United Nations in its Resolution 1574 of 19th November, 2004, took note of these aforementioned Protocols and Agreements;

RECOGNIZING that the Parties have concluded an Agreement on a Permanent Ceasefire and Security Arrangements Implementation Modalities During the Pre-Interim and Interim Periods dated 31st December, 2004 which is set out in Annexure I of the



(xi)



CPA, within the Framework of the Agreement on Security Arrangements of 25th September, 2003;

FURTHER RECOGNIZING that the Parties have also concluded the Agreement on the Implementation Modalities of the Protocols and Agreements dated 31st December, 2004 which is set out in Annexure II of the CPA;

NOW HEREIN THE PARTIES JOINTLY ACKNOWLEDGE that the CPA offers not only hope but also a concrete model for solving problems and other conflicts in the country;

THE PARTIES FURTHER ACKNOWLEDGE that the successful implementation of the CPA shall provide a model for good governance in the Sudan that will help create a solid basis to preserve peace and make unity attractive and therefore undertake to fully adhere to the letter and spirit of the CPA so as to guarantee lasting peace, security for all, justice and equality in the Sudan;

NOW THEREFORE, THE PARTIES AGREE, upon signing this Agreement, on the following:

- (1) The Pre-Interim Period shall commence, and all the obligations and commitments specified in the CPA shall be binding in accordance with the provisions thereof;
- (2) The CPA shall be comprised of the texts of the Protocols and Agreements already signed, together with this Chapeau, the Agreement on Permanent Ceasefire and Security Arrangements Implementation Modalities and Appendices as Annexure I and the Agreement on the Implementation Modalities and the Global Implementation Matrix and Appendices as Annexure II;
- (3) The agreed Arabic and English texts of the CPA shall both be official and authentic. However, in the event of a dispute regarding the meaning of any provision of the text, and only if there is a difference in meaning between the Arabic and English texts; the English text shall be authoritative as English was the language of the peace negotiations.
- (4) Upon compilation of the official and authentic Arabic and English texts of the CPA, the initialled copies of both texts shall be given to both Parties, and copies shall also be lodged with the United Nations, the African Union, IGAD Secretariat in Djibouti, the League of Arab States and the Republic of Kenya.
- (5) All persons performing governmental functions shall continue to do so at the place at which they render such services or perform such functions unless or until redeployed or alternative instructions are received in accordance with the arrangements agreed to by the Parties.

ج.ب.

(xii)

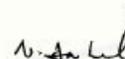
و.س.ل.

- (6) To establish such priority joint task teams, particularly the Joint National Transitional Team (JNTT), the Abyei Boundaries Commission (ABC), the Constitutional Task Team and the Joint Technical Team on “New National Currency” as required to facilitate and prepare for the operationalization of the Agreement once it is put into force;
- (7) To take the necessary steps to ensure the effective implementation of the Permanent Ceasefire;
- (8) To take such steps as are necessary to ensure that resources and funds are available for the establishment of the structures, bodies and institutions contemplated by the CPA especially the establishment of the Government of Southern Sudan;

THE PARTIES EXPRESS THEIR GRATITUDE for the persistent efforts of the Facilitators, the IGAD Member States, and the International Community in assisting the people of the Sudan to return to peace and stability, and in particular, to the African Union, IGAD Partners Forum, the United Nations, and the Governments of Italy, Norway, United Kingdom and the United States of America for their support for the IGAD Peace Initiative and their unwavering interest and consistent endeavours in support of the Peace Process;

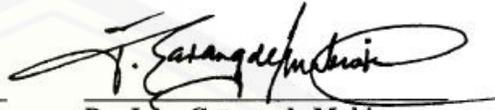
THE PARTIES JOINTLY APPEAL to the Regional and International Community and call on Organizations and States which have been requested to witness the signing of this Agreement to provide and affirm their unwavering support to the implementation of the CPA, and further appeal to them to avail resources for the necessary and urgent programmes and activities of the transition to peace as contemplated and agreed herein;

THE PARTIES RECOGNIZE the enormity of the tasks that lie ahead in successfully implementing the Comprehensive Peace Agreement and in signing below and before the witnesses here present, they reconfirm their commitment to implement the Comprehensive Peace Agreement fully and jointly.





H.E. Ali Osman Mohamed Taha
First Vice President of the Republic
of the Sudan
On behalf of the Government
Of the Republic of the Sudan

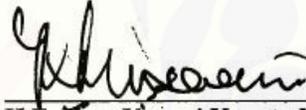


Dr. John Garang de Mabior
Chairman of the Sudan
People's Liberation Movement/Sudan
People's Liberation Army
on behalf of the Sudan People's
Liberation Movement/Sudan People's
Liberation Army

WITNESSED BY:



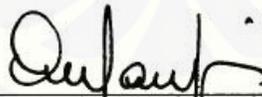
H.E. Hon. Mwai Kibaki
President of the Republic of Kenya
On behalf of the IGAD
Sub-Committee on the Sudan



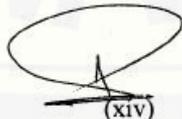
H.E. Hon. Yoweri Kaguta Museveni
President of the Republic of Uganda
On Behalf of IGAD Member States



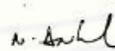
H.E. Mr. Ahmed Aboul Gheit
Egyptian Minister of Foreign Affairs
On behalf of the Government of the Republic of Egypt

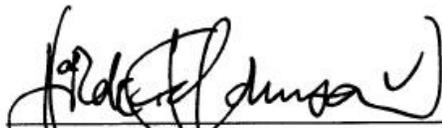


Senator Alfredo Mantica
Deputy Minister for Foreign Affairs
On behalf of the Government of Italy



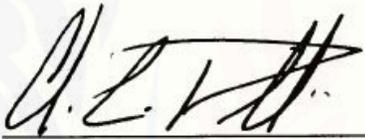
(xiv)

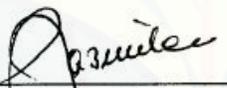


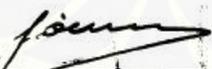

H.E. Mr. Fred Roelke
Special Envoy of the Netherlands
On behalf of the Royal Kingdom of the Netherlands


H.E. Ms. Hilde F. Johnson
Minister of International Development
On behalf of the Royal Norwegian Government


Right Hon. Hilary Benn, M.P.
Secretary of State for International Development
On behalf of the United Kingdom and Northern Ireland


Mr. Colin L. Powell
United States Secretary of State
On behalf of the United States of America

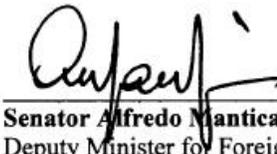

H.E. Mr. Alpha Oumar Konare
Chairperson of the African Union
On behalf of the African Union

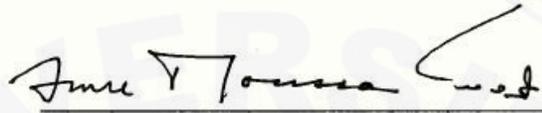

Hon. Charles Goereus
Minister of Development Co-operation of Netherlands
On behalf of the European Union

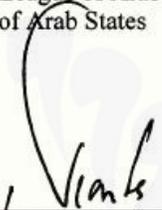



(xv)


H.E. Ms. Hilde F. Johnson
Minister of International Development
On behalf of the IGAD Partners Forum (IPF)


Senator Alfredo Mantica
Deputy Minister for Foreign Affairs
On behalf of the IGAD Partners Forum (IPF)


H.E Mr. Amre Moussa
Secretary General of the League of Arab States
On behalf of the League of Arab States


H.E. Mr. Jan Pronk
Special Representative of the Secretary General in the Sudan
On behalf of the United Nations





